

**PENGARUH KARAKTER EKSEKUTIF, KEPEMILIKAN
INSTITUSIONAL DAN DEWAN KOMISARIS TERHADAP
*TAX AVOIDANCE***

**(Studi pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang
Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk Menempuh Ujian Akhir Program Sarjana (S1)
Program Studi Akuntansi STIE STAN – Indonesia Mandiri

Disusun Oleh:

Wina Triana Noor Yusuf

371801005



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI STAN – INDONESIA MANDIRI

BANDUNG

2022

LEMBAR PENGESAHAN

**JUDUL : PENGARUH KARAKTER EKSEKUTIF, KEPEMILIKAN
INSTITUSIONAL DAN DEWAN KOMISARIS TERHADAP
*TAX AVOIDANCE***

PENULIS : WINA TRIANA NOOR YUSUF

NIM : 371801005

Bandung, 15 Agustus 2022

Mengesahkan

Dosen Pembimbing

Ketua Program Studi

(Dani Sopian S.E., M.Ak)

(Dani Sopian S.E., M.Ak)

Mengetahui

Wakil Ketua I Bidang Akademik

(Intan Pramesti Dewi S.E., M.Ak., Ak., CA.)


LEMBAR PERSETUJUAN REVISI TUGAS AKHIR

**PENGARUH KARAKTER EKSEKTIF, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL
DAN DEWAN KOMISARIS TERHADAP *TAX AVOIDANCE***

**(Studi pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di
Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020)**

Telah melakukan sidang tugas akhir pada 26 Juli 2022 dan telah melakukan revisi sesuai dengan masukan pada saat sidang tugas akhir.

Menyetujui,

No	Nama	Penguji	Tanda Tangan
1	Dani Sopian, S.E., M.Ak	Pembimbing	
2	Ferdiansyah, S.E., M.Ak	Penguji 1	
3	Dr. Ivan Aries Setiawan, M.M	Penguji 2	

Bandung, 15 Agustus 2022
Mengetahui
Ketua Program Studi

Dani Sopian, S.E., M.Ak.
NIDN : 04100687702

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Wina Triana Noor Yusuf

NIM : 371801005

Jurusan : Akuntansi S1

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya susun dengan judul:

**“PENGARUH KARAKTER EKSEKTIF, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL
DAN DEWAN KOMISARIS TERHADAP *TAX AVOIDANCE*”**

(Studi pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa
Efek Indonesia Periode 2016-2020)

Adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan merupakan plagiat dari skripsi orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini adalah hasil jiplakan atau duplikasi saya dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku.

Bandung, 15 Agustus 2022

Wina Triana Noor Yusuf
NIM : 371801005

MOTTO

“Barang siapa bertaqwa kepada Allah SWT maka Dia akan menjadikan jalan keluar baginya, dan memberinya rezeki dari jalan yang tidak ia sangka, dan barang siapa bertawakal kepada Allah SWT maka cukuplah Allah baginya, Sesungguhnya Allah SWT melaksanakan kehendak-Nya, Dia telah menjadikan untuk setiap sesuatu kadarnya”.

(Qur’an Surat Ath-Thalaq ayat 2-3)

“Never regret a day in your life; good days give happiness, bad days give experiences, worst days give lessons, and best days give memories”

Unknown

“Melakukan yang terbaik jauh lebih baik daripada berusaha untuk selalu menjadi yang terbaik”

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari karakter eksekutif, kepemilikan institusional dan dewan komisaris terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020.

Populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 66 perusahaan. Pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling*, yang menghasilkan sampel sebanyak 24 perusahaan. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis regresi linier berganda.

Hasil penelitian menunjukkan variabel karakter eksekutif, kepemilikan institusional dan dewan komisaris berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap *tax avoidance*.

Kata kunci: karakter eksekutif, kepemilikan institusional, dewan komisaris dan *tax avoidance*.

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine the effect of executive character, institutional ownership and board of commissioners on tax avoidance in manufacturing companies of consumer goods industry sector listed on the Indonesian Stock Exchange for 2016-2020.

Population of this study were 66 companies. Sampling were selected by purposive sampling methode, and obtained a sample of 24 companies. Analysis method of the study using descriptive and multiple linear regression analysis.

The result showed that the variables of executive character, institutional ownership and board of commissioners had no significanr effect on tax avoidance.

Keywords: Executive Character, Institutional Ownership, Board of Commissioners and Tax Avoidance.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT., karena berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini yang diberi judul **“PENGARUH KARAKTER EKSEKUTIF, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL DAN DEWAN KOMISARIS TERHADAP TAX AVOIDANCE” (Studi pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020)** untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi di STIE STAN – Indonesia Mandiri Bandung.

Selama proses penyusunan ini, penulis mengalami banyak kesulitan dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman yang ada sehingga penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Akan tetapi dengan adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak berupa bimbingan serta nasihat, maka segala keterbatasan dan kesulitan tersebut dapat teratasi hingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT., yang senantiasa memberikan rahmat, kasih sayang dan hidayah, petunjuk serta segala kemudahan yang diberikan selama proses penulisan skripsi dan selama hidup penulis.

2. Bapak Dani Sopian, S.E., M.Ak. selaku Dosen Pembimbing dan sekaligus Kepala Program Studi Akuntansi STIE STAN Indonesia Mandiri yang telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan, arahan, saran dan masukan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Ferdiansyah, S.E., M.Ak. selaku Ketua Yayasan Indonesia Mandiri Bandung.
4. Ibu Dr. Hj. Nur Hayati, S.E., M.Si. selaku Ketua STIE STAN – Indonesia Mandiri.
5. Ibu Intan Pramesti Dewi, S.E., M.Ak., Ak.,CA. selaku Wakil Ketua I Bidang Akademik STIE-STAN Indonesia Mandiri.
6. Seluruh dosen yang memberikan ilmu selama penulis menempuh pendidikan di Sekolah Ilmu Ekonomi STAN – Indonesia Mandiri.
7. Seluruh staff yang telah membantu dalam memberikan fasilitas sarana dan prasarana di kampus STIE-STAN Indonesia Mandiri.
8. Kedua Orang Tua, yang telah memberikan dukungan secara moril, materiil serta limpahan doa dan kasih sayangnya. Kedua kakak saya yang senantiasa memberikan dukungan dan motivasinya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman seperjuangan akuntansi S1 2018. Terimakasih atas kebersamaan dan perjuangan bersama dalam menyelesaikan pendidikan di STIE-STAN Indonesia Mandiri.

10. Sahabat-sahabat terbaik saya yang selalu memberikan dukungannya, Annisa Eka Fitria, Bayu Ahmad Maulana, Marcerio Indra Juwardi, Tania Puteri Astari Tri Puji Wulandari dan Setiayudha.

11. Sahabat sesama bimbingan saya Annisa Ika Nur Fitri, Resi Yuli Yanti dan Reza Arifin yang saling membantu, memotivasi, dan memberikan saran.

12. Kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari akan keterbatasan dan kemampuan dalam bidang pengetahuan serta pengalaman dalam skripsi ini yang masih jauh dari kata sempurna, maka penulis mengharapkan masukan, kritik dan saran yang membangun kearah perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan semoga niat baik dari semua pihak yang membantu penulis menyelesaikan skripsi ini mendapat balasan dari Allah SWT.. Aamiin.

Bandung, 26 Juli 2022

Wina Triana Noor Yusuf

NIM : 371801005

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN REVISI TUGAS AKHIR	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iii
MOTTO	iv
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Kegunaan Penelitian	8
1.4.1 Kegunaan Teoritis	9
1.4.2 Kegunaan Praktis	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS	
2.1 Tinjauan Pustaka	11
2.1.1 Teori Keagenan (Agency Theory)	11
2.1.2 Definisi Pajak	12
2.1.2.1 Fungsi Pajak	13
2.1.2.2 Jenis-jenis Pajak	13
2.1.2.3 Tata Cara Pemungutan Pajak	14

2.1.2.4 Hambatan Pemungutan Pajak	16
2.1.3 <i>Tax Avoidance</i>	17
2.1.3.1 Definisi <i>Tax Avoidance</i>	17
2.1.3.2 Karakter <i>Tax Avoidance</i>	18
2.1.3.3 Cara Perusahaan Melakukan <i>Tax Avoidance</i>	19
2.1.3.4 Pengukuran <i>Tax Avoidance</i>	19
2.1.4 <i>Good Corporate Governance</i>	21
2.1.4.1 Tujuan <i>Good Corporate Governance</i>	22
2.1.4.2 Prinsip-prinsip Dasar <i>Good Corporate Governance</i>	23
2.1.4.3 Unsur-unsur <i>Good Corporate Governance</i>	24
2.1.4.4 Mekanisme <i>Good Corporate Governance</i>	25
2.1.5 Karakter Eksekutif	27
2.1.5.1 Pengukuran Karakter Eksekutif	27
2.1.6 Kepemilikan Institusional	28
2.1.6.1 Pengukuran Kepemilikan Institusional	29
2.1.7 Dewan Komisaris	30
2.1.7.1 Fungsi Dewan Komisaris	31
2.1.7.2 Tanggungjawab Dewan Komisaris	32
2.1.7.3 Pengukuran Dewan Komisaris	33
2.2 Penelitian-penelitian Terdahulu	33
2.3 Kerangka Teoritis	40
2.3.1 Hubungan Karakter Eksekutif dengan <i>Tax Avoidance</i>	41
2.3.2 Hubungan Kepemilikan Institusional dengan <i>Tax Avoidance</i>	41
2.3.3 Hubungan Dewan Komisaris dengan <i>Tax Avoidance</i>	42
2.4 Model Analisis	43
2.5 Pengembangan Hipotesis	43
BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN	
3.1 Objek Penelitian	44

3.2 Lokasi Penelitian.....	44
3.3 Metode Penelitian	45
3.3.1 Unit Analisis.....	45
3.3.2 Populasi dan Sampel.....	46
3.3.2.1 Populasi	46
3.3.2.2 Sampel	48
3.3.3 Teknik Pengambilan dan Penentuan Ukuran Sampel	49
3.3.4 Teknik Pengumpulan Data	53
3.3.5 Jenis dan Sumber Data	54
3.3.6 Operasionalisasi Variabel.....	54
3.3.6.1 Variabel Independen.....	55
3.3.6.2 Variabel Dependen	57
3.3.7 Teknik Analisis Data	59
3.3.7.1 Analisis Statistik Deskriptif.....	59
3.3.7.2 Uji Asumsi Klasik	61
3.3.8 Menghitung Koefisien Korelasi	63
3.3.9 Pengujian Hipotesis	64
3.3.9.1 Uji Analisis Regresi Linier Berganda.....	65
3.3.9.2 Uji Statistik F.....	66
3.3.9.3 Uji Statistik t.....	67
3.3.9.4 Uji Koefisien Determinasi	68

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian	69
4.1.1 Populasi dan Sampel Penelitian.....	69
4.1.2 Analisis Deskriptif.....	73
4.1.2.1 Karakter Eksekutif.....	74
4.1.2.2 Kepemilikan Institusional.....	76
4.1.2.3 Dewan Komisaris	78

4.1.2.4 <i>Tax Avoidance</i>	80
4.1.2.5 Rata-rata dan Standar Deviasi	82
4.1.2.6 Analisis Korelasi	83
4.2 Uji Asumsi Klasik.....	85
4.2.1 Uji Normalitas.....	86
4.2.2 Uji Heteroskedastisitas.....	87
4.2.3 Uji Multikolinearitas	88
4.2.4 Uji Autokorelasi.....	89
4.3 Pengujian Hipotesis	90
4.3.1 Hasil Pengujian Analisis Regresi Linier Berganda.....	91
4.3.2 Uji Statistik F	92
4.3.3 Uji Statistik t	93
4.3.4 Uji Koefisien Determinasi	95
4.4 Pembahasan, Implikasi dan Keterbatasan.....	96
4.4.1 Pembahasan.....	96
4.4.2 Koefisien Determinasi Karakter Eksekutif, Kepemilikan Institusional dan Dewan Komisaris terhadap <i>Tax Avoidance</i>	100
4.4.3 Implikasi	100
4.4.3.1 Implikasi Teoritis	101
4.5 Keterbatasan Penelitian.....	102
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan	103
5.2 Saran	105
5.2.1 Saran Teoritis	105
5.2.2 Saran Praktis	105
DAFTAR PUSTAKA	xvii
LAMPIRAN.....	xxii
RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Pengukuran Penghindaran Pajak.....	19
Tabel 2.2 Ringkasan Penelitian Terdahulu	37
Tabel 3.1 Populasi Penelitian.....	46
Tabel 3.2 Teknik Pengambilan Sampel	50
Tabel 3.3 Kriteria Penentuan Sampel	52
Tabel 3.4 Operasionalisasi Variabel	58
Tabel 3.5 Interpretasi Nilai Koefisien Korelasi	64
Tabel 4.1 Kriteria <i>Purposive Sampling</i>	70
Tabel 4.2 Daftar Perusahaan Sampel	71
Tabel 4.3 Daftar Perusahaan dengan Data <i>Outlier</i>	72
Tabel 4.4 Karakter Eksekutif Perusahaan	74
Tabel 4.5 Kepemilikan Institusional	76
Tabel 4.6 Dewan Komisaris.....	78
Tabel 4.7 <i>Tax Avoidance</i>	80
Tabel 4.8 Hasil Uji Analisis Deskriptif.....	82
Tabel 4.9 Hasil Uji Analisis Korelasi	83
Tabel 4.10 Hasil Uji Multikolinearitas	88
Tabel 4.11 Hasil Uji Autokorelasi	89
Tabel 4.12 Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda.....	91
Tabel 4.13 Hasil Uji Statistik F.....	92
Tabel 4.14 Hasil Uji Statistik t.....	93
Tabel 4.15 Hasil Uji Koefisien Determinasi.....	95

DAFTAR GAMBAR

2.1 Model Analisis	43
4.1 Grafik Uji Normalitas	86
4.2 Uji Heteroskedastisitas.....	87

DAFTAR LAMPIRAN

Daftar Hadir Bimbingan

Lampiran 1 Populasi Penelitian

Lampiran 2 Sampel Penelitian

Lampiran 3 Teknik Pengambilan Sampel

Lampiran 4 Tabel Kriteria *Purposive Sampling*

Lampiran 5 Olah Data Perhitungan Variabel Karakter Eksekutif

Lampiran 6 Olah Data Perhitungan Variabel Kepemilikan Instiusional

Lampiran 7 Olah Data Perhitungan Variabel Dewan Komisaris

Lampiran 8 Olah Data Perhitungan Variabel *Tax Avoidance*

Lampiran 9 Data Hasil Perhitungan Karakter Eksekutif

Lampiran 10 Data Hasil Penghitungan Kepemilikan Instiitusional

Lampiran 11 Data Hasil Perhitungan Dewan Komisaris

Lampiran 12 Data Hasil Perhitungan *Tax Avoidance*

Lampiran 13 Hasil Penghitungan SPSS

Lampiran 14 Profil Perusahaan

Lampiran 15 Laporan Keuangan Perusahaan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Bagi negara, pajak merupakan sumber pendapatan utama yang akan digunakan untuk kepentingan rakyatnya. Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara (Diantari dan Ulupui, 2016).

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling potensial dan menempati persentase tertinggi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dibandingkan penerimaan lainnya (www.pajak.go.id, 2015). Namun, pemerintah mengalami beberapa kendala dalam mengoptimalkan pendapatan dari sektor ini. Salah satu kendala yang dihadapi pemerintah dalam optimalisasi penerimaan pajak adalah praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Menurut perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih dan sudah menjadi rahasia umum bahwa perusahaan selalu menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin. Semakin besar sebuah perusahaan, maka semakin banyak juga beban pajak yang harus dibayarkan (Kurniasih dan Sari, 2013).

Salah satu upaya untuk mengurangi beban pajak yang dilakukan oleh manajemen perusahaan adalah dengan menggunakan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*). Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan suatu strategi pajak agresif yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka meminimalkan beban pajak, sehingga kegiatan ini memunculkan risiko bagi perusahaan antara lain denda dan buruknya reputasi perusahaan dimata publik (Annisa dan Kurniasih, 2012).

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) bersifat unik karena di sisi perusahaan hal ini diperbolehkan, namun menurut pemerintah tidak diinginkan (Maharani dan Suardana, 2014). Praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) tidak selalu dapat dilakukan karena wajib pajak tidak selalu menghindari semua unsur atau fakta yang dikenakan dalam perpajakan (Dewi dan Jati, 2014).

Fenomena praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) di Indonesia masih terjadi hingga saat ini. Salah satu contoh kasus penghindaran pajak (*tax avoidance*) di Indonesia dilakukan oleh PT Bumi Resources Tbk bersama anak perusahaannya, PT Kaltim Prima Coal (KPC) dan PT Arutmin yang diduga telah melakukan penghindaran pajak sebesar Rp2,1 triliun untuk tahun buku 2007. (<https://nasional.kompas.com>).

Berdasarkan fenomena tersebut, praktik penghindaran pajak dapat menyebabkan kerugian dan berkurangnya penerimaan pajak yang diterima negara. Selain itu, praktik penghindaran pajak juga dapat menyebabkan ketidakadilan, menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat dan berkurangnya efisiensi sistem perpajakan. Oleh karena itu, kontribusi pajak harus dioptimalkan karena kontribusi pajak semakin signifikan dan diperhitungkan sebagai tulang punggung sumber

pembiayaan nasional dalam rangka mensukseskan program pembangunan nasional yang akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan bangsa dan masyarakat pada umumnya (Sarraj, 2017).

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*), diantaranya *Good Corporate Governance* (Marselawati dkk, 2018), *Corporate Social Responsibility* (Dewi dan Gunawan, 2019), profitabilitas, *leverage* (Rahayu et.al., 2020), dan intensitas modal (Aryatama dan Raharja, 2021).

Berdasarkan faktor-faktor yang telah dijelaskan diatas, penelitian ini akan menggunakan faktor *good corporate governance* yang diproksikan melalui karakter eksekutif, kepemilikan institusional, dan dewan komisaris.

Terjadinya penghindaran pajak (*tax avoidance*) oleh perusahaan dapat ditentukan oleh karakter eksekutif. Secara langsung, individu yang terlibat dalam pembuatan keputusan pajak adalah direkur pajak dan konsultan pajak perusahaan. Namun, eksekutif (direktur utama atau presiden direktur) sebagai pimpinan perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung memiliki pengaruh terhadap semua keputusan yang terjadi di perusahaan, termasuk keputusan untuk melakukan penghindaran pajak oleh perusahaan. Eksekutif sebagai individu tentu memiliki karakteristik yang berbeda dalam melakukan pengambilan keputusan atau membuat kebijakan perusahaan. Sehingga, karakter eksekutif dianggap sebagai salah satu faktor penting yang mempengaruhi kebijakan yang akan diambil oleh eksekutif atau pimpinan perusahaan (Hanafi dan Harto, 2014). Dalam menjalankan tugasnya sebagai pimpinan perusahaan, eksekutif memiliki dua karakter yaitu *risk taker* dan *risk averse*.

Eksekutif dengan karakter *risk taker* berani melakukan tindakan penghindaran pajak yang akan mengakibatkan perusahaan dapat diperiksa secara hukum dan dapat menurunkan reputasi perusahaan apabila penghindaran pajak dilakukan secara agresif dan melanggar hukum. Namun, eksekutif yang memiliki karakter *risk averse* cenderung berupaya menghindari risiko tinggi dan tidak memiliki keberanian untuk membuat kebijakan yang mempunyai dampak tinggi sehingga akan berupaya menghindari kegiatan penghindaran pajak (Pratomo dan Triswidyaria, 2019).

Faktor lain yang mempengaruhi penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional merupakan proporsi pemegang saham yang dimiliki oleh pemilik institusional seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan lain kecuali anak perusahaan dan institusi lain yang memiliki hubungan istimewa (perusahaan afiliasi dan asosiasi) atas laporan yang dibuat (Yendrawati, 2015). Kepemilikan institusional umumnya bertindak sebagai pihak yang memonitor perusahaan. Dalam penelitian (Sumanto *et al.*, 2014) menyebutkan bahwa kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam melakukan monitoring manajemen karena dengan adanya kepemilikan oleh institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal. Kepemilikan institusional dinilai memiliki kendali yang besar atas suatu perusahaan berdasarkan jumlah saham yang dimiliki. Semakin besar jumlah saham yang dimiliki, maka semakin tinggi tingkat pengawasan terhadap manajer dalam mengelola perusahaan.

Selain dua faktor tersebut diatas, penghindaran pajak (*tax avoidance*) juga dipengaruhi oleh faktor dewan komisaris. Dewan komisaris adalah organ perseroan

yang memiliki tugas melakukan pengawasan secara umum atau khusus sesuai dengan anggaran dasar. Dewan komisaris memiliki fungsi sebagai pengawas dan pemberi nasihat kepada manajer (direksi) atas nama pemegang saham (Sarmo *et al.*, 2020). Dalam menjalankan fungsi pengawasan, dewan komisaris dapat mempengaruhi pihak manajemen untuk membuat laporan keuangan yang berkualitas. Dewan komisaris menjadi penengah antara manajemen dan pemilik perusahaan dalam pengambilan keputusan strategi atau kebijakan agar tidak melanggar peraturan yang berlaku, termasuk juga keputusan perpajakan (Ardyansyah dan Zulaikha, 2014).

Penelitian ini dilandaskan pada masalah teoritis atas inkonsistensi penelitian terdahulu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance*. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Rangkuti *et al.*, (2017) dan Oktamawati (2017) menyatakan bahwa karakter eksekutif berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Sedangkan hasil penelitian Noviani *et al.*, (2018), Kartana dan Wulandari (2018) serta Gartika dan Wijaya (2018) menyebutkan bahwa karakter eksekutif tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi *tax avoidance* adalah kepemilikan institusional. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Feranika (2015), dan Mahulae (2016) kepemilikan institusional berpengaruh signifikan pada *tax avoidance*. Sedangkan hasil penelitian Masripah *et.al.*, (2016) menyebutkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan pada *tax avoidance*.

Faktor lain yang mempengaruhi *tax avoidance* yaitu dewan komisaris. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Putrantri dan Setiawanta (2015), serta Eksandy (2015)

menyebutkan bahwa proporsi dewan komisaris berpengaruh signifikan pada *tax avoidance*. Namun, penelitian serta Diantari dan Ulupui (2016), menyebutkan bahwa proporsi dewan komisaris tidak memiliki pengaruh signifikan pada *tax avoidance*.

Berdasarkan uraian tersebut diatas serta adanya inkonsistensi dari beberapa penelitian terdahulu, penelitian ini bertujuan untuk menguji kembali pengaruh karakter eksekutif, kepemilikan institusional dan dewan komisaris terhadap *tax avoidance*. Oleh karena itu penulis melakukan penelitian dengan mengangkat judul **“PENGARUH KARAKTER EKSEKUTIF, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL DAN DEWAN KOMISARIS TERHADAP *TAX AVOIDANCE* PADA SEKTOR INDUSTRI BARANG KONSUMSI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) PERIODE 2016-2020”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Penelitian ini dilakukan untuk mencoba mengkaji karakter eksekutif, kepemilikan institusional dan dewan komisaris dalam pengaruhnya terhadap *tax avoidance*. Adapun masalah yang diidentifikasi adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh Karakter Eksekutif terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor Industri Barang Konsumsi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2020?
2. Bagaimana pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor Industri Barang Konsumsi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2020?
3. Bagaimana pengaruh Dewan Komisaris terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor Industri Barang Konsumsi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2020?
4. Bagaimana pengaruh Karakter Eksekutif, Kepemilikan Institusional dan Dewan Komisaris terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor Industri Barang Konsumsi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2020?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh karakter eksekutif terhadap *tax avoidance* perusahaan manufaktur sektor Industri Barang Konsumsi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2020.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* perusahaan manufaktur sektor Industri Barang Konsumsi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2020.
3. Bagaimana pengaruh dewan komisaris terhadap *tax avoidance* perusahaan manufaktur sektor Industri Barang Konsumsi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2020.
4. Bagaimana pengaruh karakter eksekutif, kepemilikan institusional, dan dewan komisaris terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor Industri Barang Konsumsi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2020.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis dan teoritis bagi penulis dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dan membutuhkannya, kegunaan penelitian dapat dijabarkan sebagai berikut :

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, terutama untuk meningkatkan pemahaman mengenai Pengaruh Karakter Eksekutif, Kepemilikan Institusional dan Dewan Komisaris terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor Industri Barang Konsumsi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2016-2020.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk melihat sejauh mana peran karakter eksekutif, kepemilikan institusional, dewan komisaris dalam pembuatan keputusan dan kebijakan di perusahaan yang terkait dengan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*).

2. Bagi Investor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai keadaan perusahaan melalui peran karakter eksekutif, kepemilikan institusional, dewan komisaris sebagai bahan pertimbangan sebelum melakukan keputusan investasi.

3. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan peneliti mengenai pengaruh karakter eksekutif, kepemilikan institusional dan dewan komisaris terhadap *tax avoidance*.

4. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pengaruh karakter eksekutif, kepemilikan institusional dan dewan komisaris terhadap *tax avoidance*

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA TEORITIS, DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan merupakan teori yang menjelaskan hubungan *agent* sebagai manajer atau pihak yang mengelola perusahaan dan *principal* sebagai pemilik, dan keduanya terikat dalam sebuah kontrak. Seorang manajer (*agent*) akan lebih mengetahui mengenai keadaan perusahaannya dibandingkan dengan pemilik (*principal*). Manajemen berkewajiban untuk memberikan informasi mengenai perusahaan kepada pemilik. Tujuan utama dari teori agensi adalah untuk menjelaskan bagaimana pihak-pihak yang melakukan hubungan kontrak dapat mendesain kontrak yang dapat meminimalisir laba sebagai dampak informasi yang tidak simetris dan kondisi yang tidak pasti (Sarra, 2017).

Teori agensi juga menjelaskan tentang permasalahan yang terjadi antara *principal* dengan *agent* yang disebabkan karena *agent* memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan dengan *principal*. Hal tersebut dapat membuat *agent* mempunyai tujuan yang berbeda dengan *principal* (Sunarsih dkk, 2019).

Perbedaan kepentingan antara *principal* dan *agent* dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Karena sistem perpajakan di Indonesia menggunakan *self assessment*

system yaitu memberi kewenangan kepada wajib pajak (perusahaan) untuk menghitung dan melaporkan pajaknya sendiri, maka sistem ini memberikan peluang besar bagi *agent* untuk memanipulasi pendapatan kena pajak menjadi lebih kecil, agar beban pajak yang ditanggung perusahaan juga lebih kecil (Nugraha dan Meiranto, 2015:7).

Keterkaitan teori agensi dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*) yaitu pihak manajemen menginginkan peningkatan kompensasi melalui tingkat laba yang tinggi, sedangkan pemegang saham ingin menekankan biaya pajak melalui laba yang rendah.

2.1.2 Definisi Pajak

Pajak didefinisikan sebagai iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dipaksakan) dengan tanpa mendapat jasa imbalan yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo (2018:1)).

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.1.2.1 Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2018:4), fungsi pajak dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Fungsi *Budgeter* atau fungsi anggaran, pajak merupakan salah satu sumber pendanaan bagi negara untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi *Cregulerend* atau fungsi mengatur, pajak merupakan suatu alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

2.1.2.2 Jenis-jenis Pajak

Mardiasmo (2018:7) menyebutkan bahwa secara umum pemberlakuan pajak di Indonesia dapat dibedakan dan diklasifikasikan menjadi:

1. Menurut Golongan
 - a. Pajak Langsung adalah pajak yang menjadi beban langsung bagi wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan pada orang lain. Contohnya yaitu Pajak Penghasilan (PPh).
 - b. Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan pada orang lain. Contohnya yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2. Menurut Sifatnya
 - a. Pajak Subjektif merupakan pungutan yang berasal dari orang pribadi yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan dipengaruhi oleh keadaan pribadi wajib pajak. Contohnya yaitu tarif Pajak Penghasilan (PPh) yang dibedakan berdasarkan NPWP.

3. Pajak Objektif merupakan jenis pajak yang tidak melihat kondisi dari wajib pajaknya, melainkan dilihat dari sifat objek pajak. Contohnya yaitu PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
4. Menurut Pemungutan
 - a. Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah pusat. Contohnya yaitu PPh(Pajak Penghasilan) dan PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah).
 - b. Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah setempat yang kemudian digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah daerah.
Pajak daerah terdiri atas:
 1. Pajak Propinsi, contohnya Pajak Kendaraan Bermotor.
 2. Pajak Kabupaten/Kota, contohnya Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Hiburan.

2.1.2.3 Tata Cara Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2018:8) terdapat beberapa tata cara pemungutan pajak, sebagai berikut:

1. Stelsel pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan dengan tiga stelsel, yaitu:

- a. Stelsel Nyata (Riil), pemungutan dilakukan berdasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya dilakukan pada akhir tahun pajak, setelah penghasilan sesungguhnya diketahui.

- b. Stelsel Anggapan (Fiktif), pemungutan didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh Undang-Undang. Misalnya, penghasilan tahun ini dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pajak terutang yang harus dibayar pada awal tahun pajak baru sudah bisa ditetapkan.
 - c. Stelsel Campuran, merupakan kombinasi antara Stelsel Nyata dan Anggapan. Pada awal tahun, besaran pajak dihitung berdasarkan anggapan, kemudian diakhir tahun pajak akan disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya.
2. Asas Pemungutan Pajak
- a. Asas Domisili (tempat tinggal), negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik dari penghasilan dalam atau luar negeri.
 - b. Asas Sumber, negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan di wilayahnya tanpa melihat tempat tinggal wajib pajak.
 - c. Asas Kebangsaan, pemungutan pajak didasarkan oleh kebangsaan suatu negara.
3. Sistem Pemungutan Pajak

Terdapat beberapa sistem pemungutan pajak, antara lain:

a. Official Assessment System

Sistem ini memberikan wewenang kepada pemerintah melalui aparatur pajaknya untuk menentukan besaran pajak yang harus dibayar berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Self Assessment System

Sistem ini memberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak terutang yang harus dibayarkan setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. With Holding System

Sistem ini memberikan wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besaran pajak terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.2.4 Hambatan Pemungutan Pajak

Usaha menghindari pajak atau tidak membayar pajak tentunya menjadi hambatan bagi pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan negara sektor pajak. Terdapat dua bentuk perlawanan sebagai reaksi ketidakpuasan atau ketidakcocokan terhadap pajak, yaitu:

1. Perlawanan Pasif

Perlawanan ini timbul dari kondisi struktur perekonomian, kondisi sosial masyarakat, perkembangan intelektual penduduk, moral warga masyarakat dan sistem pemungutan pajak itu sendiri yang mungkin kurang dipahami oleh masyarakat.

2. Perlawanan Aktif

Perlawanan ini meliputi berbagai usaha yang dilakukan oleh masyarakat untuk menghindari, menyelundup, memanipulasi, dan meloloskan pajak. Usaha ini meliputi :

- a. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) yaitu usaha untuk meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.
- b. Penggelapan pajak (*tax evasion*) yaitu usaha untuk meringankan beban pajak dengan melakukan pelanggaran terhadap undang-undang.

2.1.3 *Tax Avoidance*

2.1.3.1 Definisi *Tax Avoidance*

Menurut Pohan (2016:14) penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan, untuk memperkecil jumlah pajak terutang. Sedangkan Mardiasmo (2018) mendefinisikan penghindaran pajak (*tax avoidance*) sebagai suatu usaha untuk meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang yang berlaku.

Penghindaran pajak bertujuan untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayar dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*loopholes*) dalam ketentuan perpajakan, sehingga dianggap legal karena tidak melanggar peraturan perpajakan

yang berlaku. Penghindaran pajak juga dapat disebut sebagai suatu perencanaan pajak (*tax planning*).

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) seringkali dikaitkan dengan penggelapan pajak (*tax evasion*), karena keduanya sama-sama memiliki tujuan meminimalkan atau menghilangkan kewajiban pajak. Namun, secara hukum terdapat perbedaan antara *tax avoidance* (penghindaran pajak) dengan *tax evasion* (penggelapan pajak), dimana *tax avoidance* adalah segala kegiatan yang menghambat dalam pemungutan pajak sehingga mengakibatkan berkurangnya penerimaan kas negara, sedangkan *tax evasion* adalah pelanggaran yang disengaja atau mengelakkan pajak yang berlaku untuk meminimalkan kewajiban pajak (Putra dan Merkuswati, 2016).

2.1.3.2 Karakter *Tax Avoidance*

Komite fiskal dari *Organization Economic Corporation and Development* (OECD) dalam Fadhillah (2014) menyebutkan bahwa terdapat 3 karakter penghindaran pajak (*tax avoidance*), yaitu:

1. Adanya unsur artifisial dimana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat di dalamnya padahal tidak, yang dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.
2. Memanfaatkan *loopholes* dari undang-undang atau menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan, yang sebenarnya tidak dimaksudkan oleh pembuat undang-undang.

3. Umumnya para konsultan menunjukkan alat atau cara untuk melakukan penghindaran pajak dengan syarat Wajib Pajak harus menjaganya serahasia mungkin (*Council of Executive Secretaries of Tax Organization, 1991*).

2.1.3.3 Cara Perusahaan Melakukan Tax Avoidance

Penelitian Hoque *et al.*, (2011) dalam Syahfitri (2016) mengungkapkan bahwa terdapat beberapa cara yang dilakukan oleh perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*), yaitu sebagai berikut:

1. Mengakui pembelanjaan modal sebagai pembelanjaan operasional, dan membebankan yang sama terhadap laba bersih sehingga mengurangi utang pajak perusahaan.
2. Membebankan biaya personal sebagai biaya bisnis sehingga mengurangi jumlah laba bersih.
3. Mencatat pembuangan yang berlebihan dari bahan baku dalam industri manufaktur sehingga mengurangi laba kena pajak.

2.1.3.4 Pengukuran Tax Avoidance

Menurut penelitian Hanlon dan Heitzman (2010) dalam Astuti dan Aryani (2016), terdapat 12 cara yang dapat digunakan untuk mengukur penghindaran pajak (*tax avoidance*), yang disajikan dalam tabel 2.1.

Tabel 2.1
Pengukuran Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

No	Pengukuran	Cara Perhitungan
1	GAAP ETR	$\frac{\text{worldwide total income tax expense}}{\text{worldwide total pre - tax accounting income}}$
2	<i>Current ETR</i>	$\frac{\text{worldwide current income tax expense}}{\text{worldwide total pre - tax accounting income}}$
3	<i>Cash ETR</i>	$\frac{\text{worldwide cash tax paid}}{\text{worldwide total pre - tax accounting income}}$
4	<i>Long-run cash ETR</i>	$\frac{\text{worldwide cash tax paid}}{\text{worldwide total pre - tax accounting income}}$
5	<i>ETR Differential</i>	<i>Statutory ETR-GAAP ETR</i>
6	DTAX	<i>Error term from the following regression: ETR Differential \times Pre-tax book income = a + b \times Control + e</i>
7	<i>Total BTD</i>	$\text{Pre-tax book income} - ((\text{U.S. CTE} + \text{Fgn CTE})/\text{U.S.STR}) - (\text{NOL}_t - \text{NOL}_{t-1})$
8	<i>Temporary BTD</i>	<i>Deffered tax expense/U.S. STR</i>
9	<i>Abnormal BTD</i>	<i>Residual from $\text{BTD}/\text{TA}_{it} = \beta \text{TA}_{it} + \beta m_i + e_{it}$</i>
10	<i>Unrecognized tax beefits</i>	<i>Disclouse amount post-FIN48</i>
11	<i>Tax shelter activity</i>	<i>Indicator variable for firms accused of engaging in a tax shelter</i>
12	<i>Marginal tax rate</i>	<i>Simulated marginal tax rate</i>

Namun, model pengukuran *tax avoidance* yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Cash Effective Tax Rate* (CETR) yang dikembangkan oleh Dyreng *et al.*, (2010) yaitu pembayaran pajak secara kas atas laba perusahaan sebelum pajak penghasilan. Pembayaran pajak secara kas terdapat dalam laporan arus kas, pada pos pembayaran

pajak penghasilan dari aktivitas operasi, sedangkan laba sebelum pajak terdapat pada laporan laba rugi pada pos laba sebelum pajak penghasilan. CETR baik digunakan untuk menggambarkan kegiatan penghindaran pajak (*tax avoidance*) oleh perusahaan, karena dapat melihat *cash flow* untuk pembayaran pajak.

Rumus untuk mencari *Cash Effective Tax Rate* yaitu:

$$\text{Cash ETR} = \frac{\text{Pembayaran pajak}}{\text{Laba sebelum pajak}}$$

2.1.4 Good Corporate Governance

Good Corporate Governance merupakan prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawaban kepada *shareholder* khususnya, dan *stakeholder* pada umumnya. Hal ini dimaksudkan untuk mengatur kewenangan direktur, manajer, pemegang saham dan pihak lain yang berhubungan dengan perkembangan perusahaan di lingkungan tertentu (Pratiwi *et al.*, 2017).

Menurut *The Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG) dalam Herlambang (2017), *Corporate Governance* merupakan serangkaian mekanisme yang mengarahkan dan mengendalikan suatu perusahaan agar operasional perusahaan berjalan sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan (*stakeholder*).

2.1.4.1 Tujuan *Good Corporate Governance*

Tujuan *Good Corporate Governance* (GCG) secara umum adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan. Tujuan *Good Corporate Governance* menurut *The Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG) adalah sebagai berikut:

1. Meminimalkan *agency cost*

Biaya yang ditanggung oleh pemegang saham timbul sebagai akibat dari pendelegasian wewenang kepada pihak manajemen. Biaya tersebut dapat menjadi kerugian karena manajemen menggunakan biaya pengawasan yang dikeluarkan untuk mencegah terjadinya kecurangan tersebut atau lebih dikenal sebagai *agency cost*. Dengan penyusunan struktur dan pembagian fungsi yang baik, maka biaya ini dapat ditekan serendah mungkin.

2. Meminimalkan *cost of capital* dengan menekan rasio yang dihadapi kreditur.

Perusahaan dengan pengelolaan yang baik akan memberikan nilai positif bagi kreditur, sehingga dapat meminimalkan biaya modal yang ditanggung perusahaan pada saat mengajukan pinjaman.

3. Meningkatkan nilai saham perusahaan.

Perusahaan yang baik akan menarik dan meningkatkan investor untuk menambahkan modalnya.

4. Mengangkat citra perusahaan

Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena akan meningkatkan *shareholder value* dan *dividen*.

2.1.4.2 Prinsip-prinsip Dasar *Good Corporate Governance*

Menurut *Organization Economic Corporation and Development* (OECD) prinsip internasional mengenai *corporate governance* mulai muncul dan berkembang akhir-akhir ini (Pratiwi *et al.*, 2017). Prinsip tersebut mencakup:

1. Hak-hak para pemegang saham, yang harus diberi informasi dengan benar dan tepat waktu mengenai perusahaan, dapat ikut berperan serta dalam pengambilan keputusan mengenai perubahan-perubahan mendasar atas perusahaan, dan turut memperoleh bagian dari keuntungan perusahaan.
2. Perlakuan sama terhadap para pemegang saham, terutama pemegang saham minoritas dan asing, dengan adanya pembagian keterbukaan informasi yang penting serta melarang pembagian untuk pihak sendiri dan perdagangan saham oleh orang lain.
3. Peranan pemegang saham harus diikuti sebagaimana ditetapkan oleh hukum dan kerjasama yang aktif antara perusahaan serta para pemegang kepentingan dalam menciptakan kekayaan, lapangan kerja dan perusahaan yang sehat dari aspek keuangan.
4. Pengungkapan yang akurat dan tepat waktu serta transparansi mengenai semua hal yang penting bagi kinerja perusahaan, kepemilikan, serta para pemegang kepentingan (*stakeholder*).
5. Tanggungjawab pengurus dalam manajemen, pengawasan manajemen serta pertanggungjawaban kepada perusahaan dan pemegang saham.

2.1.4.3 Unsur-unsur *Good Corporate Governance*

Menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) terdapat lima unsur dari *good corporate governance*, yang biasa dikenal dengan konsep TARIF (*Transparency, Accountablity, Responsibility, Independency dan Fairness*).

1. *Transparency* (Keterbukaan)

Transparansi adalah keterbukaan informasi secara akurat dan tepat waktu mengenai kinerja perusahaan. Transparansi berhubungan dengan kualitas informasi yang disampaikan oleh perusahaan. Perusahaan dituntut untuk menyediakan informasi yang jelas, akurat, tepat waktu, dan dapat dibandingkan dengan indikator yang sama. Penyampaian informasi secara terbuka, kredibel, dan tepat waktu akan memudahkan investor untuk menilai kinerja dan risiko yang dihadapi perusahaan.

2. *Accountability* (Akuntabilitas)

Akuntabilitas merupakan suatu bentuk tanggungjawab perusahaan yang diwujudkan dengan menyediakan seluruh perangkat pengawasan secara komprehensif dan siap untuk digugat sesuai dengan peraturan serta regulasi yang berlaku.

3. *Responsibility* (Pertanggungjawaban)

Responsibilitas yaitu sebuah bentuk pertanggungjawaban dari seluruh internal *stakeholders* (Pemilik/RUPS, Komisaris dan Direksi, serta Karyawan) kepada eksternal *stakeholders* lain, termasuk masyarakat melalui:

- a. Membangun lingkungan bisnis yang sehat, menghindari penyalahgunaan wewenang, pengembangan profesionalisme serta menjunjung etika dan budaya setempat.
- b. Menyatakan kepedulian pada permasalahan aktual yang terjadi di masyarakat seperti mengentas kemiskinan, membantu mengurangi jumlah anak putus sekolah, dan kepedulian terhadap dampak bencana alam yang terjadi.

4. *Independency* (Independensi)

Perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak diintervensi oleh pihak lain.

5. *Fairness* (Kewajaran)

Fairness adalah perlakuan yang adil terhadap para pemegang saham, khususnya menyangkut hak dan kewajiban mereka, termasuk bagi pemilik saham minoritas (asing).

2.1.4.4 Mekanisme *Good Corporate Governance* (GCG)

Dalam Fatmawati (2018) menyebutkan terdapat tiga mekanisme *good corporate governance*, yaitu:

1. Dewan Direksi

Board of director atau dewan direksi memiliki fungsi dan peran yang sangat penting dalam perusahaan. Menurut OECD, *Board of Director* memiliki tanggungjawab untuk:

- a. Menyusun strategi dan mengarahkan bisnis perusahaan serta menyusun kebijakan operasi bisnis.
- b. Memonitor kinerja manajemen senior perusahaan dalam mencapai tujuan strategis perusahaan.
- c. Menghasilkan keuntungan yang optimal bagi pemegang saham.
- d. Menjaga keseimbangan semua pihak yang terkait dalam perusahaan, misalnya keseimbangan kepentingan pemegang saham mayoritas, minoritas dan kreditur.

2. Dewan Komisaris

Dewan komisaris dalam fungsinya sebagai pengawas diharapkan dapat meminimalisir permasalahan agensi yang muncul antara dewan direksi dengan pemegang saham.

3. Komite Audit

Menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* mengenai Komite Audit: “Suatu komite yang beranggotakan satu atau lebih anggota dewan komisaris dan dapat meminta halangan luar dengan berbagai keahlian, pengalaman, dan kualitas lain yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan Komite Audit”. Komite audit dituntut untuk bertindak secara independent dan tidak dapat dipisahkan dari moralitas yang melandasi integritasnya. Komite audit merupakan pihak yang menjembatani antara eksternal auditor dengan perusahaan, sekaligus fungsi pengawasan antara dewan komisaris dengan internal auditor.

2.1.5 Karakter Eksekutif

Seseorang atau individu yang memimpin di posisi teratas seperti pimpinan eksekutif atau pimpinan manajer, tentunya memiliki karakter kepemimpinan tertentu dalam memimpin dan membuat keputusan atau kebijakan agar sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan. Karakter eksekutif adalah suatu tindakan yang akan diambil oleh pimpinan perusahaan apabila sedang menghadapi risiko. Keputusan yang diambil oleh pimpinan perusahaan akan mencerminkan tingkat keberaniannya dalam menghadapi risiko. Setiap pimpinan memiliki karakter yang berbeda dalam mengarahkan dan menjalankan kegiatan operasional perusahaannya dalam mencapai tujuan perusahaan (Mangindaan dan Ramadhan, 2017).

Low (2006) dalam Budiman dan Setiyono (2012) menyebutkan bahwa eksekutif memiliki dua karakter, yaitu *risk taker* dan *risk averse*. Eksekutif dengan karakter *risk taker* akan lebih berani dalam mengambil keputusan dan biasanya memiliki dorongan kuat untuk memiliki penghasilan, posisi, kesejahteraan dan kewenangan yang lebih tinggi. Sedangkan eksekutif dengan karakter *risk averse* biasanya cenderung tidak menyukai risiko sehingga kurang berani dalam mengambil keputusan.

2.1.5.1 Pengukuran Karakter Eksekutif

Proksi yang digunakan untuk melihat apakah karakter eksekutif termasuk *risk taker* atau *risk averse* adalah dengan melihat tingkat risiko perusahaan. Paligorova (2010) mengartikan risiko perusahaan (*corporate risk*) merupakan volatilitas *earning* perusahaan, yang bisa diukur dengan rumus deviasi standar. Semakin tinggi tingkat

risiko perusahaan mengindikasikan kecenderungan karakter eksekutif adalah *risk taker*. Sebaliknya jika risiko perusahaan rendah, maka karakter eksekutif adalah *risk averse*. Pengukuran risiko ini dapat menggunakan:

$$\text{Risk} = \frac{\sum_{T-1}^T (E - 1/T \sum_{T-1}^T E)^2}{(T - 1)}$$

Keterangan:

E = EBITDA (*Earning Before Income Tax, Depreciation and Amortization*)

T = Total Asset

2.1.6 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham oleh pihak institusional seperti perusahaan asuransi, perusahaan investasi dan bank. Kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan pengawasan yang lebih besar oleh pihak institusional (Marlinda *et al.*, 2020).

Penelitian Jensen dan Meckling (1976) dalam Mulyani *et al.*, (2018) menyebutkan bahwa kepemilikan institusional memiliki peranan yang sangat penting dalam meminimalisasi konflik keagenan antara manajer dengan pemegang saham. Keberadaan investor konstitusional dianggap dapat meningkatkan mekanisme monitoring yang efektif dalam pengambilan keputusan oleh manajer.

Terdapat hubungan yang melekat antara kepemilikan institusional dengan fungsi pengawasan, karena adanya asumsi bahwa pihak institusi memiliki

kecenderungan mengawasi perilaku manajemen dengan lebih baik dibandingkan investor individual. Kepemilikan institusional memiliki dua *source of power* yang berbeda, yaitu dapat berperan sebagai pendukung tindakan yang dilakukan oleh manajemen jika berkaitan dengan keuntungan perusahaan secara umum, juga dapat menjadi ancaman utama bagi manajemen jika dianggap melakukan tindakan yang merugikan perusahaan namun menguntungkan pribadinya (Krisna, 2019).

Menurut Subagiastra *et al.*, (2016), kepemilikan institusional memiliki dua kelebihan, yaitu:

1. Memiliki profesionalisme dalam menganalisis informasi sehingga dapat menguji keandalan informasi.
2. Memiliki motivasi yang kuat untuk melaksanakan pengawasan lebih ketat atas aktivitas yang terjadi dalam perusahaan.

2.1.6.1 Pengukuran Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional diukur menggunakan jumlah persentase hak suara yang dimiliki institusi atau perusahaan (Mangkusuryo dan Jati, 2017). Indikator yang digunakan adalah jumlah saham yang dimiliki oleh institusi terhadap seluruh saham yang beredar. Rumus pengukuran variabel yaitu:

$$KI = \frac{\text{jumlah saham institusional}}{\text{jumlah saham yang beredar}} \times 100\%$$

2.1.7 Dewan Komisaris

Dewan komisaris adalah wakil dari pemegang saham. Jumlah dewan komisaris merupakan susunan yang terdapat di perusahaan untuk mengawasi pengelolaan perusahaan. Dewan komisaris baik sendiri maupun untuk bersama-sama memiliki hak yang sama terhadap akses informasi perusahaan dalam melakukan tugasnya sebagai dewan pengawas (Permana dan Zulaikha, 2015).

Dalam penelitian Sari (2017) dewan komisaris dapat diartikan sebagai organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi dan memastikan bahwa perusahaan telah melakukan *good corporate governance* (tata kelola perusahaan) dengan baik. Dewan komisaris akan melakukan pengawasan atas tindakan dan keputusan yang dilakukan oleh manajer agar tidak merugikan para pemegang saham (Ratnaningsih dan Maeshelia, 2020).

Menurut Fatmawati (2018) dewan komisaris dapat dilihat dari tiga proksi, yaitu:

1. Pengungkapan jumlah pertemuan dewan komisaris yang dihitung secara numeral, yaitu dilihat dari jumlah pertemuan yang dilakukan oleh dewan komisaris selama tahun berjalan.
2. Jumlah anggota dewan komisaris diukur secara numeral, yaitu dengan melihat jumlah anggota dewan komisaris sebuah perusahaan pada tahun berjalan.
3. Jumlah dewan komisaris independen yang juga diukur secara numeral, dengan melihat jumlah anggota dewan komisaris independen di sebuah perusahaan.

2.1.7.1 Fungsi Dewan Komisaris

Windiarti (2016) menyebutkan beberapa fungsi dewan komisaris sebagai berikut:

1. Dewan komisaris tidak boleh turut serta dalam pengambilan keputusan operasional. Dewan komisaris akan mengambil keputusan terkait hal-hal yang ditetapkan dalam anggaran atau peraturan perundang-undangan, yang dilakukan dalam fungsinya sebagai pengawas, sedangkan keputusan operasional perusahaan akan tetap menjadi tanggungjawab direksi. Kewenangan dewan komisaris tetap pada fungsinya sebagai pengawas dan penasihat.
2. Untuk kepentingan perusahaan, dewan komisaris dapat memberikan sanksi kepada anggota direksi berupa tindakan pemberhentian sementara, dengan ketentuan harus segera ditindaklanjuti dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
3. Jika terjadi kekosongan dalam posisi direksi atau dalam keadaan tertentu sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang dan anggaran dasar, untuk sementara dewan komisaris dapat melakukan fungsi direksi.
4. Dalam melaksanakan fungsinya, dewan komisaris baik secara bersama-sama dan atau sendiri-sendiri berhak mempunyai akses dan memperoleh informasi tentang perusahaan secara tepat waktu dan lengkap.
5. Dewan komisaris harus memiliki tata tertib dan pedoman kerja (*charter*) sehingga pelaksanaan tugasnya terarah dan efektif serta dapat digunakan sebagai salah satu alat penilaian kinerjanya.

6. Dalam fungsinya sebagai pengawas, dewan komisaris akan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengawasan atas pengelolaan perusahaan oleh direksi dalam rangka memperoleh pembebasan dan pelunasan tanggungjawab (*acquit et decharge*) dari RUPS.
7. Dalam melaksanakan tugasnya, dewan komisaris dapat membentuk komite. Usulan dari komite kemudian disampaikan pada dewan komisaris untuk memperoleh keputusan. Bagi perusahaan yang sahamnya tercatat di bursa efek, perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan yang menghimpun dan mengelola dana masyarakat, perusahaan yang produk atau jasanya digunakan masyarakat luas, serta perusahaan yang mempunyai dampak luas terhadap lingkungan, sekurang-kurangnya harus membentuk komite audit, sedangkan komite lain dibentuk sesuai kebutuhan.

2.1.7.2 Tanggungjawab Dewan Komisaris

Dalam Windiarti (2016), dewan komisaris memiliki tiga tanggungjawab yaitu:

1. Dewan komisaris dalam fungsinya sebagai pengawas, akan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengawasan atas pengelolaan perusahaan oleh direksi. Laporan pengawasan dewan komisaris merupakan bagian dari laporan tahunan yang disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk mendapatkan persetujuan.
2. Dengan diberikannya persetujuan atas laporan tahunan dan pengesahan atas laporan keuangan, dapat diartikan bahwa RUPS telah memberikan pembebasan dan

pelunasan tanggungjawab kepada masing-masing anggota dewan komisaris sejauh hal-hal yang tercermin dalam laporan tahunan, dengan tidak mengurangi tanggungjawab masing-masing anggota dewan komisaris dalam hal terjadi tindak pidana atau kesalahan dan atau kelalaian yang menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga yang tidak dapat dipenuhi dengan asset perusahaan.

3. Pertanggungjawaban dewan komisaris terhadap RUPS merupakan perwujudan akuntabilitas pengawasan atas pengelolaan perusahaan dalam rangka pelaksanaan asas *good corporate governance* (GCG).

2.1.7.3 Pengukuran Dewan Komisaris

Dalam Prastit dan Meiranto (2013), pengukuran dewan komisaris diukur dengan melihat jumlah anggota dewan komisaris suatu perusahaan secara numeral.

Berikut merupakan rumus pengukuran dewan komisaris:

$$DK = \text{total anggota dewan komisaris perusahaan}$$

2.2 Penelitian – Penelitian Terdahulu

Untuk memberikan gambaran dan kerangka pemikiran penelitian, maka diperlukan untuk melihat dan membahas hasil penelitian terdahulu sebagai acuan bagi penelitian ini. Berikut beberapa hasil penelitian terdahulu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Oktamawati (2017) dengan judul penelitian “Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, *Leverage*, Pertumbuhan Penjualan dan Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*”. Populasi

dalam penelitian ini adalah laporan keuangan seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2010-2014. Sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling* dan berjumlah sebanyak 660 sampel. Metode analisis penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakter eksekutif berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

2. Penelitian yang dilakukan Pitaloka dan Merkusyawati (2019) dengan judul penelitian “Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, Komite Audit dan Karakter Eksekutif Terhadap *Tax Avoidance*”. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2017. Sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 68 perusahaan. Metode analisis yang digunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakter eksekutif berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Singly dan Sukartha (2015) dengan judul “Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, *Leverage* dan *Sales Growth* Terhadap *Tax Avoidance*”. Populasi penelitian ini yaitu seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2013-2015. Sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling* dan menghasilkan 41 sampel. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakter eksekutif berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Praditasari dan Setiawan (2017) dengan judul “Pengaruh *Good Corporate Governance*, Ukuran Perusahaan, *Leverage*, dan Profitabilitas Terhadap *Tax Avoidance*”. Populasi dalam penelitian ini yaitu perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2011-2015. Sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.
5. Penelitian yang dilakukan oleh Krisna (2019) dengan judul “Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Manajerial pada *Tax Avoidance* dengan Kualitas Audit sebagai Variabel Pemoderasi”. Populasi dalam penelitian ini yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012-2016. Sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*. Metode analisis menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.
6. Penelitian yang dilakukan oleh Charisma dan Susi (2019) dengan judul “Pengaruh Struktur Kepemilikan terhadap Tindakan Pajak dengan Kualitas Audit sebagai Variabel *Moderating*”. Populasi dalam penelitian ini yaitu perusahaan manufaktur yang *listing* di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2017. Sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling* dengan hasil 17 perusahaan. Metode analisis menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

7. Penelitian yang dilakukan oleh Ariawan dan Putu (2017) dengan judul “Pengaruh Dewan Komisaris, Kepemilikan Institusional, Profitabilitas dan *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*”. Populasi penelitian ini yaitu seluruh perusahaan sektor jasa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012-2014. Sampel dalam penelitian menggunakan *purposive sampling*. Metode analisis menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.
8. Penelitian yang dilakukan oleh Widuri et al., (2019) dengan judul “Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2017” . Populasi penelitian ini yaitu sebanyak 238 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2011-2014. Sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*. Metode analisis menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.
9. Penelitian yang dilakukan oleh Merslythalia dan Lasmana (2017) dengan judul “Pengaruh Kompetensi Eksekutif, Ukuran Perusahaan, Komisaris Independen, dan Kepemilikan Institusional terhadap *Tax Avoidance*”. Populasi dalam penelitian ini yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012-2014. Sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*.

Metode analisis menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Tabel 2.2
Penelitian – Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Populasi/Teknik Sampling	Uji Hipotesis	Hasil Penelitian
1	Oktamawati	Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> , Pertumbuhan Penjualan dan Profitabilitas terhadap <i>Tax Avoidance</i> . / 2017	Laporan keuangan seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2010-2014. Sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 660 perusahaan.	Analisis regresi linier berganda.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakter eksekutif berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> .
2	Pitaloka dan Merkusiwati	Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Komite Audit dan Karakter Eksekutif Terhadap <i>Tax Avoidance</i> . / 2019	Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2017. Sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 68 perusahaan.	Analisis regresi linier berganda.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakter eksekutif berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> .

No	Nama Peneliti	Judul/Tahun Penelitian	Populasi/Teknik Sampling	Uji Hipotesis	Hasil Penelitian
3	Swingly dan Sukartha	Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> dan <i>Sales Growth</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i> / 2015	Populasi penelitian ini yaitu seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2013-2015. Sampel dalam penelitian ini menggunakan <i>purposive sampling</i> dan menghasilkan 41 sampel.	Analisis regresi linier berganda.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakter eksekutif berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i>
4	Praditasari dan Setiawan	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> , Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> , dan Profitabilitas Terhadap <i>Tax Avoidance</i> . /2017	Populasi dalam penelitian ini yaitu perusahaan <i>property</i> dan <i>real estate</i> yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2011-2015. Sampel dalam penelitian ini menggunakan <i>purposive sampling</i> .	Analisis regresi linier berganda.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> .
5	Krsna	Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Manajerial terhadap <i>Tax Avoidance</i> dengan	Populasi dalam penelitian ini yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012-2016.	Analisis regresi linier berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> ,

No	Nama Peneliti	Judul/Tahun Penelitian	Populasi/Teknik Sampling	Uji Hipotesis	Hasil Penelitian
		Kualitas Audit sebagai Variabel Pemoderasi. / 2019	Sampel dalam penelitian ini menggunakan <i>purposive sampling</i>		
6	Charisma dan Susi	Pengaruh Struktur Kepemilikan terhadap Tindakan Pajak dengan Kualitas Audit sebagai Variabel Moderating. / 2019	Populasi dalam penelitian ini yaitu perusahaan manufaktur yang <i>listing</i> di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2017. Sampel dalam penelitian ini menggunakan <i>purposive sampling</i> dengan hasil 17 perusahaan.	Analisis regresi linier berganda.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> .
7	Ariawan dan Putu	Pengaruh Dewan Komisaris, Kepemilikan Institusional, Profitabilitas dan <i>Leverage</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i> . / 2017	Populasi penelitian ini yaitu seluruh perusahaan sektor jasa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012-2014. Sampel dalam penelitian menggunakan <i>purposive sampling</i> .	Analisis regresi linier berganda.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> .

No	Nama Peneliti	Judul/Tahun Penelitian	Populasi/Teknik Sampling	Uji Hipotesis	Hasil Penelitian
8	Widuri <i>et al.</i> ,	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan Tercatat di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2017. / 2019	Populasi penelitian ini yaitu sebanyak 238 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2011-2014. Sampel dalam penelitian ini menggunakan <i>purposive sampling</i> .	Analisis regresi linier berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> .
9	Merslythalia dan Lasmana	Pengaruh Kompetensi Eksekutif, Ukuran Perusahaan, Komisaris Independen, dan Kepemilikan Institusional terhadap <i>Tax Avoidance</i> . / 2017	Populasi dalam penelitian ini yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012-2014. Sampel dalam penelitian ini menggunakan <i>purposive sampling</i> .	Analisis regresi linier berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> .

2.3 Kerangka Teoritis

Pada penelitian ini yang menjadi variabel dependen adalah *tax avoidance* yang akan di prediksi oleh variabel *Good Corporate Governance* dengan proksi variabel karakter eksekutif, kepemilikan institusional, dan dewan komisaris. Penulis mengharapkan adanya pengaruh yang signifikan antara variabel karakter eksekutif, kepemilikan institusional dan dewan komisaris terhadap *tax avoidance* pada

perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020.

2.3.1 Hubungan Karakter Eksekutif dengan *Tax Avoidance*

Eksekutif berperan penting dalam pengambilan keputusan dan kebijakan strategis sebuah perusahaan. Keputusan yang diambil saat perusahaan menghadapi risiko mencerminkan bagaimana karakter pemimpin tersebut. Seorang eksekutif atau pemimpin perusahaan dengan karakter *risk taker* akan lebih berani untuk mengambil risiko termasuk dengan melakukan tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Semakin tinggi risiko yang diambil oleh pemimpin *risk taker*, maka semakin besar kemungkinan perusahaan melakukan praktik *tax avoidance*.

2.3.2 Hubungan Kepemilikan Institusional dengan *Tax Avoidance*

Kepemilikan institusional termasuk dalam *good corporate governance* (tata kelola perusahaan) yang merupakan proporsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh investor institusi seperti pemerintah, perusahaan asuransi, perusahaan investasi dan bank. Investor atau pemegang saham dapat disebut juga sebagai pemilik perusahaan yang secara tidak langsung ikut mengawasi dan mengendalikan perusahaan agar berjalan dengan baik.

Semakin tinggi persentase kepemilikan saham institusional, maka semakin kecil kemungkinan manajemen melakukan tindakan penghindaran pajak karena ketatnya pengawasan yang dilakukan oleh pihak institusi. Sebaliknya, semakin rendah

persentase kepemilikan saham institusional maka semakin besar kemungkinan manajemen akan melakukan praktik penghindaran pajak. Hal ini karena kurangnya pengawasan dari pihak luar dalam pelaporan keuangan secara tepat kepada *stakeholder* sehingga memberikan kesempatan bagi pihak manajemen untuk melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

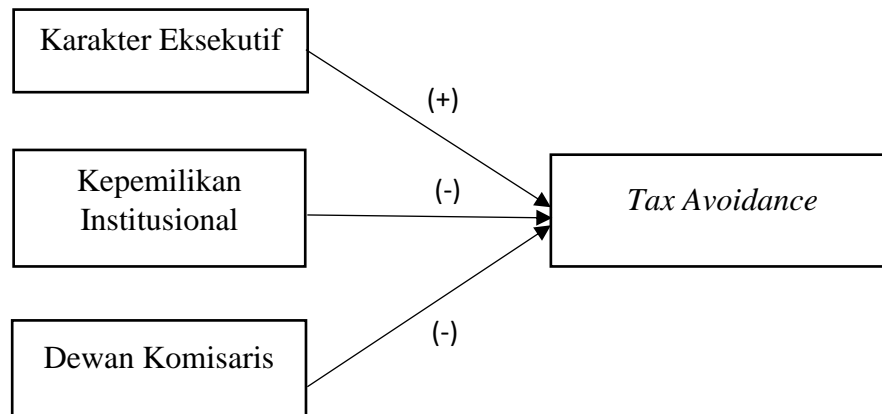
2.3.3 Hubungan Dewan Komisaris dengan *Tax Avoidance*

Dewan komisaris memiliki peranan penting didalam pengendalian internal perusahaan. Dewan komisaris memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengawasi manajemen dalam menjalankan suatu perusahaan. Di sisi lain, dewan komisaris juga memiliki kewenangan untuk memberikan nasihat kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan telah melaksanakan *good corporate governance* (tata kelola perusahaan) dengan baik. Dewan komisaris tidak berkaitan langsung dengan perusahaan, karena memiliki tugas untuk mengawasi direksi perusahaan tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak manapun.

Semakin banyak jumlah anggota dewan komisaris, maka semakin rendah tingkat penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan perusahaan, karena ketatnya pengawasan dan pengendalian internal. Sebaliknya, jika jumlah anggota dewan komisaris di perusahaan sedikit, maka tingkat penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan perusahaan akan tinggi, karena kurangnya pengawasan dan pengendalian internal perusahaan.

2.3 Model Analisis

Mengacu pada kerangka teoritis yang penulis susun dapat dikemukakan model analisis yang tercantum pada gambar berikut:



Gambar 2.1 Model Analisis

2.4 Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan kerangka teoritis, dapat dikemukakan hipotesis penelitian sebagai berikut :

- H1 : Karakter Eksekutif berpengaruh positif signifikan terhadap *Tax Avoidance*.
- H2 : Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif signifikan terhadap *Tax Avoidance*.
- H3 : Dewan Komisaris berpengaruh negatif signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

BAB III

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek penelitian adalah sasaran untuk mendapatkan tujuan tertentu mengenai suatu hal yang akan dibuktikan secara objektif. Menurut Sugiyono (2018:39) objek penelitian merupakan suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulan.

Objek dalam penelitian ini yaitu variabel independen dan variabel dependen. Terdapat tiga variabel independen dalam penelitian ini yaitu karakter eksekutif, kepemilikan institusional, dan dewan komisaris. Serta variabel dependennya yaitu *tax avoidance*.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur dengan sub sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2016-2020 melalui website resminya yaitu www.idx.co.id dan website masing-masing perusahaan. BEI dipilih sebagai tempat penelitian karena merupakan bursa pertama di Indonesia yang dianggap memiliki data lengkap dan telah terorganisasi dengan baik.

3.3 Metode Penelitian

Menurut Sugiyono (2018:02), metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan verifikatif.

Metode deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan untuk menggambarkan variabel mandiri, baik pada satu variabel atau lebih (variabel yang berdiri sendiri) tanpa membuat perbandingan dan mencari variabel itu dengan variabel lain. Sedangkan metode verifikatif merupakan penelitian terhadap populasi atau sampel tertentu dengan tujuan hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2017:07-08).

Dalam penelitian ini, metode deskriptif digunakan untuk menjelaskan karakter eksekutif, kepemilikan institusional dan dewan komisaris terhadap *tax avoidance*. Sedangkan metode verifikatif digunakan untuk menverifikasi penelitian-penelitian terdahulu mengenai pengaruh karakter eksekutif, kepemilikan institusional dan dewan komisaris terhadap *tax avoidance*.

3.3.1 Unit Analisis

Menurut Priyono (2016:51) unit analisis merupakan satuan tertentu yang digunakan sebagai subjek penelitian. Unit analisis dapat dibagi menjadi beberapa seperti individu, kelompok, kategori, organisasi sosial, institusi dan masyarakat.

Dalam penelitian ini, yang menjadi unit analisisnya yaitu laporan keuangan dan laporan tahunan (*annual report*) perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2020.

3.3.2 Populasi dan Sampel

3.3.2.1 Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2018:80).

Populasi dalam penelitian ini yaitu 66 perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2016-2020. Perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi dipilih karena memberikan kontribusi penerimaan pajak sebanyak lebih dari 10% (kemenperin.go.id).

Tabel 3.1
Populasi Penelitian

No	Kode	Nama Perusahaan
SUB SEKTOR MAKANAN DAN MINUMAN		
1	AISA	Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk
2	ALTO	Tri Banyan Tirta Tbk
3	BTEK	Bumi Teknokultura Unggul Tbk
4	BUDI	Budi Starch & Sweetener Tbk
5	CAMP	Campina Ice Cream Industry Tbk
6	CEKA	Wilmar Cahaya Indonesia Tbk (d.h Cahaya Kalbar Tbk)
7	CLEO	Sariguna Primatirta Tbk
8	COCO	Wahana Interfood Nusantara Tbk
9	DLTA	Delta Djakarta Tbk
10	DMND	Diamond Food Indonesia Tbk
11	ENZO	Moreno Abadi Perkasa
12	FOOD	Sentra Food Indonesia Tbk
13	GOOD	Garudafood Putra Putri Jaya Tbk
14	HOKI	Buyung Poetra Sembada Tbk
15	ICBP	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk

No	Kode	Nama Perusahaan
16	IIKP	Inti Agri Resources Tbk
17	IKAN	Era Mandiri Cemerlang Tbk
18	INDF	Indofood Sukses Makmur Tbk
19	KEJU	Mulia Boga Raya Tbk
20	MLBI	Multi Bintang Indonesia Tbk
21	MYOR	Mayora Indah Tbk
22	PANI	Pratama Abadi Nusa Industri Tbk
23	PCAR	Prima Cakrawala Abadi Tbk
24	PSDN	Prashida Aneka Niaga Tbk
25	PSGO	Palma Serasih Tbk
26	ROTI	Nippon Indosari Corporindo Tbk
27	SKBM	Sekar Bumi Tbk
28	SKLT	Sekar Laut Tbk
29	STTP	Siantar Top Tbk
30	TBLA	Tunas Baru Lampung Tbk
31	ULTJ	Ultrajaya Milk Industry and Trading Company Tbk
32	WMUU	Widodo Makmur Unggas Tbk
SUB SEKTOR ROKOK		
1	GGRM	Gudang Garam Tbk
2	HMSP	Handjaya Mandala Sampoerna Tbk
3	ITIC	Indonesian Tobacco Tbk
4	RMBA	Bentoel International Investama Tbk
5	WIIM	Wismilak Inti Makmur Tbk
SUB SEKTOR FARMASI		
1	DVLA	Darya Varia Laboratoria Tbk
2	INAF	Indofarma (Persero) Tbk
3	KAEF	Kimia Farma (Persero) Tbk
4	KLBF	Kalbe Farma Tbk
5	MERK	Merck Indonesia Tbk
6	PEHA	Phapros Tbk
7	PYFA	Pyridam Farma Tbk
8	SCPI	Merck Sharp Dohme Pharma Tbk
9	SIDO	Industri Jamu & Farmasi Sido Muncul Tbk
10	SOHO	Soho Global Health Tbk
11	SQBB	Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk

No	Kode	Nama Perusahaan
12	SQBI	Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk
13	TSPC	Tempo Scan Pasific Tbk
SUB SEKTOR KOSMETIK DAN BARANG KEPERLUAN RUMAH TANGGA		
1	ADES	Akasha Wira International Tbk
2	KINO	Kino Indonesia Tbk
3	KPAS	Cottonindo Ariesta Tbk
4	MBTO	Martina Berto Tbk
5	MRAT	Mustika Ratu Tbk
6	TCID	Mandom Indonesia Tbk
7	UNVR	Unilever Indonesia Tbk
8	VICI	Victoria Care Indonesia Tbk
SUB SEKTOR PERALATAN RUMAH TANGGA		
1	CBMF	Cahaya Bintang Medan Tbk
2	CINT	Chitose International Tbk
3	KICI	Kedaung Indah Can Tbk
4	LMPI	Langgeng Makmur Industry Tbk
5	SOFA	Boston Furniture Industries Tbk
6	WOOD	Integra Indocabinet Tbk
SUB SEKTOR LAINNYA		
1	HRTA	Hartadinata Abadi Tbk
2	TOYS	Sunindo Adipersada Tbk

3.3.2.2 Sampel

Sugiyono (2018:81) menyebutkan bahwa sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Untuk itu, sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif. Pengambilan sampel ini bisa dikarenakan jumlah populasi yang terlalu besar dan peneliti memiliki keterbatasan dalam melakukan penelitian pada semua populasi. Sampel penelitian ini menggunakan

metode *purposive sampling* yaitu pengambilan data berdasarkan kriteria tertentu pada perusahaan.

3.3.3 Teknik Pengambilan Sampel dan Penentuan Ukuran Sampel

Teknik pengambilan sampel disebut juga teknik *sampling*. Untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian, terdapat berbagai teknik *sampling* yang digunakan. Secara skematis, teknik *sampling* di bagi menjadi dua yaitu *probability sampling* dan *non probability sampling* (Sugiyono, 2018:81).

Berdasarkan populasi tersebut diatas teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *non probability sampling* dengan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2018:85).

Adapun kriteria perusahaan yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah:

1. Perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar berturut-turut di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2016-2020.
2. Perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang memiliki kelengkapan informasi mengenai variabel-variabel yang diukur dalam penelitian serta tidak mengalami kerugian selama periode 2016-2020.
3. Perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang menerbitkan laporan tahunan (*annual report*) dan dinyatakan dalam rupiah selama periode 2016-2020.

Tabel 3.2
Teknik Pengambilan Sampel

No	Kode	Kriteria 1	Kriteria 2	Kriteria 3	Keterangan
1	ADES	✓	✓	✓	Memenuhi
2	AISA	✓	×	✓	Tidak Memenuhi
3	ALTO	✓	×	✓	Tidak Memenuhi
4	BTEK	×	×	✓	Tidak Memenuhi
5	BUDI	×	×	✓	Tidak Memenuhi
6	CAMP	×	×	✓	Tidak Memenuhi
7	CBMF	×	×	✓	Tidak Memenuhi
8	CEKA	✓	✓	✓	Memenuhi
9	CINT	✓	✓	✓	Memenuhi
10	CLEO	×	×	✓	Tidak Memenuhi
11	COCO	×	×	✓	Tidak Memenuhi
12	DLTA	✓	✓	✓	Memenuhi
13	DMND	×	×	✓	Tidak Memenuhi
14	DVLA	✓	✓	✓	Memenuhi
15	ENZO	×	×	✓	Tidak Memenuhi
16	FOOD	×	×	✓	Tidak Memenuhi
17	GGRM	✓	✓	✓	Memenuhi
18	GOOD	×	×	✓	Tidak Memenuhi
19	HMSP	✓	✓	✓	Memenuhi
20	HOKI	×	×	✓	Tidak Memenuhi
21	HRTA	×	×	✓	Tidak Memenuhi
22	ICBP	✓	✓	✓	Memenuhi
23	IKP	×	×	✓	Tidak Memenuhi
24	IKAN	×	×	✓	Tidak Memenuhi
25	INAF	✓	×	✓	Tidak Memenuhi
26	INDF	✓	✓	✓	Memenuhi
27	ITIC	×	×	✓	Tidak Memenuhi
28	KAEF	✓	✓	✓	Memenuhi
29	KEJU	×	×	✓	Tidak Memenuhi
30	KICI	✓	×	✓	Tidak Memenuhi

No	Kode	Kriteria	Kriteria	Kriteria	Keterangan
		1	2	3	
31	KINO	✓	✓	✓	Memenuhi
32	KLBF	✓	✓	✓	Memenuhi
33	KPAS	x	x	✓	Tidak Memenuhi
34	LMPI	✓	x	✓	Tidak Memenuhi
35	MBTO	✓	x	✓	Tidak Memenuhi
36	MERK	✓	✓	✓	Memenuhi
37	MLBI	✓	✓	✓	Memenuhi
38	MRAT	✓	x	✓	Tidak Memenuhi
39	MYOR	✓	✓	✓	Memenuhi
40	PANI	x	x	✓	Tidak Memenuhi
41	PCAR	x	x	✓	Tidak Memenuhi
42	PEHA	✓	✓	✓	Memenuhi
43	PSDN	✓	x	✓	Tidak Memenuhi
44	PSGO	x	x	✓	Tidak Memenuhi
45	PYFA	✓	✓	✓	Memenuhi
46	RMBA	✓	x	✓	Tidak Memenuhi
47	ROTI	✓	✓	✓	Memenuhi
48	SCPI	✓	✓	✓	Memenuhi
49	SIDO	✓	✓	✓	Memenuhi
50	SKBM	✓	✓	✓	Memenuhi
51	SKLT	✓	✓	✓	Memenuhi
52	SOFA	x	x	✓	Tidak Memenuhi
53	SOHO	x	x	✓	Tidak Memenuhi
54	SQBB	x	x	✓	Tidak Memenuhi
55	SQBI	x	x	✓	Tidak Memenuhi
56	STTP	✓	✓	✓	Memenuhi
57	TBLA	x	x	✓	Tidak Memenuhi
58	TCID	✓	x	✓	Tidak Memenuhi
59	TOYS	x	x	✓	Tidak Memenuhi
60	TSPC	✓	✓	✓	Memenuhi
61	ULTJ	✓	✓	✓	Memenuhi
62	UNVR	✓	✓	✓	Memenuhi
63	VICI	x	x	✓	Tidak Memenuhi
64	WIIM	✓	✓	✓	Memenuhi

No	Kode	Kriteria 1	Kriteria 2	Kriteria 3	Keterangan
65	WMUU	×	×	✓	Tidak Memenuhi
66	WOOD	×	×	✓	Tidak Memenuhi

Sumber: Bursa Efek Indonesia, data diolah 2022.

Berdasarkan tabel teknik pengambilan sampel menggunakan kriteria yang ditentukan diatas, perusahaan yang akan menjadi sampel dalam penelitian ini berjumlah sebanyak 27 perusahaan. Maka berikut ini merupakan tabel proses pemilihan sampel penelitian:

Tabel 3.3
Proses Pemilihan Sampel Penelitian

No	Kriteria	Jumlah
1	Jumlah populasi perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), selama periode 2016-2020.	66
2	Perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang tidak terdaftar berturut-turut di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan mengalami <i>delisting</i> selama periode 2016-2020.	(29)
3	Perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang tidak memiliki kelengkapan informasi mengenai variabel-variabel yang diukur dalam penelitian serta mengalami kerugian selama periode 2016-2020.	(10)

No	Kriteria	Jumlah
4	Perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang tidak menerbitkan laporan tahunan (<i>annual report</i>) dan dinyatakan dalam rupiah selama periode 2016-2020.	(0)
Jumlah Perusahaan		27
Periode Penelitian		5 tahun
Total Sampel Tahun Penelitian		135

Sampel dalam penelitian ini terdiri dari 27 perusahaan dengan periode penelitian selama 5 tahun, sehingga total unit analisisnya adalah sebanyak 135 unit (27 perusahaan x 5 tahun).

3.3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Secara umum ada empat macam teknik pengumpulan data, yaitu Secara umum ada empat macam teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi/gabungan (Sugiyono, 2018:224-225).

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan sumber data sekunder berupa laporan tahunan dari perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-

2020. Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen (Sugiyono, 2018:225).

3.3.5 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data kuantitatif. Menurut Sugiyono (2018:07) data kuantitatif merupakan data penelitian yang menggunakan angka-angka dan analisis menggunakan statistik.

Sumber data dalam penelitian ini melalui website resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu www.idx.com dan website masing-masing perusahaan yang dimaksudkan agar data yang diperoleh relevan dan dapat dipercaya. Data sekunder yang dimaksud meliputi laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas dan laporan tahunan (*annual report*) perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi periode 2016-2020,

3.3.6 Operasional Variabel

Variabel penelitian merupakan suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2018:39).

3.3.6.1 Variabel Independen

Variabel independen disebut juga sebagai variabel bebas atau tidak terikat. Sugiyono (2018:39) mengemukakan bahwa variabel independen yang sering disebut sebagai variabel *stimulus*, *predictor*, *antecedent* merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat (variabel dependen).

Variabel independen atau variabel bebas dalam penelitian ini adalah karakter eksekutif (X1), kepemilikan institusional (X2) dan dewan komisaris (X3).

1. Karakter Eksekutif

Karakter eksekutif adalah suatu tindakan yang akan diambil oleh pimpinan perusahaan apabila sedang menghadapi risiko. Setiap pimpinan memiliki karakter yang berbeda dalam mengarahkan dan menjalankan kegiatan operasional perusahaannya dalam mencapai tujuan perusahaan (Mangindaan dan Ramadhan, 2017). Pengukuran karakter eksekutif menggunakan risiko perusahaan dengan standar deviasi EBITDA (*Earning Before Income Tax, Depreciation and Amortization*) dibagi total aktiva perusahaan (Paligrova, 2010).

Berikut rumus standar deviasi untuk menghitung karakter eksekutif:

$$Risk = \frac{\sum_{T-1}^T (E - 1/T \sum_{T-1}^T E)^2}{(T - 1)}$$

2. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah jumlah saham beredar yang dimiliki oleh pihak institusi. Kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha pengawasan yang besar oleh pihak institusional (Marlinda *et al.*, 2020). Kepemilikan institusional diukur dari jumlah presentase hak suara yang dimiliki oleh pihak institusi. Berikut rumus menghitung kepemilikan institusional:

$$KI = \frac{\text{Jumlah saham institusional}}{\text{Jumlah saham yang beredar}} \times 100\%$$

3. Dewan Komisaris

Dewan komisaris dapat disebut juga sebagai wakil dari pemegang saham. Jumlah dewan komisaris merupakan susunan yang terdapat di perusahaan untuk mengawasi pengelolaan perusahaan (Permana dan Zulaikha, 2015). Pengukuran dewan komisaris yaitu dengan menjumlahkan anggota dewan komisaris perusahaan secara numeral. Berikut rumus untuk menghitung dewan komisaris:

$$DK = \text{total anggota dewan komisaris}$$

3.3.6.2 Variabel Dependen

Variabel dependen sering disebut sebagai variabel *output*, kriteria, konsekuen atau variabel terikat. Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2018:39).

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *tax avoidance*. Penghindaran pajak atau *tax avoidance* merupakan upaya untuk mengurangi jumlah pajak terutang dengan menggunakan *loopholes* yang terdapat dalam peraturan perpajakan yang berlaku (Praditasari dan Setiawan, 2017).

Pengukuran *tax avoidance* menurut Dyreng *et al.*, menggunakan *Cash Effective Tax Rate* (CETR) perusahaan yaitu membagi jumlah kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dengan laba sebelum pajak.

Berikut merupakan rumus menghitung CETR:

$$\text{Cash ETR} = \frac{\text{Pembayaran pajak}}{\text{Laba sebelum pajak}}$$

Tabel 3.4
Operasionalisasi Variabel Independen dan Dependen

Variabel	Konsep Variabel	Indikator	Skala
Variabel Independen Karakter Eksekutif (X1)	Karakter eksekutif adalah suatu tindakan yang akan diambil oleh pimpinan perusahaan apabila sedang menghadapi risiko (Mangindaan dan Ramadhan, 2017).	Pengukuran karakter eksekutif dalam penelitian ini dapat diukur dari risiko perusahaan. $\text{Risk} = \frac{\sum_{T-1}^T (E - 1/T \sum_{T-1}^T E)2}{(T - 1)}$	Rasio
Variabel Independen Kepemilikan Institusional (X2)	Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham oleh pihak institusional seperti perusahaan asuransi, perusahaan investasi dan bank (Marlinda <i>et al.</i> , 2020).	Pengukuran kepemilikan institusional dalam penelitian ini dapat diukur dari persentase hak suara yang dimiliki institusi atau perusahaan. $\text{KI} = \frac{\text{Jumlah saham institusional}}{\text{Jumlah saham yang beredar}} \times 100\%$	Rasio
Variabel Independen Dewan Komisaris (X3)	Dewan Komisaris sebagai organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi dan memastikan bahwa perusahaan telah melakukan <i>good corporate governance</i> (tata kelola perusahaan) dengan baik (Sari, 2017).	Pengukuran dewan komisaris diukur dengan melihat jumlah anggota dewan komisaris perusahaan secara numeral. $\text{DK} = \text{total anggota dewan komisaris}$	Rasio

Variabel	Konsep Variabel	Indikator	Skala
Variabel Dependen <i>Tax</i> <i>Avoidance</i> (Y)	<i>Tax Avoidance</i> merupakan suatu usaha untuk meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang- undang yang berlaku (Mardiasmo, 2018).	Pengukuran variabel <i>tax</i> <i>avoidance</i> menggunakan CETR (<i>Cash Effective Tax Rate</i>) perusahaan yaitu kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak. Rumus untuk menghitung CETR: Cash ETR = $\frac{\text{Pembayaran pajak}}{\text{Laba sebelum pajak}}$	Rasio

3.3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan (Sugiyono, 2018:147).

3.3.7.1 Analisis Statistik Deskriptif

Menurut Sugiyono (2018:147) menyatakan bahwa statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Analisis statistik

deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini yaitu rata-rata (*mean*), standar deviasi dan nilai minimum serta maksimum.

1. Rata-rata (*mean*)

Rata-rata (*mean*) merupakan teknik penjelasan kelompok yang didasarkan atas nilai rata-rata dari kelompok tersebut. Rata-rata (*mean*) merupakan cara paling umum yang digunakan untuk mengukur nilai sentral suatu distribusi data berdasarkan nilai rata-rata. Rata-rata (*mean*) ini didapatkan dengan menjumlah data seluruh individu dalam kelompok tersebut (Sugiyono, 2018:49). Berikut rumus untuk menghitung rata-rata (*mean*):

$$Me = \sum \frac{xi}{n}$$

Keterangan:

Me = Rata-rata (*mean*)

\sum = *Epsilon* (jumlah)

Xi = Observasi ke-n

n = Jumlah sampel

2. Standar Deviasi

Standar deviasi disebut juga akar varians atau simpanan baku. Varians merupakan jumlah kuadrat semua deviasi nilai-nilai individual terhadap rata-

rata kelompok. Standar deviasi untuk sampel diberi simbol 's'. Standar deviasi dirumuskan menjadi:

$$S = \frac{\sqrt{\sum (x_i - \bar{x})^2}}{(n-1)}$$

Keterangan:

S = Simpangan baku

\sum = Epsilon

X_i = Nilai x ke i sampai ke n

\bar{x} = Rata-rata (*mean*)

n = Jumlah sampel

3. Nilai Maksimum dan Minimum

Nilai maksimum dan minimum adalah nilai terbesar dan terkecil dari fungsi, baik dalam kisaran tertentu (ekstrem local atau relatif) atau di seluruh domain dari fungsi.

3.3.7.2 Uji Asumsi Klasik

Beberapa uji asumsi klasik yang digunakan menurut Ghozali (2016:107-168):

1. Uji Normalitas

Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Jika *p-value* > 0,05 maka data residual tersebut terdistribusi secara normal.

2. Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah didalam model regresi terdapat ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, atau disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Kriteria penerimaan terlihat dari nilai signifikansinya diatas 5% yang berarti tidak mengandung heteroskedastisitas.

3. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menentukan apakah model regresi linier berganda terdapat korelasi antara residual pada periode t dengan residual periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya.

4. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji keberadaan korelasi antara variabel independen dan model regresi. Dalam model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independennya. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel tidak ortogonal. Variabel ortogonal merupakan variabel independen yang di nilai korelasi antar sesama variabel sama dengan 0, Jika nilai *tolerance* $< 0,10$ atau sama dengan nilai VIF > 10 , maka terdapat multikolinearitas yang tidak dapat ditoleransi dan variabel

tersebut harus dikeluarkan dari model regresi agar hasil yang diperoleh tidak bias.

3.3.8 Menghitung Koefisien Korelasi

Menurut Sugiyono (2017:184) analisis korelasi digunakan untuk mengetahui kekuatan hubungan antara korelasi dua variabel dimana variabel lainnya yang dianggap berpengaruh dikendalikan atau dibuat tetap (sebagai variabel kontrol). Karena variabel yang diteliti adalah data interval, maka metode penentuan koefisien korelasi yang digunakan adalah rumus *Pearson Product Moment* sebagai berikut:

$$r_{xy} = \frac{N\sum xy - \sum x(\sum y)}{\sqrt{N\sum x^2 - \sum x^2\{N\sum y^2 - \sum y^2\}}}$$

Dimana:

- r = koefisien korelasi
- n = banyaknya sampel
- x = nilai variabel x
- y = nilai variabel y

Nilai koefisien korelasi akan terdapat dalam baris $-1 \leq r \leq +1$ yang akan menghasilkan kemungkinan sebagai berikut:

1. Bila $r = 0$ atau mendekati 0, maka korelasi antar kedua variabel sangat lemah atau tidak terdapat hubungan antara variabel X terhadap variabel Y.

2. Bila $r = +1$ atau mendekati $+1$, maka korelasi antar kedua variabel adalah kuat dan searah, dan dinyatakan positif.
3. Bila $r = -1$ atau mendekati -1 , maka korelasi antar kedua variabel adalah kuat dan berlawanan arah, dan dinyatakan negatif.

Nilai korelasi yang diperoleh dapat diinterpretasikan dengan berpedoman pada tabel berikut:

Tabel 3.5
Interpretasi Nilai Koefisien Korelasi

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0.000 – 0.199	Sangat Rendah
0.200 – 0.399	Rendah
0.400 – 0.599	Sedang
0.600 – 0.799	Kuat
0.800 – 1.000	Sangat Kuat

Sumber: Sugiyono (2017:184)

3.3.9 Pengujian Hipotesis

Uji hipotesis dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen dengan proksi karakter eksekutif, kepemilikan institusional dan dewan komisaris berpengaruh baik secara parsial maupun simultan terhadap variabel dependen yaitu *tax avoidance*.

Menurut Sugiyono (2018:159), hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Kebenaran dari hipotesis harus dibuktikan melalui data yang terkumpul.

3.3.9.1 Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Uji analisis yang digunakan dalam penelitian ini merupakan analisis regresi linier berganda. Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menguji pengaruh beberapa variabel independen terhadap variabel dependen dengan skala pengukuran dalam suatu persamaan linier. Menurut Sugiyono (2018:183) analisis regresi digunakan oleh peneliti bila bermaksud meramalkan bagaimana keadaan (naik turun) variabel dependen (kriterium), bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor *predictor* dimanipulasi (di naik turunkan nilainya).

Dalam penelitian ini analisis regresi linier berganda digunakan untuk memprediksi pengaruh antara karakteristik *corporate governance* yang di proksikan dengan karakter eksekutif, kepemilikan institusional dan dewan komisaris terhadap *tax avoidance*. persamaan model regresi adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \epsilon$$

Keterangan:

Y = *Tax Avoidance* (CETR)

α = Konstanta

β = Koefisien Regresi

X_1 = Karakter Eksekutif

X_2 = Kepemilikan Institusional

X_3 = Dewan Komisaris

ϵ = *Error*

Arti koefisien β menunjukkan hubungan searah antara variabel bebas dengan variabel terikat jika bernilai positif (+). Dengan kata lain, peningkatan atau penurunan besarnya variabel bebas akan diikuti oleh peningkatan atau penurunan besarnya variabel terikat. Sedangkan jika nilai β negatif (-), menunjukkan hubungan yang berlawananan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Dengan kata lain, setiap peningkatan besarnya nilai variabel bebas akan diikuti oleh penurunan besarnya variabel terikat dan sebaliknya.

3.3.9.2 Uji Statistik (F)

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel independen secara bersama-sama (simultan) dapat berpengaruh terhadap variabel dependen. Pengujian terhadap pengaruh variabel independen secara bersama-sama (simultan) terhadap perubahan nilai variabel dependen dilakukan melalui pengujian terhadap variasi nilai variabel dependen yang dapat dijelaskan (*explained*) oleh semua nilai variabel independen (Algifari, 2015:80).

Menurut Ghozali (2016:96) prosedur yang dapat digunakan adalah sebagai berikut:

1. Dalam penelitian ini digunakan tingkat signifikansi 0,05 dengan derajat bebas (n-k), dimana n: jumlah pengamatan dan k: jumlah variabel
2. Kriteria keputusan:
 - a. Uji kecocokan model ditolak jika $\alpha > 0,05$
 - b. Uji kecocokan model diterima jika $\alpha < 0,05$.

3.3.9.2 Uji Statistik (t)

Ghozali (2016:99) menyatakan bahwa uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Hipotesis nol (H_0) tidak terdapat pengaruh yang signifikan dan hipotesis alternatif (H_a) menunjukkan adanya pengaruh antara variabel independen dan variabel dependen. Dalam penelitian ini pengujian parsial dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menentukan hipotesis parsial antara variabel independen terhadap variabel dependen. Adapun hipotesis statistik yang akan di uji dalam penelitian ini adalah:

$H_0 : \beta_1 = 0$, Karakter Eksekutif tidak berpengaruh positif signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

$H_a : \beta_1 > 0$, Karakter Eksekutif berpengaruh positif signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

$H_0 : \beta_2 = 0$, Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh positif signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

$H_a : \beta_2 < 0$, Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

$H_0 : \beta_3 = 0$, Dewan Komisaris tidak berpengaruh positif signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

$H_a : \beta_3 < 0$, Dewan Komisaris berpengaruh negatif signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

3.3.9.4 Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (r^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah nol dan satu. Nilai r^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen (Ghozali, 2016:97).

Koefisien determinasi dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$Kd = r^2 \times 100\%$$

Keterangan:

Kd = Koefisien determinasi

r^2 = Koefisien korelasi

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar secara berturut-turut di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2020. Subjek penelitian adalah laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan yang diambil langsung dari website resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu www.idx.co.id serta website masing-masing perusahaan.

Pemilihan sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan metode pengambilan sampel yang digunakan yaitu *non probability sampling* dengan teknik *purposive sampling* atau pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu karena objek yang diteliti memiliki cakupan sumber data yang luas. Berdasarkan populasi tersebut, penelitian ini menghasilkan 27 sampel perusahaan sehingga jumlah data yang akan diteliti adalah sebanyak 135 data (27 perusahaan \times 5 tahun).

Tabel 4.1
Kriteria *Purposive Sampling*

No	Kriteria	Jumlah
1	Jumlah populasi perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), selama periode 2016-2020.	66
2	Perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang tidak terdaftar berturut-turut di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan mengalami <i>delisting</i> selama periode 2016-2020.	(29)
3	Perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang tidak memiliki kelengkapan informasi mengenai variabel-variabel yang diukur dalam penelitian serta mengalami kerugian selama periode 2016-2020.	(10)
4	Perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang tidak menerbitkan laporan tahunan (<i>annual report</i>) dan dinyatakan dalam rupiah selama periode 2016-2020.	(0)
Jumlah Perusahaan yang Memenuhi Kriteria		27
Periode Penelitian		5 tahun
Total Sampel Tahun Penelitian		135

Tabel 4.2**Daftar Sampel Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Industri Barang Konsumsi**

No	Kode	Nama Perusahaan
1	ADES	Akasha Wira International Tbk
2	CEKA	Wilmar Cahaya Indonesia Tbk
3	CINT	Chitose International Tbk
4	DLTA	Delta Djakarta Tbk
5	DVLA	Darya Varia Laboratoria Tbk
6	GGRM	Gudang Garam Tbk
7	HMSP	Handjaya Mandala Sampoerna Tbk
8	ICBP	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
9	INDF	Indofood Sukses Makmur Tbk
10	KLBF	Kalbe Farma Tbk
11	KINO	Kino Indonesia Tbk
12	MYOR	Mayora Indah Tbk
13	PEHA	Phapros Tbk
14	PYFA	Pyridam Farma Tbk
15	ROTI	Nippon Indosari Corporindo Tbk
16	SCPI	Merck Sharp Dohme Pharma Tbk
17	SIDO	Industri Jamu & Farmasi Sido Muncul Tbk
18	SKBM	Sekar Bumi Tbk
19	SKLT	Sekar Laut Tbk
20	STTP	Siantar Top Tbk
21	TSPC	Tempo Scan Pasific Tbk
22	ULTJ	Ultrajaya Milk Industry and Trading Company Tbk
23	UNVR	Unilever Indonesia Tbk
24	WIIM	Wismilak Inti Makmur Tbk

Setelah dilakukan pengolahan data, terdapat 3 perusahaan yang memiliki data outlier. Peneliti memilih untuk mengeluarkan dan tidak mengolah kembali data perusahaan tersebut, karena jika tetap diolah dikhawatirkan akan merusak hasil rata-rata keseluruhan data. Sehingga didapat sampel akhir sebanyak 24 perusahaan dengan

sampel amatan sebanyak 120. Berikut ini merupakan daftar perusahaan yang memiliki data *outlier*:

Tabel 4.3
Perusahaan yang Memiliki Data *Outlier*

No	Kode	Nama Perusahaan
1	KAEF	Kimia Farma Tbk
2	MERCK	Merk Indonesia Tbk
3	MLBI	Multi Bintang Indonesia Tbk

4.1.2 Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif merupakan penggambaran data penelitian dengan menggunakan nilai maksimum, nilai minimum, rata-rata (*mean*), dan standar deviasi dari setiap variabel.

Dalam penelitian ini, data sekunder diambil melalui website resmi Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id dan website resmi masing-masing perusahaan. Data statistik yang digunakan dalam penelitian ini merupakan statistik deskriptif yang berhubungan dengan pengumpulan dan penyajian serta peringkasan data.

Berdasarkan data yang telah diperoleh dari laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, berikut tabel perhitungan nilai maksimum, nilai minimum, rata-rata (*mean*) dan standar deviasi dari masing-masing variabel.

4.1.2.1 Karakter Eksekutif

Tabel 4.4
Karater Eksekutif

No	Kode	Karakter Eksekutif					Mean
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	ADES	0.103	0.080	0.092	0.139	0.162	0.115
2	CEKA	0.239	0.133	0.138	0.214	0.148	0.174
3	CINT	0.171	0.168	0.156	0.153	0.165	0.162
4	DLTA	0.273	0.276	0.290	0.290	0.135	0.253
5	DVLA	0.126	0.132	0.128	0.165	0.111	0.132
6	GGRM	0.163	0.168	0.165	0.187	0.131	0.163
7	HMSP	0.390	0.394	0.385	0.361	0.232	0.352
8	ICBP	0.194	0.191	0.217	0.222	0.103	0.186
9	INDF	0.133	0.130	0.126	0.136	0.101	0.125
10	KINO	0.110	0.072	0.067	0.151	0.062	0.092
11	KLBF	0.206	0.197	0.185	0.169	0.155	0.182
12	MYOR	0.395	0.397	0.380	0.399	0.419	0.398
13	PEHA	0.136	0.145	0.104	0.062	0.033	0.096
14	PYFA	0.515	0.603	0.546	0.567	0.546	0.555
15	ROTI	0.130	0.040	0.034	0.062	0.045	0.062
16	SCPI	0.153	0.143	0.113	0.136	0.165	0.142
17	SIDO	0.206	0.216	0.256	0.292	0.306	0.255
18	SKBM	0.140	0.108	0.114	0.127	0.155	0.129
19	SKLT	0.262	0.264	0.266	0.301	0.346	0.288
20	STTP	0.341	0.402	0.402	0.220	0.238	0.320
21	TSPC	0.254	0.243	0.243	0.254	0.290	0.257
22	ULTJ	0.228	0.204	0.179	0.199	0.167	0.195
23	UNVR	0.553	0.537	0.658	0.545	0.514	0.561
24	WIIM	0.314	0.316	0.367	0.368	0.437	0.360
Min		0.103	0.040	0.034	0.062	0.033	0.062
Max		0,553	0,603	0.658	0.567	0.546	0.561
Mean		0.239	0.232	0.234	0.238	0.215	0.231
Std. Deviasi		0.192	0.219	0.218	0.143	0.142	0.161

Berdasarkan tabel 4.4 tersebut diatas, perusahaan yang memiliki nilai minimum karakter eksekutif pada tahun 2016 adalah PT Akasha Wira International Tbk (ADES) dengan nilai sebesar 0,103. Pada tahun 2017-2019 nilai minimum karakter eksekutif secara berturut-turut dialami oleh PT Nippon Indosari Corporindo Tbk (ROTI) dengan nilai sebesar 0,040, 0,034 dan 0,062. Kemudian di tahun 2020, perusahaan yang memiliki nilai minimum karakter eksekutif adalah PT Phapros Tbk (PEHA) dengan nilai sebesar 0,033.

Sedangkan nilai maksimum karakter eksekutif, secara berturut-turut pada tahun 2016 dialami oleh PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR) dengan nilai sebesar 0,553. Pada tahun 2017, nilai maksimum karakter eksekutif dialami oleh PT Pyridam Farma Tbk (PYFA) sebesar 0,603. Tahun 2018, PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR) kembali memiliki nilai maksimum karakter eksekutif sebesar 0,658. Kemudian berturut-turut pada tahun 2019-2020, perusahaan yang memiliki nilai maksimum karakter eksekutif adalah PT Pyridam Farma Tbk (PYFA) dengan nilai sebesar 0,567 dan 0,546.

Nilai rata-rata (*mean*) tertinggi karakter eksekutif selama periode 2016-2020 terjadi pada tahun 2016 dengan nilai sebesar 0,239. Sedangkan nilai rata-rata (*mean*) terendah karakter eksekutif selama periode 2016-2020 terjadi pada tahun 2020 dengan nilai sebesar 0,215.

4.1.2.2 Kepemilikan Institusional

Tabel 4.5
Kepemilikan Institusional

No	Kode	Kepemilikan Institusional					Mean
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	ADES	1,027	0,944	0,944	0,944	0,944	0.961
2	CEKA	0,870	0,870	0,870	0,870	0,870	0.870
3	CINT	0,678	0,678	0,719	0,947	0,947	0.794
4	DLTA	0,968	0,817	0,966	0,965	0,962	0.936
5	DVLA	0,921	0,943	0,937	0,936	0,936	0.935
6	GGRM	0,951	0,952	0,975	0,962	0,937	0.955
7	HMSP	0,988	0,989	0,988	0,979	0,962	0.981
8	ICBP	0,805	0,805	0,805	0,805	0,805	0.805
9	INDF	0,501	0,501	0,501	0,501	0,501	0.501
10	KLBF	0,978	0,568	0,570	0,570	0,932	0.723
11	KINO	0,877	0,879	0,874	0,883	0,859	0.875
12	MYOR	0,591	0,591	0,591	0,591	0,591	0.591
13	PEHA	0,568	0,568	0,568	0,568	0,568	0.568
14	PYFA	0,538	0,538	0,538	0,538	0,693	0.569
15	ROTI	0,694	0,731	0,731	0,992	0,992	0.828
16	SCPI	0,989	0,989	0,989	0,989	0,989	0.989
17	SIDO	0,810	0,810	0,810	0,964	0,951	0.869
18	SKBM	0,806	0,828	0,828	0,828	0,828	0.824
19	SKLT	0,977	0,841	0,841	0,977	0,844	0.896
20	STTP	0,568	0,568	0,568	0,635	0,635	0.595
21	TSPC	0,784	0,784	0,852	0,852	0,976	0.850
22	ULTJ	0,371	0,369	0,363	0,364	0,204	0.334
23	UNVR	0,989	0,990	0,942	0,988	0,983	0.978
24	WIIM	0,441	0,381	0,381	0,381	0,373	0.391
	Min	0,371	0,369	0,363	0,364	0,204	0.334
	Max	1,027	0,990	0,989	0,992	0,992	0.989
	Mean	0,779	0,747	0,756	0,793	0,803	0.776
	Standar Deviasi	0,202	0,194	0,198	0,206	0,217	0.203

Berdasarkan tabel 4.5 diatas, nilai minimum kepemilikan institusional secara berturut-turut pada tahun 2016-2020 dialami oleh PT Ultrajaya Milk Industry and Trading Company Tbk (ULTJ) sebesar 0,371, 0,369, 0,363, 0,364, dan 0,204. Sedangkan untuk nilai maksimum kepemilikan institusional di tahun 2016 dialami oleh PT Akasha Wira International Tbk (ADES) dengan nilai sebesar 1,027. Pada tahun 2017, nilai maksimum kepemilikan institusional dialami oleh PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR) sebesar 0,990. Sedangkan di tahun 2018 terdapat perusahaan yang memiliki nilai maksimum kepemilikan institusional yaitu PT Merck Sharp Dohme Pharma Tbk (SCPI) sebesar 0,989. Kemudian berturut-turut di tahun 2019-2020, PT Nippon Indosari Corporindo Tbk memiliki nilai maksimum kepemilikan institusional sebesar nilai maksimum 0,992, dan 0,992.

Nilai rata-rata (*mean*) tertinggi kepemilikan institusional perusahaan selama periode 2016-2020 terjadi pada tahun 2020 dengan nilai sebesar 0,803. Sedangkan nilai rata-rata (*mean*) terendah kepemilikan institusional perusahaan selama periode 2016-2020 terjadi pada tahun 2017 dengan nilai sebesar 0,747.

4.1.2.3 Dewan Komisaris

Tabel 4.6
Dewan Komisaris

No	Kode	Dewan Komisaris					Mean
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	ADES	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
2	CEKA	4.00	4.00	4.00	4.00	3.00	3.80
3	CINT	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	2.20
4	DLTA	3.00	3.00	3.00	3.00	5.00	3.40
5	DVLA	7.00	7.00	7.00	8.00	8.00	7.40
6	GGRM	9.00	9.00	10.00	7.00	4.00	7.80
7	HMSP	7.00	7.00	7.00	7.00	4.00	6.40
8	ICBP	3.00	3.00	3.00	3.00	6.00	3.60
9	INDF	3.00	3.00	3.00	3.00	8.00	4,00
10	KLBF	5.00	5.00	5.00	5.00	7.00	5.40
11	KINO	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	3.20
12	MYOR	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
13	PEHA	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
14	PYFA	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
15	ROTI	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
16	SCPI	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
17	SIDO	3.00	3.00	5.00	5.00	6.00	4.40
18	SKBM	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
19	SKLT	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
20	STTP	2.00	2,00	2.00	2.00	2.00	2.00
21	TSPC	6.00	5.00	3.00	5.00	5.00	4.80
22	ULTJ	3.00	3.00	3.00	4.00	4.00	3.40
23	UNVR	5.00	5.00	5.00	5.00	6.00	5.20
24	WIIM	3.00	3.00	3.00	3.00	300	3.00
Min		2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
Max		9.00	9.00	10.00	8.00	8.00	7.80
Mean		4.000	3,958	4.000	4.042	4.417	4.083
Std. Deviasi		1.745	1.706	1.842	1.574	1.666	1.498

Berdasarkan tabel 4.6 diatas, nilai maksimum dewan komisaris secara berturut-turut pada tahun 2016-2018 dialami oleh PT Gudang Garam Tbk (GGRM) dengan nilai sebesar 9,00, 9,00, dan 10,00. Pada 2019, nilai maksimum dewan komisaris dialami oleh PT Darya Varia Laboratoria Tbk (DVLA) dengan nilai sebesar 8,00. Serta di tahun 2020, nilai maksimum dewan komisaris dialami oleh PT Darya Varia Laboratoria Tbk dan PT Indofood Sukses Makmur Tbk dengan nilai sebesar 8,00.

Sedangkan nilai minimum dewan komisaris secara keseluruhan dan berturut-turut pada tahun 2016-2020 dialami oleh PT Siantar Top Tbk (STTP) dengan nilai sebesar 2,00.

Nilai rata-rata (*mean*) tertinggi dewan komisaris perusahaan selama periode 2016-2020 terjadi pada tahun 2020 dengan nilai sebesar 4,417. Sedangkan nilai rata-rata (*mean*) terendah dewan komisaris perusahaan selama periode 2016-2020 terjadi pada tahun 2017 dengan nilai sebesar 3,958.

4.1.2.4 Tax Avoidance

Tabel 4.7
Tax Avoidance

No	Kode	Tax Avoidance					Mean
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	ADES	0.112	0.124	0.087	0.144	0.114	0.116
2	CEKA	0.251	0.340	0.113	0.179	0.294	0.235
3	CINT	0.344	0.249	0.461	0.418	0.885	0.472
4	DLTA	0.261	0.259	0.214	0.212	0.364	0.262
5	DVLA	0.190	0.237	0.280	0.265	0.271	0.249
6	GGRM	0.269	0.253	0.276	0.221	0.233	0.251
7	HMSP	0.225	0.257	0.246	0.254	0.264	0.249
8	ICBP	0.307	0.358	0.311	0.217	0.169	0.272
9	INDF	0.363	0.447	0.465	0.270	0.224	0.354
10	KLBF	0.243	0.241	0.253	0.247	0.166	0.230
11	KINO	0.409	0.386	0.172	0.171	0.557	0.339
12	MYOR	0.290	0.271	0.304	0.203	0.30	0.260
13	PEHA	0.271	0.261	0.341	0.208	0.241	0.264
14	PYFA	0.322	0.218	0.262	0.251	0.145	0.240
15	ROTI	0.273	0.264	0.109	0.159	0.192	0.199
16	SCPI	0.353	0.390	0.296	0.444	0.157	0.328
17	SIDO	0.216	0.216	0.383	0.207	0.204	0.245
18	SKBM	0.412	0.432	0.520	0.959	0.854	0.902
19	SKLT	0.319	0.301	0.170	0.258	0.167	0.243
20	STTP	0.208	0.269	0.286	0.153	0.150	0.213
21	TSPC	0.649	0.724	0.723	0.764	0.490	0.670
22	ULTJ	0.271	0.338	0.308	0.203	0.226	0.269
23	UNVR	0.241	0.257	0.193	0.315	0.184	0.238
24	WIIM	0.332	0.581	0.255	0.349	0.066	0.317
	Min	0.112	0.124	0.087	0.144	0.066	0.107
	Max	0.649	0.724	0.723	0.959	0.885	0.788
	Mean	0.297	0.320	0.293	0.295	0.285	0.298
	Std. Deviasi	0.102	0.128	0.143	0.192	0.211	0.155

Berdasarkan tabel 4.7 diatas, perusahaan yang memiliki nilai minimum CETR berturut-turut pada tahun 2016-2019 yaitu PT Akasha Wira International Tbk (ADES) dengan nilai sebesar 0,112, 0,124, 0,087, dan 0,144. Sedangkan di tahun 2020, nilai minimum CETR dialami oleh PT Wismilak Inti Makmur Tbk (WIIM) dengan nilai sebesar 0,066.

Sedangkan perusahaan yang memiliki nilai maksimum CETR secara berturut-turut di tahun 2016-2018 adalah PT Tempo Scan Pasific Tbk (TSPC) dengan nilai sebesar 0,649, 0,724, dan 0,723. Kemudian di tahun 2019 perusahaan dengan nilai maksimum CETR dialami oleh PT Sekar Bumi Tbk (SKBM) dengan nilai sebesar 0,959. Serta di tahun 2020, nilai maksimum CETR dialami oleh PT Chitose International Tbk (CINT) dengan nilai sebesar 0,885.

Nilai rata-rata (*mean*) tertinggi *tax avoidance* perusahaan yang diukur menggunakan proksi CETR selama periode 2016-2020 terjadi pada tahun 2017 dengan nilai sebesar 0,320. Sedangkan nilai rata-rata (*mean*) terendah *tax avoidance* perusahaan selama periode 2016-2020 terjadi pada tahun 2020 dengan nilai sebesar 0,285.

4.1.2.5 Rata-rata dan Standar Deviasi

Dalam penelitian ini, statistik deskriptif digunakan untuk menunjukkan data yang digunakan dalam penelitian serta dapat menunjukkan nilai rata-rata dan standar deviasi dari masing-masing variabel penelitian. Hasil statistik deskriptif dari masing-masing variabel penelitian adalah sebagai berikut:

Tabel 4.8
Hasil Analisis Deskriptif

Descriptive Statistics			
	Mean	Std. Deviation	N
TA (CETR)	.29850	.157880	120
KE	.23158	.138507	120
KI	.77573	.202181	120
DK	4.0833	1.68824	120

Sumber: Data Output SPSS, 2022

Berdasarkan uji statistik deskriptif yang ditunjukkan pada tabel 4.8 diatas diketahui bahwa jumlah sampel (n) adalah sebanyak 120 sampel amatan dengan periode pengamatan selama 5 tahun. Berikut merupakan penjelasan mengenai hasil analisis statistik deskriptif tersebut:

1. Variabel *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang diteliti memiliki nilai rata-rata 0,29850 dan standar deviasi sebesar 0,157880.

2. Variabel karakter eksekutif pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang diteliti memiliki nilai rata-rata sebesar 0,23158 dan standar deviasi sebesar 0,138507.
3. Variabel kepemilikan institusional perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang diteliti memiliki nilai rata-rata sebesar 0,77573 dan standar deviasi sebesar 0,202181.
4. Variabel dewan komisaris perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang diteliti memiliki nilai rata-rata sebesar 4,0833 dan standar deviasi sebesar 1.68824.

4.1.2.6 Analisis Korelasi

Analisis korelasi merupakan nilai yang menunjukkan keeratan hubungan yang terjadi antara variabel independen dengan variabel dependen untuk memberikan interpretasi pada koefisien korelasi yang diperoleh. Dalam penelitian ini, analisis korelasi digunakan untuk mengetahui hubungan antara karakter eksekutif, kepemilikan institusional dan dewan komisaris terhadap *tax avoidance*.

Hasil perhitungan korelasi untuk menunjukkan hubungan antar variabel penelitian adalah sebagai berikut:

Tabel 4.9
Hasil Uji Analisis Korelasi

Correlations					
		KE	KI	DK	TA (CETR)
KE	Pearson Correlation	1	-.141	.109	-.111
	Sig. (2-tailed)		.125	.237	.229
	N	120	120	120	120
KI	Pearson Correlation	-.141	1	.107	-.063
	Sig. (2-tailed)	.125		.243	.493
	N	120	120	120	120
DK	Pearson Correlation	.109	.107	1	-.097
	Sig. (2-tailed)	.237	.243		.290
	N	120	120	120	120
TA (CETR)	Pearson Correlation	-.111	-.063	-.097	1
	Sig. (2-tailed)	.229	.493	.290	
	N	120	120	120	120

Berdasarkan hasil pengolahan data tabel 4.9 diatas, didapatkan hasil koefisien korelasi antara variabel karakter eksekutif, kepemilikan institusional, dewan komisaris dan *tax avoidance* (penghindaran pajak), yaitu sebagai berikut:

1. Besar korelasi antara variabel karakter eksekutif (KE) dengan *tax avoidance* (TA/CETR) adalah sebesar -0,111 dan nilai signifikan sebesar 0,229. Angka signifikansi tersebut menunjukkan $0,229 > 0,05$, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa karakter eksekutif memiliki korelasi yang sangat rendah terhadap *tax avoidance*.

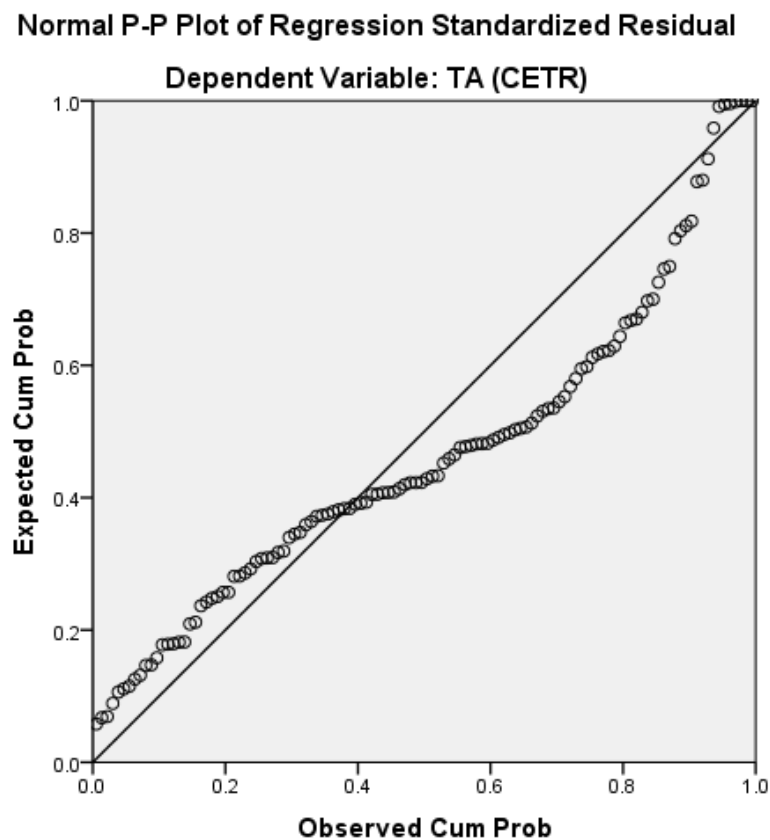
2. Besar korelasi antara variabel kepemilikan institusional (KI) dengan *tax avoidance* (TA/CETR) adalah sebesar -0,063 dan nilai signifikan sebesar 0,493. Angka signifikansi tersebut menunjukkan $-0,063 > 0,05$, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional memiliki korelasi yang sangat rendah terhadap *tax avoidance*.
3. Besar korelasi antara variabel dewan komisaris (DK) dengan *tax avoidance* (TA/CETR) adalah sebesar -0,097 dan nilai signifikan sebesar 0,290. Angka signifikansi tersebut menunjukkan $-0,097 > 0,05$, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dewan komisaris memiliki korelasi yang sangat rendah terhadap *tax avoidance*.

4.2 Uji Asumsi Klasik

Analisis regresi berganda mengharuskan untuk mencari keabsahannya, sehingga penelitian ini menggunakan akan di menggunakan uji asumsi klasik terlebih dahulu. Uji ini digunakan untuk memenuhi prasyarat dalam melakukan uji analisis regresi berganda. Uji asumsi klasik digunakan untuk menguji kelayakan model regresi. Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi dan uji multikolinearitas.

4.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan model Probability-Plot. Menurut Imam Ghozali (2011:161), model regresi dikatakan berdistribusi normal jika data *ploting* (titik-titik) yang menggambarkan data sesungguhnya mengikuti garis diagonal.

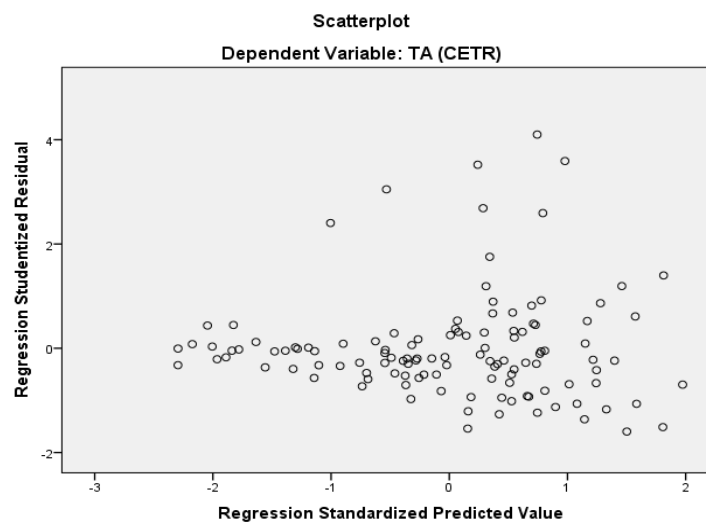


Gambar 4.1
Grafik Uji Normalitas P-Plot

Berdasarkan Gambar 4.1 diatas terlihat bahwa titik menyebar disekitar garis dan mengikuti garis secara diagonal, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi memiliki distribusi normal.

4.2.2 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari satu pengamatan ke pengamatan lain (heteroskedastisitas). Model regresi dikatakan baik apabila tidak terjadi heteroskedastisitas. Dalam penelitian ini, uji heteroskedastisitas dilakukan dengan metode scatterplot dengan memplotkan nilai ZPRED (nilai prediksi) dengan SRESID (nilai residual). Jika titik dalam gambar menyebar, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.



Gambar 4.2
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan gambar 4.2 diatas, dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar secara acak dan tersebar diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas model dalam regresi.

4.2.3 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah terdapat korelasi antara variabel independen dengan model regresi. Model regresi dikatakan baik apabila tidak terjadi korelasi antara variabel atau dengan kata lain tidak mengalami multikolinearitas. Menurut Imam Ghozali (2011:107-100) tidak terjadi gejala multikolinearitas jika nilai *Tolerance* > 0,10 dan nilai VIF < 10,00.

Tabel 4.10
Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	.401	.071		5.675	.000		
	KE	-.128	.106	-.112	-1.201	.232	.965	1.037
	KI	-.055	.073	-.071	-.757	.450	.965	1.036
	DK	-.007	.009	-.078	-.835	.405	.973	1.028

a. Dependent Variable: TA (CETR)

Berdasarkan hasil pengujian multikolinearitas diatas menunjukkan bahwa nilai *tolerance* semua variabel independen $> 0,10$ yaitu 0,965 untuk variabel karakter eksekutif dan kepemilikan institusional, serta 0,973 untuk variabel dewan komisaris. Hasil perhitungan nilai *Variance Inflation Factor (VIF)* menunjukkan bahwa nilai VIF semua variabel $< 10,00$ yaitu 1,037 untuk variabel karakter eksekutif, 1,036 untuk variabel kepemilikan institusional dan 1,028 untuk variabel dewan komisaris. Hasil ini menunjukkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas dalam penelitian ini.

4.2.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier terdapat korelasi antara kesalahan residual pada periode t dengan kesalahan residual periode $t-1$ (sebelumnya).

Model regresi dapat dikatakan baik jika tidak terjadi autokorelasi. Pengujian Durbin-Watson (*DW test*) digunakan dalam penelitian ini adalah untuk melihat apakah data mengalami autokorelasi atau tidak. Data dikatakan tidak mengalami autokorelasi jika nilai $du \leq d \leq 4-du$.

Tabel 4.11
Uji Autokorelasi

Model Summary^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.156 ^a	.024	-.001	.157941	2.235
a. Predictors: (Constant), DK, KI, KE					
b. Dependent Variable: TA (CETR)					

Berdasarkan tabel 4.10 diatas yang merupakan hasil uji autokorelasi, diketahui nilai Durbin-Watson adalah sebesar 2,235. Kemudian nilai tersebut akan dibandingkan dengan nilai tabel dengan signifikansi 5%, jumlah sampel (N) sebanyak 120 sampel dari jumlah variabel independen sebanyak 3 ($k=3$), maka diperoleh nilai dL sebesar 1,6513 dan nilai dU sebesar 1,7536. Oleh karena itu, nilai Durbin-Watson sebesar $2,235 \leq 4$ sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi dalam model regresi.

4.3 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan untuk membuktikan ada atau tidaknya pengaruh variabel independen pada variabel dependen. Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda, persamaan regresi linier berganda disusun untuk menyusun untuk mengetahui pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen.

4.3.1 Hasil Pengujian Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen yang dalam penelitian ini di proksikan dengan karakter eksekutif, kepemilikan institusional dan dewan komisaris terhadap *tax avoidance* sebagai variabel dependen.

Tabel 4.12
Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.401	.071		5.675	.000
	KE	-.128	.106	-.112	-1.201	.232
	KI	-.055	.073	-.071	-.757	.450
	DK	-.007	.009	-.078	-.835	.405
a. Dependent Variable: TA (CETR)						

Berdasarkan tabel 4.12 diatas menunjukkan hasil pengujian regresi linear berganda pada tingkat signifikansi 5%, maka diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$\text{CETR} = 0,401 - 0,128 \text{ KE} - 0,055 \text{ KI} - 0,007 \text{ DK} + e$$

Hasil dari analisis tersebut dapat di interpretasikan sebagai berikut:

1. Persamaan regresi diatas diketahui memiliki nilai konstanta sebesar 0,401 dengan tanda positif. Artinya apabila variabel karakter eksekutif, kepemilikan

institusional dan dewan komisaris diasumsikan konstan atau nilainya nol (0), maka *tax avoidance* akan mengalami peningkatan sebesar 0,401.

2. Nilai koefisien regresi karakter eksekutif adalah sebesar -0,128 yang dapat diasumsikan bahwa jika variabel karakter eksekutif mengalami kenaikan satu satuan, maka variabel *tax avoidance* akan mengalami penurunan sebesar -0,128 dengan asumsi variabel bebas lainnya bernilai tetap.
3. Nilai koefisien regresi kepemilikan institusional adalah sebesar -0,055 yang dapat diasumsikan bahwa jika variabel kepemilikan institusional mengalami kenaikan satu satuan, maka variabel *tax avoidance* akan mengalami penurunan sebesar -0,055 dengan asumsi variabel bebas lainnya bernilai tetap.
4. Nilai koefisien regresi dewan komisaris adalah sebesar -0,007 yang dapat diasumsikan bahwa jika variabel dewan komisaris mengalami kenaikan satu satuan, maka variabel *tax avoidance* akan mengalami penurunan sebesar -0,007 dengan asumsi variabel bebas lainnya bernilai tetap.

4.3.2 Uji Statistik F

Uji F digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh secara simultan atau bersamaan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Jika nilai probabilitas $< 0,05$ maka H_0 tidak ditolak atau hipotesis dapat dikonfirmasi sedangkan jika nilai probabilitas $> 0,05$ maka H_0 ditolak.

Tabel 4.13
Hasil Uji Statistik F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.073	3	.024	.969	.410 ^b
	Residual	2.894	116	.025		
	Total	2.966	119			
a. Dependent Variable: TA (CETR)						
b. Predictors: (Constant), DK, KI, KE						

Berdasarkan tabel 4.13 diatas menunjukkan bahwa nilai F hitung adalah sebesar 0,969 dengan nilai signifikansi 0,410 yang megindikasikan bahwa nilai signifikansi lebih besar dari nilai probabilitas atau $0,410 > 0,05$. Dapat disimpulkan bahwa variabel karakter eksekutif, kepemilikan institusional dan dewan komisaris berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap *tax avoidance*, sehingga H_0 ditolak. Artinya, setiap perubahan yang terjadi pada variabel karakter eksekutif, kepemilikan institusional dan dewan komisaris secara simultan berpengaruh negatif tidak signifikan pada *tax avoidance*.

4.3.3 Uji Statistik t

Uji statistik t digunakan untuk menguji apakah variabel berpengaruh terhadap variabel dependen. Jika nilai probabilitas $< 0,05$ maka H_0 ditolak, sedangkan jika nilai probabilitas $> 0,05$ maka H_0 tidak ditolak.

Tabel 4.14
Hasil Uji Parsial (Uji t)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.401	.071		5.675	.000
	KE	-.128	.106	-.112	-1.201	.232
	KI	-.055	.073	-.071	-.757	.450
	DK	-.007	.009	-.078	-.835	.405
a. Dependent Variable: TA (CETR)						

Hasil analisis tabel 4.14 diatas dapat di interpretasikan sebagai berikut:

1. Karakter Eksekutif

Koefisien regresi variabel karakter eksekutif bernilai -0,128 dan hasil uji t sebesar -1,201 serta nilai signifikansinya adalah sebesar 0,232. Karena $0,232 > 0,05$ maka H_1 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa karakter eksekutif berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap *tax avoidance*.

2. Kepemilikan Institusional

Koefisien regresi variabel kepemilikan institusional bernilai -0,055 dan hasil uji t sebesar -0,757 serta nilai signifikansinya adalah sebesar 0,450. Karena $0,450 > 0,05$ maka H_2 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap *tax avoidance*.

3. Dewan Komisaris

Koefisien regresi variabel karakter eksekutif bernilai -0,007 dan hasil uji t sebesar -0,835 serta nilai signifikansinya adalah sebesar 0,405. Karena $0,405 > 0,05$ maka

H₃ ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dewan komisaris berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap *tax avoidance*.

4.3.4 Uji Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi bertujuan untuk menguji seberapa jauh kemampuan model dalam menjelaskan variabel dependen.

Tabel 4.15
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.156 ^a	.024	-.001	.157941
a. Predictors: (Constant), DK, KI, KE				

Berdasarkan hasil pengujian koefisien determinasi diatas, diperoleh angka R *Square* sebesar 0,024. Hal ini berarti pendeteksian *tax avoidance* atau penghindaran pajak oleh variabel karakter eksekutif, kepemilikan institusional dan dewan komisaris adalah sebesar 2,4%. Dan sebesar 97,6% lainnya disebabkan oleh faktor-faktor lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini.

4.4 Pembahasan, Implikasi, dan Keterbatasan

4.4.1 Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan melalui beberapa pengujian seperti regresi secara parsial maupun simultan karakter eksekutif, kepemilikan institusional dan dewan komisaris terhadap *tax avoidance* dapat diketahui pengaruh dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat, berikut pemaparannya:

Hasil penelitian statistik simultan (Uji-F) menunjukkan pengaruh karakter eksekutif, kepemilikan institusional, dan dewan komisaris terhadap *tax avoidance* dapat diketahui hasil dari uji F. Hasil uji F menunjukkan secara bersama-sama variabel independen berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa secara bersama-sama variabel-variabel tersebut tidak dapat mendeteksi terjadinya *tax avoidance* di perusahaan.

Hasil penelitian stastitsik parsial (Uji-t), dari hasil analisis yang telah dijelaskan diatas bahwa terdapat pengaruh yang terjadi di antara karakter eksekutif, kepemilikan institusional dan dewan komisaris terhadap *tax avoidance*.

Berikut merupakan pemaparan pengaruh yang terjadi diantara variabel-variabel tersebut:

1. Pengaruh Karakter Eksekutif terhadap *Tax Avoidance*

Hasil analisis uji t menunjukkan bahwa variabel eksekutif berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap *tax avoidance*. Hasil ini tidak sesuai dengan hipotesis yang

diajukan yaitu karakter eksekutif berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*, sehingga hipotesis H₁ ditolak dan tidak dapat dikonfirmasi.

Tidak berpengaruh secara signifikannya karakter eksekutif terhadap penghindaran pajak dalam penelitian ini, kemungkinan disebabkan karena *principal* masih memiliki pengaruh yang lebih besar dibandingkan dengan eksekutif dalam pengambilan keputusan dan kebijakan perusahaan, termasuk untuk melakukan tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Eksekutif akan dituntut untuk selalu mengikuti keinginan *principal*, baik untuk melakukan tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) ataupun tidak melakukan tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Hal ini didukung oleh *stewardship theory* sebagaimana dijelaskan oleh Donaldson dan Davis (1991) yang menyatakan bahwa para eksekutif termotivasi untuk bertindak sesuai dengan keinginan *principal* dan memiliki perilaku dimana dia dibentuk agar selalu dapat diajak bekerja sama dalam organisasi, memiliki perilaku kolektif atau berkelompok dengan utilitas tinggi daripada individunya dan selalu bersedia untuk melayani *principal* (Kartana dan Wulandari, 2018).

Selain itu, dalam penelitian ini eksekutif yang di proksikan dengan karakter *risk taker* cenderung akan mengambil risiko tinggi dalam pengambilan keputusan terkait dengan penerimaan laba perusahaan. Eksekutif lebih memilih untuk mencari cara agar perusahaan memiliki keuntungan atau laba yang lebih tinggi, dibandingkan dengan berusaha untuk mengurangi pembayaran pajak perusahaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui peraturan perpajakan. Oleh karena itu semakin tinggi risiko yang diambil oleh pemimpin *risk taker*, maka semakin rendah kemungkinan perusahaan

untuk melakukan *tax avoidance*. Karena eksekutif hanya menginginkan kenaikan laba yang besar dan tetap membayar pajak sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Gartika dan Wijaya (2016) serta Kartana dan Wulandari (2018) yang membuktikan bahwa karakter eksekutif tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

2. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan hasil pengujian diatas menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap *tax avoidance*. Hasil ini tidak sesuai dengan hipotesis yang diajukan yaitu kepemilikan institusional berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance* sehingga hipotesis H₂ ditolak dan tidak dapat dikonfirmasi.

Kepemilikan institusional berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap *tax avoidance* yang berarti persentase kepemilikan saham institusional dalam perusahaan akan mempengaruhi terjadinya *tax avoidance* di perusahaan. Kepemilikan institusional merupakan proporsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak institusi seperti pemerintah, perusahaan asuransi, perusahaan investasi dan pihak bank. Pemilik saham institusi sering disebut juga sebagai pemilik tidak langsung perusahaan karena memiliki hak untuk ikut mengawasi dan mengelola perusahaan agar dapat berjalan dengan baik. Semakin tinggi jumlah saham yang dimiliki oleh pihak institusi, maka akan semakin baik pengawasan terhadap kemungkinan terjadinya *tax avoidance* di perusahaan. Oleh karena itu semakin tinggi jumlah saham yang dimiliki pihak institusi,

maka semakin rendah kemungkinan perusahaan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sandy dan Lukviarnan (2015) serta Fitria (2018) yang membuktikan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

3. Pengaruh Dewan Komisaris terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan hasil pengujian diatas menunjukkan bahwa dewan komisaris berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap *tax avoidance*. Hasil ini tidak sesuai dengan hipotesis yang diajukan yaitu dewan komisaris berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance* sehingga hipotesis H₃ ditolak dan tidak dapat dikonfirmasi.

Dewan komisaris memiliki peranan penting dalam pengendalian internal serta memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengawasi manajemen perusahaan. Dewan komisaris yang bukan merupakan bagian dari manajemen perusahaan tidak akan terpengaruh oleh tindakan manajemen, sehingga mereka cenderung mendorong manajemen perusahaan untuk mengungkapkan informasi yang lebih luas kepada pemegang saham dan *stakeholder* (Prasetyo dan Pramuka, 2018). Selain itu, dewan komisaris juga memiliki wewenang untuk memberikan nasihat kepada direksi perusahaan sehingga dapat mengawasi pengambilan keputusan terkait penghindaran pajak yang dibuat oleh perusahaan. Oleh karena itu semakin sedikit jumlah dewan komisaris di perusahaan, maka semakin tinggi kemungkinan terjadinya *tax avoidance* di perusahaan,

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Zulaikha dan Permana (2015), serta Prasetyo dan Pramuka (2018) yang menyebutkan bahwa dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

4.4.2 Koefisien Determinasi Karakter Eksekutif, Kepemilikan Institusional dan Dewan Komisaris terhadap Tax Avoidance

Nilai koefisien determinasi atau R² (*R Square*) adalah sebesar 0,024 atau 2,4% yang berarti variabel karakter eksekutif, kepemilikan institusional dan dewan komisaris secara bersama-sama mempunyai kontribusi untuk menjelaskan *tax avoidance* sebesar 2,4%, dan sebanyak 97,6% sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti atau dimasukkan dalam model penelitian ini seperti komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit serta variabel-variabel lainnya.

4.4.3 Implikasi

Hasil penelitian ini memiliki implikasi yang dapat memberikan gambaran mengenai rujukan-rujukan yang digunakan dalam penelitian ini. Gambaran ini dapat ditunjukkan dari rujukan penelitian terdahulu dengan temuan penelitian yang sedang diteliti. Implikasi tersebut sebagai berikut:

4.4.3.1 Implikasi Teoritis

Implikasi teoritis dalam penelitian ini mendukung dan membantah hasil penelitian terdahulu. Dalam penelitian ini diperoleh hasil bahwa variabel karakter

eksekutif, tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance*. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Gartika dan Wijaya (2016) serta Kartana dan Wulandari (2018) yang hasilnya menunjukkan bahwa karakter eksekutif tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Adapun variabel kepemilikan institusional memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap *tax avoidance* dan sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sandy dan Lukviarnan (2015) serta Fitria (2018) yang membuktikan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Variabel dewan komisaris juga menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan terhadap *tax avoidance* dan hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Zulaikha dan Permana (2015), serta Prasetyo dan Pramuka (2018) yang menyebutkan bahwa dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

4.4.3.2 Implikasi Praktis

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, implikasi praktis dalam penelitian ini yaitu bagi manajemen untuk mengurangi terjadinya penghindaran pajak melalui pengawasan, maka manajemen dapat memperhatikan faktor kepemilikan institusional dan dewan komisaris.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional dan dewan komisaris memiliki pengaruh negatif tidak signifikan terhadap penghindaran pajak yang berarti kedua faktor tersebut sedikit banyak mempengaruhi keputusan manajemen untuk melakukan penghindaran pajak. Kepemilikan institusional dan dewan komisaris

masing-masing memiliki fungsi pengawasan dan hak untuk mengelola perusahaan yang dapat membuat manajemen tidak akan melakukan tindakan penghindaran pajak dan tetap membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

4.5 Keterbatasan Penelitian

Setelah melakukan analisis data dan pengujian serta implementasi dari hasil penelitian, penulis menyadari bahwa masih terdapat beberapa hal yang menjadi keterbatasan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya dilakukan pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi sehingga tidak mencerminkan reaksi pasar secara keseluruhan.
2. Penelitian ini hanya mengambil sampel 24 perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi selama 5 tahun penelitian.
3. Penelitian ini hanya menggunakan 3 variabel yaitu karakter eksekutif, kepemilikan institusional dan dewan komisaris. Sedangkan *tax avoidance* tidak hanya dipengaruhi oleh variabel-variabel tersebut saja, melainkan masih banyak variabel lain yang dapat mempengaruhi *tax avoidance*.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan melalui beberapa tahap mengenai karakter eksekutif, kepemilikan institusional dan dewan komisaris terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2020, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Karakter eksekutif, kepemilikan institusional dan dewan komisaris secara simultan berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2020. Hal ini berarti secara bersama-sama variabel tersebut tidak memiliki pengaruh yang signifikan dalam menghindari praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan oleh perusahaan.
2. Karakter eksekutif secara parsial berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2020. Hal ini kemungkinan terjadi karena eksekutif mengikuti keinginan *principal* untuk meningkatkan laba perusahaan yang akan menaikkan dividen dan

menyejahterakan para pemegang saham, namun tetap membayar pajak sesuai dengan ketentuan pemerintah.

3. Kepemilikan institusional berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2020. Hal ini berarti persentasi tinggi rendahnya jumlah saham yang dimiliki oleh pihak institusional sedikit banyak akan mempengaruhi pengawasan terhadap pengambilan keputusan yang dilakukan oleh manajemen agar tidak melakukan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*).
4. Dewan komisaris berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2020. Hal ini berarti tinggi rendahnya jumlah dewan komisaris di perusahaan sedikit banyak akan mempengaruhi pengambilan keputusan manajemen perusahaan agar tidak melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*).
5. *Tax avoidance* yang terjadi hanya dapat dijelaskan sebanyak 2,4% oleh karakter eksekutif, kepemilikan institusional dan dewan komisaris, sedangkan sebesar 97,6% sisanya dijelaskan oleh faktor *corporate governance* lain seperti komisaris independen, komite dan kualitas audit serta faktor lain yang tidak digunakan sebagai variabel dalam penelitian ini.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian serta hal-hal yang terkait dengan keterbatasan penelitian, maka terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu:

5.2.1 Saran Teoritis

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan:

1. Terkait faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* diharapkan tidak hanya meneliti karakter eksekutif, kepemilikan institusional dan dewan komisaris saja, tetapi faktor *corporate governance* lain seperti komite dan kualitas audit atau faktor rasio keuangan seperti *leverage* dan profitabilitas.
2. Meneliti perusahaan manufaktur secara keseluruhan dan menambah periode penelitian agar memiliki jumlah sampel yang lebih banyak.

5.2.2 Saran Praktis

1. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan dalam menemukan atau menerapkan sebuah aturan yang dapat meningkatkan kesadaran pajak bagi manajemen perusahaan agar tidak melakukan *tax avoidance* (penghindaran pajak).

2. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi investor sebelum melakukan investasi, agar memperhatikan faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi *tax avoidance* (penghindaran pajak) di perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Annisa, Nuralifmida Ayu dan Lulus Kurniasih, 2012. “Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance”. Jurnal Akuntansi dan Auditing, Vol. 8, No.2, hlm 123 -126.
- Algifari, 2015. Analisis Regresi untuk Bisnis dan Ekonomi. Edisi 3. Yogyakarta. ISBN 978-979-503-600-5.
- Ardyansah, Danis dan Zulaikha. 2014. “Pengaruh Size, Leverage, Profitabilitas, Capital Intensity Ratio dan Komisaris Independen terhadap Effective Tax Rate (ETR)”. *Diponegoro Journal of Accounting*. Vol.3, No.2, hlm 1-9.
- Ariawan, I Made Agus Riko dan Putu Ery Setiawan. 2017. “Pengaruh Dewan Komisaris, Kepemilikan Institusional, Profitabilitas dan Leverage terhadap Tax Avoidance”. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Vol. 18.3. Mei 2017: 1831-1859.
- Aryatama, Muhammad Irfan dan Surya Raharja, 2021. “The Effect of Capital Intensity, Corporate Social Responsibility, and Profitability on Tax Avoidance”. *Diponegoro Journal of Accounting*, Vol. 10, No.4, hlm 1-15.
- Astuti, Titiek Puji dan Y. Anni Aryani, 2016. “Tren Penghindaran Pajak Perusahaan Manufaktur di Indonesia yang Terdaftar di BEI Tahun 2001-2014”. Jurnal Akuntansi/Volume XX, No. 03, September 2016: 375-388.
- Budiman, Judi dan Setiyono. 2012. “Pengaruh Karakter Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)”.
- Charisma, Rezia Bayu dan Susi Dwimulyani. 2019. “Pengaruh Struktur Kepemilikan terhadap Tindakan Penghindaran Pajak dengan Kualitas Audit sebagai Variabel Moderating”. Prosiding Seminar Nasional Pakar ke 2 Tahun 2019 Buku 2: Sosial dan Humaniora.
- Dewi, Rosiyana dan Itjang D. Gunawan, 2019. “The Implications of CSR and GCG on Tax Avoidance”. Jurnal Akuntansi Universitas Trisakti, Vol. XXIII, No.02 May 2019:195-212.
- Dewi, Ni Nyoman Kristiana dan I Ketut Jati, 2014. “Pengaruh Karakter Eksekutif, Karakteristik Perusahaan dan Dimensi Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Tax Avoidance”. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Vol. 6, No. 2, hlm 249-260..
- Diantari, Putu Rista dan IGK Agung Ulupui, 2016. “Pengaruh Komite Audit, Proporsi Komisaris Independen, dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap Tax

- Avoidance". E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Vol. 16, No. 1, hlm 702-732.
- Eksandy, Arry. 2017. "Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, Dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)".
- Fadhilah, Rahmi, 2014. Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Tax Avoidance". Jurnal Akuntansi 2 (1).
- Fatmawati, Yunel. 2018. "Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance terhadap Manajemen Laba (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2015)." Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
- Feranika, Ayu *et al*, 2017. "Pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, Kualitas Audit, Komite Audit, Karakter Eksekutif dan Leverage Terhadap Tax Avoidance".
- Fitria, Giawan Nur, 2018. "Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, Karakter Eksekutif dan Size terhadap Tax Avoidance". Komunikasi Ilmiah Akuntansi dan Perpajakan. Vol.11, No. 3 Desember 2018. e-ISSN: 2622-1950.
- Gartika, Wijaya, 2018. "Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Karakter Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak". *Journal of Economic* 9(1):70-79.
- Ghozali, Imam. 2016. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- _____, 2018. . Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Hanafi, Umi dan Puji Harto, 2014. "Analisis Pengaruh Kompensasi Eksekutif, Kepemilikan Saham Eksekutif, dan Preferensi Risiko Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan". Diponegoro *Journal of Accounting*, Vol. 3, No.2, hlm 1-11.
- Hanum, Hashemi Rodhian, 2013. "Pengaruh Karakteristik Corporate Governance Terhadap Effective Tax Rate". Diponegoro *Journal of Accounting*, Vol. 2, No. 2, hlm 1-10.
- Herlambang, Akbar Roy. 2017. "Analisis Pengaruh Free Cash Flow dan Financial Laverage terhadap Manajemen Laba dengan Good Corporate Governance sebagai Variabel Moderisasi". JOM Fekom, Vol. 4 No. 1 (Februari) 2017.
- Kartana, I Wayan dan Ni Gusti Agung Sri Wulandari. 2018. "Pengaruh Karakter Eksekutif, Karakteristik Perusahaan dan Corporate Governance Terhadap Tax

- Avoidance*". Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi; Vol. 10, No. 1 Juli 2018.
- Krisna, A, M. (2019). "Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Manajerial pada Tax Avoidance dengan Kualitas Audit sebagai Variabel Pemoderasi". Wacana Ekonomi (Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi), 18 (2), pp.82-91.
- Kurniasih, Tommy dan Sari, Maria M. Ratna. (2013). "*Pengaruh Return On Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal pada Tax Avoidance*". Buletin Studi Ekonomi, 18 (1): 58-66.
- Maharani, I Gusti Ayu Cahya dan Ketut Alit Suardana, 2014. "Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas dan Karakteristik Eksekutif pada Tax Avoidance Perusahaan Manufaktur". E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Vol. 9, No. 2, hlm 525-539.
- Mahulae, Endang Endari *et al*, 2016. "*Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial dan Komite Audit Terhadap Tax Avoidance*". *e-Proceeding of Management* : Vol. 3, No.2 Agustus 2016. ISSN : 2355-9357.
- Mangkusuryo, Yusuf dan Ahmad Waluya Jati, 2017. "Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance terhadap Manajemen Laba". Jurnal Review Akuntansi dan Keuangan 7 (2), 1067-1080.
- Mangindaan, D. H., Dan Ramadhan, G. F. 2017. "Pengaruh Karakter Eksekutif Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak (Survei Pada Perusahaan Property Dan Real Estate Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2012-2015)". Ekp, 13(3), 1576–1580.
- Mardiasmo, 2018. Perpajakan Edisi Terbaru, 2018. Azkia Publisher, Grup Pustaka Alvabet, Jakarta.
- Marlinda, Dian Eva, *et al*. 2020. "Pengaruh GCG, Profitabilitas, Capital Intensity, dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance". *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(1).
- Marselawati, Dina, *et.al*, 2018. "The Effect of Corporate Governance on Tax Avoidance". *The 2nd International Conference on Technology, Education and Social Science 2018*.
- Masripah, *et al*, 2016. "Controlling Shareholder and Tax Avoidance: Family Ownership and Corporate Governance". *International Research Journal of Business Studies*, Vol.8, No.3, hlm 167-180.
- Merslythalia, Dy Retta dan Mienati Somya Lasmana, 2016. "Pengaruh Kompetensi Eksekutif, Ukuran Perusahaan, Komisaris Independen dan Kepemilikan Institusional terhadap Tax Avoidance". Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis, Vol. 11, No. 2, Juli 2016. ISSN 2303-1018.

- Mulyani, Sri, *et al*, 2018. “Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance”. Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga Vol. 3. No. 1 (2018) 322-340 ISSN 2548-1401.
- Noviani, L., Diana, N., & Mawardi, M. C. (2017). “Pengaruh Karakteristik Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage dan Sales Growth pada Tax Avoidance (Studi Kasus Perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia)”. Jurnal Akuntansi dan Bisnis, 17(1), 426–452.
- Nugraha, Novia Bani dan Wahyu Meiranto, 2015. “Pengaruh Corporate Social Responsibility, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage dan Capital Intensity Terhadap Agresivitas Pajak”. Diponegoro Journal of Accounting, Vol. 4, No. 4, hlm 1-14.
- Oktamawati, Mayarisa, 2017. “Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage, Pertumbuhan Penjualan dan Profitabilitas terhadap Tax Avoidance”. Jurnal Akuntansi Bisnis, Vol. 15, No. 1, Maret 2017.
- Permana, Ahmad Reza Dwi dan Zulaikha. 2015. “Pengaruh Corporate Governance terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2011-2014)”. Diponegoro Journal of Accounting Volume 4, Nomor 4.
- Pitaloka, Syifa dan Ni Ketut Lely Aryani Merkusiwati, 2019. “Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Komite Audit, dan Karakter Eksekutif Terhadap Tax Avoidance”. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.27, 2 Mei (2019): 1202-1230.
- Pohan, Chairil. A. 2016. Manajemen Perpajakan : Strategi Perpajakan dan Bisnis Edisi Revisi. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Praditasari, Ni Koming Ayu dan Putu Ery Setiawan, 2017. “Pengaruh Good Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, Leverage dan Profitabilitas terhadap Tax Avoidance”. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Vol. 19.2. Mei (2017): 1229-1258. ISSN: 2302-8556.
- Pratiwi, Rizqi Gusti dan Abriyani Puspaningsih (2017). “Determinan Kebijakan Dividen di Indonesia: Good Corporate Governance (GCG) sebagai Variabel Intervening”. Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia 21(2) Desember 2017.
- Pratomo, Dudi dan Hervita Triswidyaria, 2020. “Pengaruh Transfer Pricing Dan Karakter Eksekutif Terhadap Tax Avoidance”. Jurnal Akuntansi Aktual, Vol.8, No. 1 Februari 2021.
- Prasetyo, Irwan dan Bambang Agus Pramuka, 2018. “Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial dan Proporsi Dewan Komisaris Independen terhadap Tax Avoidance”. Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi (JEBA) Volume 20 Nomor 02 Tahun 2018.

- Prastiti, Anaindyah dan Wahyu Meiranto, 2013. "Pengaruh Karakteristik, Dewan Komisaris dan Komite Audit terhadap Manajemen Laba". E-Journal Universitas Diponegoro.
- Priyono Puji Prasetyo, 2016. Jurnal Riset Akuntansi Indonesia Vol 5 No 1. Ikatan Akuntansi Indonesia. Yogyakarta. ISBN 1410-6817.
- Putra, I Gst Ln Ngr Dwi Cahyadi dan Ni Kt Lely Aryani Merkusiwati, 2016. "Pengaruh Komisaris Independen, Leverage dan Capital Intensity Ratio pada Tax Avoidance". E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.17, 1 Oktober (2016): 690-714.
- Putri, P. A., Zaitul, dan Herawati. (2014). "Pengaruh Mekanisme Corporate Governance dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility terhadap Tax Avoidance". Jurnal Akuntansi :1-15.
- Putranti, Annisa Setiawati dan Yulita Setiawanta, (2015). "Pengaruh Kepemilikan Institusional, Struktur Dewan Komisaris, Kualitas Audit dan Komite Audit terhadap Tax Avoidance". Jurnal Akuntansi dan Auditing 8 (2), 1-14.
- Rahayu, Alifiyanti Putri *et al.*, 2020. "Good Corporate Governance, Profitability dan Tax Avoidance di Bursa Efek Indonesia".
- Rangkuti, Zulfandi Ramanda *et al.*, 2017. "Pengaruh Karakter Eksekutif dan Leverage Terhadap Tax Avoidance". *e-Proceeding of Management* : Vol.4, No. 1 April 2017, Page 533
- Ratnaningsih, Dewi dan Stevanie Mashelia, (2020). "Pengaruh Faktor Pengawasan Internal (Ukuran Dewan Komisaris dan Komite Audit) terhadap Manajemen Laba". *Equilibrium Jurnal Bisnis & Akuntansi Volume XIV, No. 2 (Oktober 2020): 1-10.*
- Sarmo Sulaiman, *et al.* 2020. "Pengaruh Kepemilikan Institusional, Proporsi Dewan Komisaris Independen, Ukuran Perusahaan dan Leverage Terhadap Manajemen Laba". *JIAI (Jurnal Ilmiah Akuntansi Indonesia)*, ISSN 2528-6501 Vol. 5, No. 2
- Sarra. Hustna Dara, 2017. "Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Komite Audit dan Dewan Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak".
- Sari, Ardiana Luthvita, (2017). "Karakteristik Perusahaan, Tata Kelola Perusahaan dan Manajemen Laba". *Jurnal Akuntansi Bisnis, Vol. 15, No. 2, September 2017.* ISSN 2541-5204 (media online).
- Sandy, Syeldila dan Lukviarman, Niki. (2015). "Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance". *JAAI Vol. 19 No. 2, Desember 2015: 85-98.*
- Subagiastra, Komang, *et al.* 2016. "Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga, dan Good Corporate Governance terhadap Penghindaran Pajak".

- (Studi pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia)”. *Jurnal Ilmiah Akuntansi* Vol. 1, No. 2.
- Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods). Bandung: Alfabeta.
- _____, 2018. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods). Bandung: Alfabeta.
- Sumanto Bowo, *et al.* 2014. “Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Ukuran Dewan Komisaris Terhadap Manajemen Laba”. *Accounting Analysis Journal*, ISSN 2252-6765.
- Sunarsih, Fahmi Yahya dan Slamet Haryono, 2019. “Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Corporate Governance, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Yang Tercatat di Jakarta Islamic Index”. Vol. 13, No.1, Juni 2019.
- Swingly, Calvin dan I Made Sukartha, 2015. “Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Leverage dan Sales Growth pada Tax Avoidance”. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 10.1 (2015): 47-62. ISSN: 2302-8556.
- Syahfitri, P. 2016. “Pengaruh Tax Avoidance Terhadap Nilai Perusahaan”. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
- Widuri *et al.*, “The Effect of Good Corporate Governance on Tax Avoidance of Listed Companies in Indonesian Stock Exchange in 2015-2017”. In: *Journal of Economics and Business*, Vol.2, No.1, 120-126. ISSN 2615-3726.
- Windiarti, Dwi Rynda, 2016. “Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, dan Rasio Leverage terhadap Nilai Perusahaan”. Repository Unpas, 2016.
- Yendrawati, Reni dan Amila Dian Maraya, 2016. “Pengaruh Corporate Governance dan Corporate Social Responsibility Disclosure terhadap Tax Avoidance”. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia* 20 (2), 147-159.

Situs lain:

www.pajak.go.id, (akses, 20 April 2022)

<https://nasional.kompas.com/ditjen.pajak.selidiki.tunggakan.pajak.bakrie/>, (akses 06 April 2022)

www.kemenperin.go.id, (akses, 26 Juni 2022)

LAMPIRAN



**STIE
STAN-IM**

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI STAN-INDONESIA MANDIRI

Akreditasi BAN PT SK No. 3048/SK/BAN-PT/AK-PPJ/S/V/2020

Akreditasi BAN PT SK No. 2987/SK/BAN-PT/AK-PPJ/S/V/2020 "B"

Jl. Belitung No.7 Bandung Telp. (022) 4262933, 4262934, 4262935, 4262936, 4262937

Web Site : <http://www.stan-im.ac.id> email : info@stan-im.ac.id

**DAFTAR HADIR BIMBINGAN TUGAS AKHIR
STIE STAN - INDONESIA MANDIRI**

Nama : Wina Triana Noor Yusuf
NIM/Program Studi : 371801005 / Akuntansi
Pembimbing : Dani Sopian S.E., M.Ak
Judul Skripsi : Pengaruh Karakter Eksekutif, Kepemilikan Institusional,
dan Dewan Komisaris terhadap *Tax Avoidance*

No	Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf
1.	17 - 03 - 2022	Konsultasi Topik, Judul dan Variabel	
2.	23 - 03 - 2022	Rancangan Penelitian	
3.	30 - 03 - 2022	Bab I	
4.	06 - 04 - 2022	Revisi Bab I	
5.	13 - 04 - 2022	Bab II	
6.	20 - 04 - 2022	Revisi Bab II	
7.	26 - 04 - 2022	Bab III	
8.	18 - 05 - 2022	Revisi Bab III	
9.	25 - 05 - 2022	Revisi Bab III	
10.	02 - 06 - 2022	Bab IV	
11.	08 - 06 - 2022	Revisi Bab IV	
12.	16 - 06 - 2022	Revisi Bab IV	
13.	23 - 06 - 2022	Revisi Bab IV	
14.	29 - 06 - 2022	Revisi Bab IV	
15.	07 - 07 - 2022	ACC Bab IV dan V	
16.	14 - 07 - 2022	Draft Overall	
17.	15 - 07 - 2022	ACC Sidang	

Bandung, 15 Juli 2022
Dosen Pembimbing,

(Dani Sopian, S.E., M.Ak)

Lampiran 1: Populasi Penelitian

No	Kode	Nama Perusahaan
SUB SEKTOR MAKANAN DAN MINUMAN		
1	AISA	Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk
2	ALTO	Tri Banyan Tirta Tbk
3	BTEK	Bumi Teknokultura Unggul Tbk
4	BUDI	Budi Starch & Sweetener Tbk
5	CAMP	Campina Ice Cream Industry Tbk
6	CEKA	Wilmar Cahaya Indonesia Tbk (d.h Cahaya Kalbar Tbk)
7	CLEO	Sariguna Primatirta Tbk
8	COCO	Wahana Interfood Nusantara Tbk
9	DLTA	Delta Djakarta Tbk
10	DMND	Diamond Food Indonesia Tbk
11	ENZO	Morenzo Abadi Perkasa
12	FOOD	Sentra Food Indonesia Tbk
13	GOOD	Garudafood Putra Putri Jaya Tbk
14	HOKI	Buyung Poetra Sembada Tbk
15	ICBP	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
16	IIKP	Inti Agri Resources Tbk
17	IKAN	Era Mandiri Cemerlang Tbk
18	INDF	Indofood Sukses Makmur Tbk
19	KEJU	Mulia Boga Raya Tbk
20	MLBI	Multi Bintang Indonesia Tbk
21	MYOR	Mayora Indah Tbk
22	PANI	Pratama Abadi Nusa Industri Tbk
23	PCAR	Prima Cakrawala Abadi Tbk
24	PSDN	Prashida Aneka Niaga Tbk
25	PSGO	Palma Serasih Tbk
26	ROTI	Nippon Indosari Corporindo Tbk
27	SKBM	Sekar Bumi Tbk
28	SKLT	Sekar Laut Tbk
29	STTP	Siantar Top Tbk
30	TBLA	Tunas Baru Lampung Tbk
31	ULTJ	Ultrajaya Milk Industry and Trading Company Tbk
32	WMUU	Widodo Makmur Unggas Tbk

No	Kode	Nama Perusahaan
SUB SEKTOR ROKOK		
1	GGRM	Gudang Garam Tbk
2	HMSP	Handjaya Mandala Sampoerna Tbk
3	ITIC	Indonesian Tobacco Tbk
4	RMBA	Bentoel International Investama Tbk
5	WIIM	Wismilak Inti Makmur Tbk
SUB SEKTOR FARMASI		
1	DVLA	Darya Varia Laboratoria Tbk
2	INAF	Indofarma (Persero) Tbk
3	KAEF	Kimia Farma (Persero) Tbk
4	KLBF	Kalbe Farma Tbk
5	MERK	Merck Indonesia Tbk
6	PEHA	Phapros Tbk
7	PYFA	Pyridam Farma Tbk
8	SCPI	Merck Sharp Dohme Pharma Tbk
9	SIDO	Industri Jamu & Farmasi Sido Muncul Tbk
10	SOHO	Soho Global Health Tbk
11	SQBB	Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk
12	SQBI	Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk
13	TSPC	Tempo Scan Pasific Tbk
SUB SEKTOR KOSMETIK DAN BARANG KEPERLUAN RUMAH TANGGA		
1	ADES	Akasha Wira International Tbk
2	KINO	Kino Indonesia Tbk
3	KPAS	Cottonindo Ariesta Tbk
4	MBTO	Martina Berto Tbk
5	MRAT	Mustika Ratu Tbk
6	TCID	Mandom Indonesia Tbk
7	UNVR	Unilever Indonesia Tbk
8	VICI	Victoria Care Indonesia Tbk
SUB SEKTOR PERALATAN RUMAH TANGGA		
1	CBMF	Cahaya Bintang Medan Tbk
2	CINT	Chitose International Tbk
3	KICI	Kedaung Indah Can Tbk
4	LMPI	Langgeng Makmur Industry Tbk
5	SOFA	Boston Furniture Industries Tbk

No	Kode	Nama Perusahaan
6	WOOD	Integra Indocabinet Tbk
SUB SEKTOR LAINNYA		
1	HRTA	Hartadinata Abadi Tbk
2	TOYS	Sunindo Adipersada Tbk

Lampiran 2: Sampel Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi

No	Kode	Nama Perusahaan
1	ADES	Akasha Wira International Tbk (d.h Ades Waters Indonesia Tbk)
2	CEKA	Wilmar Cahaya Indonesia Tbk (d.h Cahaya Kalbar Tbk)
3	CINT	Chitose International Tbk
4	DLTA	Delta Djakarta Tbk
5	DVLA	Darya Varia Laboratoria Tbk
6	GGRM	Gudang Garam Tbk
7	HMSP	Handjaya Mandala Sampoerna Tbk
8	ICBP	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
9	INDF	Indofood Sukses Makmur Tbk
10	KLBF	Kalbe Farma Tbk
11	KINO	Kino Indonesia Tbk
12	MYOR	Mayora Indah Tbk
13	PEHA	Phapros Tbk
14	PYFA	Pyridam Farma Tbk
15	ROTI	Nippon Indosari Corporindo Tbk
16	SCPI	Merck Sharp Dohme Pharma Tbk
17	SIDO	Industri Jamu & Farmasi Sido Muncul Tbk
18	SKBM	Sekar Bumi Tbk
19	SKLT	Sekar Laut Tbk
20	STTP	Siantar Top Tbk
21	TSPC	Tempo Scan Pasific Tbk
22	ULTJ	Ultrajaya Milk Industry and Trading Company Tbk
23	UNVR	Unilever Indonesia Tbk
24	WIIM	Wismilak Inti Makmur Tbk

Lampiran 3: Teknik Pengambilan Sampel

No	Kode	Kriteria 1	Kriteria 2	Kriteria 3	Keterangan
1	ADES	✓	✓	✓	Memenuhi
2	AISA	✓	×	✓	Tidak Memenuhi
3	ALTO	✓	×	✓	Tidak Memenuhi
4	BTEK	×	×	✓	Tidak Memenuhi
5	BUDI	×	×	✓	Tidak Memenuhi
6	CAMP	×	×	✓	Tidak Memenuhi
7	CBMF	×	×	✓	Tidak Memenuhi
8	CEKA	✓	✓	✓	Memenuhi
9	CINT	✓	✓	✓	Memenuhi
10	CLEO	×	×	✓	Tidak Memenuhi
11	COCO	×	×	✓	Tidak Memenuhi
12	DLTA	✓	✓	✓	Memenuhi
13	DMND	×	×	✓	Tidak Memenuhi
14	DVLA	✓	✓	✓	Memenuhi
15	ENZO	×	×	✓	Tidak Memenuhi
16	FOOD	×	×	✓	Tidak Memenuhi
17	GGRM	✓	✓	✓	Memenuhi
18	GOOD	×	×	✓	Tidak Memenuhi
19	HMSP	✓	✓	✓	Memenuhi
20	HOKI	×	×	✓	Tidak Memenuhi
21	HRTA	×	×	✓	Tidak Memenuhi
22	ICBP	✓	✓	✓	Memenuhi
23	IIKP	×	×	✓	Tidak Memenuhi
24	IKAN	×	×	✓	Tidak Memenuhi
25	INAF	✓	×	✓	Tidak Memenuhi
26	INDF	✓	✓	✓	Memenuhi
27	ITIC	×	×	✓	Tidak Memenuhi
28	KAEF	✓	✓	✓	Memenuhi
29	KEJU	×	×	✓	Tidak Memenuhi
30	KICI	✓	×	✓	Tidak Memenuhi

No	Kode	Kriteria 1	Kriteria 2	Kriteria 3	Keterangan
31	KINO	✓	✓	✓	Memenuhi
32	KLBF	✓	✓	✓	Memenuhi
33	KPAS	×	×	✓	Tidak Memenuhi
34	LMPI	✓	×	✓	Tidak Memenuhi
35	MBTO	✓	×	✓	Tidak Memenuhi
36	MERK	✓	✓	✓	Memenuhi
37	MLBI	✓	✓	✓	Memenuhi
38	MRAT	✓	×	✓	Tidak Memenuhi
39	MYOR	✓	✓	✓	Memenuhi
40	PANI	×	×	✓	Tidak Memenuhi
41	PCAR	×	×	✓	Tidak Memenuhi
42	PEHA	✓	✓	✓	Memenuhi
43	PSDN	✓	×	✓	Tidak Memenuhi
44	PSGO	×	×	✓	Tidak Memenuhi
45	PYFA	✓	✓	✓	Memenuhi
46	RMBA	✓	×	✓	Tidak Memenuhi
47	ROTI	✓	✓	✓	Memenuhi
48	SCPI	✓	✓	✓	Memenuhi
49	SIDO	✓	✓	✓	Memenuhi
50	SKBM	✓	✓	✓	Memenuhi
51	SKLT	✓	✓	✓	Memenuhi
52	SOFA	×	×	✓	Tidak Memenuhi
53	SOHO	×	×	✓	Tidak Memenuhi
54	SQBB	×	×	✓	Tidak Memenuhi
55	SQBI	×	×	✓	Tidak Memenuhi
56	STTP	✓	✓	✓	Memenuhi
57	TBLA	×	×	✓	Tidak Memenuhi
58	TCID	✓	×	✓	Tidak Memenuhi
59	TOYS	×	×	✓	Tidak Memenuhi
60	TSPC	✓	✓	✓	Memenuhi
61	ULTJ	✓	✓	✓	Memenuhi
62	UNVR	✓	✓	✓	Memenuhi
63	VICI	×	×	✓	Tidak Memenuhi
64	WIIM	✓	✓	✓	Memenuhi

No	Kode	Kriteria 1	Kriteria 2	Kriteria 3	Keterangan
65	WMUU	×	×	✓	Tidak Memenuhi
66	WOOD	×	×	✓	Tidak Memenuhi

Lampiran 4: Tabel Kriteria *Purposive Sampling*

No	Kriteria	Jumlah
1	Jumlah populasi perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), selama periode 2016-2020.	66
2	Perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang tidak terdaftar berturut-turut di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan mengalami <i>delisting</i> selama periode 2016-2020.	(29)
3	Perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang tidak memiliki kelengkapan informasi mengenai variabel-variabel yang diukur dalam penelitian serta mengalami kerugian selama periode 2016-2020.	(10)
4	Perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang tidak menerbitkan laporan tahunan (<i>annual report</i>) dan dinyatakan dalam rupiah selama periode 2016-2020.	(0)
Jumlah Perusahaan yang Memenuhi Kriteria		27
Periode Penelitian		5 tahun
Total Sampel Tahun Penelitian		135

Lampiran 5: Data Hasil Perhitungan Variabel Karakter Eksekutif

EBITDA (dalam ribuan)								
KODE	THN	LABA BERSIH	DEPRESIASI	AMORTISASI	BEBAN PAJAK	BUNGA	TOTAL ASSET	EBITDA
ADES	2016	55,951,000	-	-	6,874,000	15,898,000	767,479,000	0.103
	2017	38,242,000	-	-	6,344,000	22,269,000	840,236,000	0.080
	2018	52,958,000	-	-	6,113,000	22,320,000	881,275,000	0.092
	2019	83,885,000	-	-	15,885,000	14,875,000	822,375,000	0.139
	2020	135,789,000	-	-	19,093,000	787,000	958,791,000	0.162
CINT	2016	28,172,913	33,604,590	6,321,938	-	-	399,336,626	0.171
	2017	36,318,872	40,649,971	2,997,246	-	-	476,577,841	0.168
	2018	22,090,078	51,285,698	3,062,572	-	-	491,382,035	0.156
	2019	13,896,350	62,991,404	3,102,095	-	-	521,493,784	0.153
	2020	6,564,977	74,930,618	654,432	-	-	498,020,612	0.165
DLTA	2016	327,047,654	361,525	16,244	-	-	1,197,797,000	0.273
	2017	369,012,853	374,825	17,865	-	-	1,340,842,765	0.276
	2018	441,428,118	391,200	17,865	-	-	1,523,517,170	0.290
	2019	412,437,215	401,840	19,400	-	-	1,425,983,722	0.290
	2020	164,704,480	414,554	22,341	-	-	1,225,580,913	0.135
DVLA	2016	152,083,400	-	-	40,763,252	-	1,531,365,558	0.126
	2017	162,249,293	-	-	53,649,116	-	1,640,886,147	0.132
	2018	162,249,293	-	-	53,649,116	-	1,682,821,739	0.128
	2019	221,783,249	-	-	79,897,505	-	1,829,960,714	0.165
	2020	162,072,984	-	-	57,943,498	-	1,986,711,872	0.111
KINO	2016	181,110,153	-	-	89,613,261	89,716,276	3,284,504,424	0.110
	2017	109,696,001	-	-	54,442,838	70,481,376	3,237,595,219	0.072
	2018	150,116,045	-	-	34,557,803	55,685,895	3,592,164,205	0.067
	2019	515,603,339	-	-	108,800,715	83,254,960	4,695,764,958	0.151

EBITDA (dalam ribuan)								
KODE	THN	LABA BERSIH	DEPRESIASI	AMORTISASI	BEBAN PAJAK	BUNGA	TOTAL ASSET	EBITDA
	2020	113,665,219	-	-	75,294,227	137,913,524	5,255,359,155	0.062
KLBF	2016	2,350,884,933	-	-	752,684,488	28,148,525	15,226,009,210	0.206
	2017	2,453,251,410	-	-	782,316,500	36,391,625	16,616,239,416	0.197
	2018	2,497,261,964	-	-	838,106,813	29,738,266	18,146,206,145	0.185
	2019	2,537,601,823	-	-	839,509,478	40,420,271	20,264,726,862	0.169
	2020	2,799,622,515	-	-	602,524,461	89,580,314	22,564,300,317	0.155
MYOR	2016	1,845,683,269	3,258,953,564	454,641	-	-	12,922,421,859	0.395
	2017	2,168,884,603	3,758,609,581	504,401	-	-	14,915,849,800	0.397
	2018	2,381,942,198	4,296,368,133	881,606	-	-	17,591,706,426	0.380
	2019	2,704,466,581	4,843,364,769	41,793,587	-	-	19,037,918,806	0.399
	2020	2,683,890,279	5,567,196,018	38,070,062	-	-	19,777,500,514	0.419
PEHA	2016	87,002,410	-	-	32,950,941	-	883,288,615	0.136
	2017	125,266,061	-	-	44,721,576	-	1,175,935,585	0.145
	2018	133,292,514	-	-	60,563,286	-	1,868,663,546	0.104
	2019	102,310,124	-	-	26,928,398	-	2,096,719,180	0.062
	2020	48,665,149	-	-	15,418,230	-	1,915,989,375	0.033
PYFA	2016	7,053,407	78,442,888	500,651	-	-	167,062,795	0.515
	2017	9,599,280	85,102,809	1,510,767	-	-	159,563,931	0.603
	2018	11,317,000	88,407,861	2,439,463	-	-	187,057,163	0.546
	2019	12,519,000	91,590,366	3,997,837	-	-	190,786,208	0.567
	2020	29,642,000	88,429,507	6,792,613	-	-	228,575,380	0.546
ROTI	2016	279,777,368	-	-	-	101,019,619	2,919,640,858	0.130
	2017	135,364,021	-	-	-	49,102,534	4,559,573,709	0.040
	2018	127,171,436	-	-	-	20,320,139	4,393,810,380	0.034
	2019	236,518,557	-	-	-	55,180,972	4,682,083,844	0.062

EBITDA (dalam ribuan)								
KODE	THN	LABA BERSIH	DEPRESIASI	AMORTISASI	BEBAN PAJAK	BUNGA	TOTAL ASSET	EBITDA
	2020	168,610,282	-	-		32,380,538	4,452,166,671	0.045
SCPI	2016	134,727,271	-	-	78,811,872	-	1,393,083,772	0.153
	2017	122,515,010	-	-	70,503,742	-	1,354,104,356	0.143
	2018	127,091,642	-	-	57,207,858	-	1,635,702,779	0.113
	2019	112,652,526	-	-	80,799,245	-	1,417,704,185	0.136
	2020	218,362,874	-	-	45,417,067	-	1,598,281,523	0.165
SIDO	2016	480,585,000	-	-	135,684,000	-	2,987,614,000	0.206
	2017	533,799,000	-	-	147,330,000	-	3,158,198,000	0.216
	2018	663,849,000	-	-	189,738,000	-	3,337,628,000	0.256
	2019	807,689,000	-	-	222,621,000	-	3,529,557,000	0.292
	2020	934,016,000	-	-	244,347,000	-	3,849,516,000	0.306
SKBM	2016	30,809,950	109,349,032	184,117	-	-	1,001,657,012	0.140
	2017	31,761,022	142,775,231	395,208	-	-	1,623,027,475	0.108
	2018	20,887,453	177,677,230	3,129,745	-	-	1,771,365,972	0.114
	2019	5,163,201	217,937,736	7,612,887	-	-	1,820,383,352	0.127
	2020	13,568,762	238,853,718	22,506,400	-	-	1,768,660,546	0.155
SKLT	2016	25,166,206	114,688,913	8,831,837	-	-	568,239,939	0.262
	2017	27,370,565	132,108,844	8,679,762	-	-	636,284,210	0.264
	2018	39,567,679	148,713,985	10,828,935	-	-	747,293,725	0.266
	2019	56,782,206	168,120,781	13,523,279	-	-	790,845,543	0.301
	2020	55,673,983	193,528,579	18,190,455	-	-	773,863,042	0.346
STTP	2016	217,746,308	571,760,172	6,540,853	-	-	2,336,411,494	0.341
	2017	288,545,819	638,374,752	11,611,218	-	-	2,342,432,443	0.402
	2018	324,694,650	712,580,377	19,414,173	-	-	2,631,189,810	0.402
	2019	607,043,293	-	27,819,117	-	-	2,881,563,083	0.220

EBITDA (dalam ribuan)								
KODE	THN	LABA BERSIH	DEPRESIASI	AMORTISASI	BEBAN PAJAK	BUNGA	TOTAL ASSET	EBITDA
	2020	773,607,195	-	47,400,433	-	-	3,448,995,059	0.238
TSPC	2016	718,958,200	954,935,748	-	-	-	6,585,807,349	0.254
	2017	744,090,262	1,066,178,320	-	-	-	7,434,900,309	0.243
	2018	727,700,178	1,188,178,684	-	-	-	7,869,975,060	0.243
	2019	796,220,911	1,334,307,001	-	-	-	8,372,769,580	0.254
	2020	1,064,448,534	1,466,495,057	108,644,084	-	-	9,104,657,533	0.290
ULTJ	2016	709,826,000	-	-	253,030,000	2,035,000	4,239,200,000	0.228
	2017	711,681,000	-	-	347,000,000	1,500,000	5,186,940,000	0.204
	2018	701,607,000	-	-	291,922,000	1,247,000	5,555,871,000	0.179
	2019	1,035,865,000	-	-	278,947,000	1,463,000	6,608,422,000	0.199
	2020	1,109,666,000	-	-	321,089,000	27,785,000	8,754,116,000	0.167
WIIM	2016	136,662,997	-	287,877,293	-	-	1,353,634,132	0.314
	2017	54,491,308	-	332,313,345	-	-	1,225,712,093	0.316
	2018	70,730,637	-	379,249,832	-	-	1,225,573,914	0.367
	2019	42,874,167	-	434,730,900	-	-	1,299,521,608	0.368
	2020	215,214,468	-	490,061,944	-	-	1,614,442,007	0.437

EBITDA (dalam jutaan)								
KODE	THN	LABA BERSIH	DEPRESIASI	AMORTISASI	BEBAN PAJAK	BUNGA	TOTAL ASSET	EBITDA
GGRM	2016	6,672,682	-	-	2,405,902	1,190,902	62,951,634,000	0.163
	2017	7,755,347	-	-	2,638,900	800,741	66,759,930,000	0.168
	2018	7,793,068	-	-	2,897,496	677,652	69,097,219,000	0.165
	2019	10,880,704	-	-	3,204,640	585,354	78,647,274,000	0.187
	2020	7,647,729	-	-	2,251,510	382,722	78,191,409,000	0.131
HMSP	2016	12,762,229	-	-	3,826,053	-	42,508,277,000	0.390
	2017	12,670,534	-	-	4,337,944	-	43,141,063,000	0.394
	2018	13,538,418	-	-	4,412,498	-	46,602,420,000	0.385
	2019	13,721,513	-	-	4,630,741	-	50,902,806,000	0.361
	2020	8,581,378	-	-	2,948,120	-	49,674,030,000	0.232

EBITDA				
KODE	THN	TOTAL EBITDA	TOTAL ASSET	EBITDA
CEKA	2016	340,102,000,000	1,425,964,152,418	0.239
	2017	185,233,000,000	1,392,636,444,501	0.133
	2018	161,110,000,000	1,168,956,042,706	0.138
	2019	298,123,000,000	1,393,079,542,074	0.214
	2020	232,021,000,000	1,566,673,828,068	0.148
ICBP	2016	5,617,800,000,000	28,901,948,000, 000	0.194
	2017	6,047,000,000,000	31,619,514,000, 000	0.191
	2018	7,457,200,000,000	34,367,153,000, 000	0.217
	2019	8,605,200,000,000	38,709,314,000, 000	0.222
	2020	10,688,700,000,000	103,588,325,000, 000	0.103
INDF	2016	10,940,100,000,000	82,174,515,000, 000	0.133
	2017	11,392,100,000,000	87,939,488,000, 000	0.130
	2018	12,161,900,000,000	96,537,796,000, 000	0.126
	2019	13,057,300,000,000	96,198,559,000, 000	0.136
	2020	16,543,800,000,000	163,136,516,000, 000	0.101
UNVR	2016	9,258,000,000,000	16,745,695,000, 000	0.553
	2017	10,150,000,000,000	18,906,413,000, 000	0.537
	2018	13,374,000,000,000	20,326,869,000. 000	0.658
	2019	11,250,000,000,000	20,649,371,000, 000	0.545
	2020	10,554,000,000,000	20,534,632,000, 000	0.514

Lampiran 6: Data Hasil Perhitungan Variabel Kepemilikan Institusional

KODE SAHAM	TAHUN	JML. SAHAM INSTITUSIONAL	JML. SAHAM YANG BEREDAR	JML KI
ADES	2016	556,860,623	542,347,113	1.027
	2017	556,860,623	589,896,800	0.944
	2018	556,860,623	589,896,800	0.944
	2019	556,860,623	589,896,800	0.944
	2020	556,860,623	589,896,800	0.944
CEKA	2016	517,771,000	595,000,000	0.870
	2017	517,771,000	595,000,000	0.870
	2018	517,771,000	595,000,000	0.870
	2019	517,771,000	595,000,000	0.870
	2020	517,771,000	595,000,000	0.870
CINT	2016	678,400,000	1,000,000,000	0.678
	2017	678,400,000	1,000,000,000	0.678
	2018	718,990,500	1,000,000,000	0.719
	2019	947,355,488	1,000,000,000	0.947
	2020	947,454,488	1,000,000,000	0.947
DLTA	2016	775,112,200	800,659,050	0.968
	2017	653,907,150	800,659,050	0.817
	2018	773,738,350	800,659,050	0.966
	2019	773,424,450	800,659,050	0.966
	2020	770,693,850	800,659,050	0.963
DVLA	2016	1,031,800,912	1,120,000,000	0.921
	2017	1,056,262,772	1,120,000,000	0.943
	2018	1,049,888,072	1,120,000,000	0.937
	2019	1,048,606,572	1,120,000,000	0.936
	2020	1,048,335,672	1,120,000,000	0.936
GGRM	2016	1,829,807,688	1,924,088,000	0.951
	2017	1,831,731,776	1,924,088,000	0.952
	2018	1,875,985,800	1,924,088,000	0.975
	2019	1,850,972,656	1,924,088,000	0.962
	2020	1,802,870,456	1,924,088,000	0.937

KODE SAHAM	TAHUN	JML. SAHAM INSTITUSIONAL	JML. SAHAM YANG BEREDAR	JML KI
HMSP	2016	114,922,259,977	116,318,076,900	0.989
	2017	115,012,225,282	116,318,076,900	0.989
	2018	114,938,701,302	116,318,076,900	0.988
	2019	113,893,895,098	116,318,076,900	0.979
	2020	111,950,118,698	116,318,076,900	0.962
ICBP	2016	9,391,678,000	11,661,908,000	0.805
	2017	9,391,678,000	11,661,908,000	0.805
	2018	9,391,678,000	11,661,908,000	0.805
	2019	9,391,678,000	11,661,908,000	0.805
	2020	9,391,678,000	11,661,908,000	0.805
INDF	2016	4,396,103,450	8,780,426,500	0.501
	2017	4,396,103,450	8,780,426,500	0.501
	2018	4,396,103,450	8,780,426,500	0.501
	2019	4,396,103,450	8,780,426,500	0.501
	2020	4,396,103,450	8,780,426,500	0.501
KLBF	2016	45,863,802,855	46,875,122,110	0.978
	2017	26,614,076,385	46,875,122,110	0.568
	2018	26,702,656,085	46,875,122,110	0.570
	2019	26,702,830,685	46,875,122,110	0.570
	2020	43,672,145,710	46,875,122,110	0.932
KINO	2016	1,253,245,100	1,428,571,500	0.877
	2017	1,255,892,500	1,428,571,500	0.879
	2018	1,248,761,600	1,428,571,500	0.874
	2019	1,262,071,600	1,428,571,500	0.883
	2020	1,227,059,700	1,428,571,500	0.859
MYOR	2016	13,207,471,430	22,358,699,725	0.591
	2017	13,207,471,430	22,358,699,725	0.591
	2018	13,207,471,430	22,358,699,725	0.591
	2019	13,207,471,430	22,358,699,725	0.591
	2020	13,207,471,430	22,358,699,725	0.591

KODE SAHAM	TAHUN	JML. SAHAM INSTITUSIONAL	JML. SAHAM YANG BEREDAR	JML KI
PEHA	2016	476,901,860	840,000,000	0.568
	2017	476,901,860	840,000,000	0.568
	2018	476,901,860	840,000,000	0.568
	2019	476,901,860	840,000,000	0.568
	2020	476,901,860	840,000,000	0.568
PYFA	2016	288,119,974	535,080,000	0.538
	2017	288,119,974	535,080,000	0.538
	2018	288,119,974	535,080,000	0.538
	2019	288,119,974	535,080,000	0.538
	2020	371,018,312	535,080,000	0.693
ROTI	2016	3,511,223,500	5,061,800,000	0.694
	2017	4,523,028,207	6,186,488,888	0.731
	2018	4,523,028,207	6,186,488,888	0.731
	2019	6,138,575,329	6,186,488,888	0.992
	2020	6,138,575,329	6,186,488,888	0.992
SCPI	2016	3,558,986	3,600,000	0.989
	2017	3,558,986	3,600,000	0.989
	2018	3,558,986	3,600,000	0.989
	2019	3,558,986	3,600,000	0.989
	2020	3,558,986	3,600,000	0.989
SIDO	2016	12,150,000,000	15,000,000,000	0.810
	2017	12,150,000,000	15,000,000,000	0.810
	2018	12,150,000,000	15,000,000,000	0.810
	2019	14,458,675,519	15,000,000,000	0.964
	2020	28,520,598,188	30,000,000,000	0.951
SKBM	2016	755,074,606	936,530,894	0.806
	2017	1,429,025,332	1,726,003,217	0.828
	2028	1,429,025,332	1,726,003,217	0.828
	2019	1,429,025,332	1,726,003,217	0.828
	2020	1,429,025,332	1,726,003,217	0.828
SKLT	2016	675,094,100	690,740,500	0.977
	2017	580,615,000	690,740,500	0.841
	2018	580,615,000	690,740,500	0.841

KODE SAHAM	TAHUN	JML. SAHAM INSTITUSIONAL	JML. SAHAM YANG BEREDAR	JML KI
	2019	675,095,800	690,740,500	0.977
	2020	582,852,200	690,740,500	0.844
STTP	2016	743,600,500	1,310,000,000	0.568
	2017	743,600,500	1,310,000,000	0.568
	2018	743,600,500	1,310,000,000	0.568
	2019	832,424,100	1,310,000,000	0.635
	2020	832,424,100	1,310,000,000	0.635
TSPC	2016	3,528,900,000	4,500,000,000	0.784
	2017	3,528,900,000	4,500,000,000	0.784
	2018	3,835,800,000	4,500,000,000	0.852
	2019	3,835,800,000	4,500,000,000	0.852
	2020	4,391,698,458	4,500,000,000	0.976
ULTJ	2016	1,071,448,000	2,888,000,000	0.371
	2017	4,258,067,200	11,552,000,000	0.369
	2018	4,193,376,000	11,552,000,000	0.363
	2019	4,203,338,260	11,552,000,000	0.364
	2020	2,123,271,600	10,398,000,000	0.204
UNVR	2016	7,545,510,194	7,630,000,000	0.989
	2017	7,555,834,685	7,630,000,000	0.990
	2018	7,186,382,680	7,630,000,000	0.942
	2019	7,535,624,839	7,630,000,000	0.988
	2020	37,484,602,729	38,150,000,000	0.983
WIIM	2016	925,997,450	2,099,873,800	0.441
	2017	799,938,643	2,099,873,800	0.381
	2018	799,938,643	2,099,873,800	0.381
	2019	799,938,643	2,099,873,800	0.381
	2020	782,538,643	2,099,873,800	0.373

Lampiran 7: Data Hasil Perhitungan Variabel Dewan Komisaris

KODE SAHAM	TAHUN	DEWAN KOMISARIS
ADES	2016	3
	2017	3
	2018	3
	2019	3
	2020	3
CEKA	2016	4
	2017	4
	2018	4
	2019	4
	2020	3
CINT	2016	2
	2017	2
	2018	2
	2019	2
	2020	3
DLTA	2016	3
	2017	3
	2018	3
	2019	3
	2020	5
DVLA	2016	7
	2017	7
	2018	7
	2019	8
	2020	8
GGRM	2016	9
	2017	9
	2018	10
	2019	7
	2020	4
HMSP	2016	7
	2017	7

KODE SAHAM	TAHUN	DEWAN KOMISARIS
	2018	7
	2019	7
	2020	4
ICBP	2016	3
	2017	3
	2018	3
	2019	3
	2020	6
INDF	2016	3
	2017	3
	2018	3
	2019	3
	2020	8
KLBF	2016	5
	2017	5
	2018	5
	2019	5
	2020	7
KINO	2016	3
	2017	3
	2018	3
	2019	3
	2020	4
MYOR	2016	5
	2017	5
	2018	5
	2019	5
	2020	5
PEHA	2016	4
	2017	4
	2018	4
	2019	4
	2020	4

KODE SAHAM	TAHUN	DEWAN KOMISARIS
PYFA	2016	4
	2017	4
	2018	4
	2019	4
	2020	4
ROTI	2016	3
	2017	3
	2018	3
	2019	3
	2020	3
SCPI	2016	3
	2017	3
	2018	3
	2019	3
	2020	3
SIDO	2016	3
	2017	3
	2018	5
	2019	5
	2020	6
SKBM	2016	3
	2017	3
	2018	3
	2019	3
	2020	3
SKLT	2016	3
	2017	3
	2018	3
	2019	3
	2020	3
STTP	2016	2
	2017	2
	2018	2

KODE SAHAM	TAHUN	DEWAN KOMISARIS
	2019	2
	2020	2
TSPC	2016	6
	2017	5
	2018	3
	2019	5
	2020	5
ULTJ	2016	3
	2017	3
	2018	3
	2019	4
	2020	4
UNVR	2016	5
	2017	5
	2018	5
	2019	5
	2020	6
WIIM	2016	3
	2017	3
	2018	3
	2019	3
	2020	3

Lampiran 8: Hasil Perhitungan Variabel *Tax Avoidance*

KODE SAHAM	TAHUN	PEMBAYARAN PAJAK	LABA SEBELUM PAJAK	CETR
ADES	2016	6,874,000,000	61,636,000,000	0.112
	2017	6,344,000,000	51,095,000,000	0.124
	2018	6,113,000,000	70,060,000,000	0.087
	2019	15,885,000,000	110,179,000,000	0.144
	2020	19,093,000,000	167,919,000,000	0.114
CEKA	2016	71,741,157,316	285,827,837,455	0.251
	2017	48,635,458,386	143,195,939,366	0.340
	2018	13,897,283,933	123,394,812,359	0.113
	2019	51,024,771,845	285,132,249,695	0.179
	2020	68,470,778,126	232,864,791,126	0.294
CINT	2016	9,704,163,694	28,172,913,292	0.344
	2017	9,531,314,784	38,318,872,398	0.249
	2018	10,193,052,028	22,090,078,956	0.461
	2019	5,806,389,546	13,896,350,693	0.418
	2020	5,812,915,030	6,564,977,193	0.885
DLTA	2016	85,426,694,000	327,047,654,000	0.261
	2017	95,717,980,000	369,012,853,000	0.259
	2018	94,339,700,000	441,428,118,000	0.214
	2019	87,631,571,000	412,437,215,000	0.212
	2020	59,940,288,000	164,704,480,000	0.364
DVLA	2016	40,763,252,000	214,417,056,000	0.190
	2017	53,649,116,000	226,147,921,000	0.237
	2018	76,348,303,000	272,843,904,000	0.280
	2019	79,897,505,000	301,250,035,000	0.265
	2020	57,943,498,000	214,069,167,000	0.271
GGRM	2016	2,405,902,000,000	8,931,136,000,000	0.269
	2017	2,638,900,000,000	10,436,512,000,000	0.253
	2018	2,897,496,000,000	10,479,242,000,000	0.276
	2019	3,204,640,000,000	14,487,736,000,000	0.221
	2020	2,251,510,000,000	9,663,133,000,000	0.233

KODE SAHAM	TAHUN	PEMBAYARAN PAJAK	LABA SEBELUM PAJAK	CETR
HMSP	2016	3,826,053,000,000	17,011,447,000,000	0.225
	2017	4,337,944,000,000	16,894,806,000,000	0.257
	2018	4,412,498,000,000	17,961,269,000,000	0.246
	2019	4,630,741,000,000	18,259,423,000,000	0.254
	2020	2,948,120,000,000	11,161,466,000,000	0.264
ICBP	2016	1,530,642,000,000	4,989,254,000,000	0.307
	2017	1,862,383,000,000	5,206,561,000,000	0.358
	2018	2,005,525,000,000	6,446,785,000,000	0.311
	2019	1,615,934,000,000	7,436,972,000,000	0.217
	2020	1,684,628,000,000	9,958,647,000,000	0.169
INDF	2016	2,678,358,000,000	7,385,228,000,000	0.363
	2017	3,422,799,000,000	7,658,554,000,000	0.447
	2018	3,460,973,000,000	7,446,966,000,000	0.465
	2019	2,361,672,000,000	8,749,397,000,000	0.270
	2020	2,784,615,000,000	12,426,334,000,000	0.224
KLBF	2016	752,684,488,364	3,091,188,460,230	0.243
	2017	782,316,500,559	3,241,186,725,992	0.241
	2018	838,106,813,718	3,306,399,669,021	0.253
	2019	839,509,478,376	3,402,616,824,533	0.247
	2020	602,524,461,985	3,627,632,574,744	0.166
KINO	2016	89,613,261,669	219,312,978,691	0.409
	2017	54,442,838,200	140,964,951,060	0.386
	2018	34,557,803,047	200,385,373,873	0.172
	2019	108,800,715,984	636,096,776,179	0.171
	2020	75,294,227,229	135,159,940,052	0.557
MYOR	2016	535,595,541,066	1,845,683,269,238	0.290
	2017	588,507,286,754	2,168,884,603,474	0.271
	2018	724,353,877,022	2,381,942,198,855	0.304
	2019	548,485,380,356	2,704,466,581,011	0.203
	2020	616,475,395,467	2,683,890,279,936	0.230
PEHA	2016	32,950,941,000	121,735,514,000	0.271
	2017	44,721,576,000	171,348,190,000	0.261
	2018	60,563,286,000	177,569,720,000	0.341

KODE SAHAM	TAHUN	PEMBAYARAN PAJAK	LABA SEBELUM PAJAK	CETR
	2019	26,928,398,000	129,656,515,000	0.208
	2020	15,418,230,000	64,083,379,000	0.241
PYFA	2016	2,274,563,489	7,053,407,169	0.322
	2017	2,094,731,164	9,599,280,773	0.218
	2018	2,961,618,997	11,317,263,776	0.262
	2019	3,136,873,781	12,519,000,000	0.251
	2020	4,303,412,969	29,642,000,000	0.145
	ROTI	2016	101,019,619,984	369,416,841,698
2017		49,102,534,677	186,147,334,530	0.264
2018		20,320,139,824	186,936,324,915	0.109
2019		55,180,972,607	347,098,820,613	0.159
2020		32,380,538,836	168,610,282,478	0.192
SCPI	2016	78,811,872,000	223,074,487,000	0.353
	2017	70,503,742,000	180,641,570,000	0.390
	2018	57,207,858,000	193,103,981,000	0.296
	2019	80,799,245,000	181,987,452,000	0.444
	2020	45,417,067,000	288,685,180,000	0.157
SIDO	2016	135,684,000,000	629,082,000,000	0.216
	2017	147,330,000,000	681,889,000,000	0.216
	2018	332,707,000,000	867,837,000,000	0.383
	2019	222,621,000,000	1,073,835,000,000	0.207
	2020	244,347,000,000	1,199,548,000,000	0.204
SKBM	2016	12,702,356,112	30,809,950,308	0.412
	2017	13,706,785,039	31,761,022,154	0.432
	2018	10,858,232,331	20,887,453,647	0.520
	2019	11,849,753,949	5,163,201,735	2.295
	2020	11,582,613,128	13,568,762,041	0.854
SKLT	2016	8,026,883,297	25,166,206,536	0.319
	2017	8,237,550,980	27,370,565,356	0.301
	2018	6,739,406,776	39,567,679,343	0.170
	2019	14,650,111,931	56,782,206,578	0.258
	2020	9,276,903,406	55,673,983,557	0.167

KODE SAHAM	TAHUN	PEMBAYARAN PAJAK	LABA SEBELUM PAJAK	CETR
STTP	2016	45,345,049,181	217,746,308,540	0.208
	2017	56,025,801,109	208,055,960,323	0.269
	2018	74,120,550,861	258,823,281,509	0.286
	2019	92,823,915,898	607,043,293,422	0.153
	2020	115,958,847,906	773,607,195,121	0.150
TSPC	2016	466,394,302,993	718,958,200,369	0.649
	2017	538,603,804,385	744,090,262,873	0.724
	2018	526,447,491,388	727,700,178,905	0.723
	2019	608,007,758,084	796,220,911,472	0.764
	2020	521,052,950,620	1,064,448,534,874	0.490
ULTJ	2016	253,030,000,000	932,483,000,000	0.271
	2017	347,000,000,000	1,026,231,000,000	0.338
	2018	291,922,000,000	949,018,000,000	0.308
	2019	278,947,000,000	1,375,359,000,000	0.203
	2020	321,089,000,000	1,421,517,000,000	0.226
UNVR	2016	2,066,894,000,000	8,571,885,000,000	0.241
	2017	2,406,049,000,000	9,371,661,000,000	0.257
	2018	2,340,586,000,000	12,148,087,000,000	0.193
	2019	3,120,471,000,000	9,901,772,000,000	0.315
	2020	1,693,036,000,000	9,206,869,000,000	0.184
WIIM	2016	45,325,281,371	136,662,997,252	0.332
	2017	31,638,662,019	54,491,308,212	0.581
	2018	18,067,051,524	70,730,637,719	0.255
	2019	14,976,706,662	42,874,167,628	0.349
	2020	14,115,264,412	215,214,468,586	0.066

Lampiran 9: Data Hasil Perhitungan Karakter Eksekutif

No	Kode	Karakter Eksekutif					Mean
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	ADES	0.103	0.080	0.092	0.139	0.162	0.115
2	CEKA	0.239	0.133	0.138	0.214	0.148	0.174
3	CINT	0.171	0.168	0.156	0.153	0.165	0.162
4	DLTA	0.273	0.276	0.290	0.290	0.135	0.253
5	DVLA	0.126	0.132	0.128	0.165	0.111	0.132
6	GGRM	0.163	0.168	0.165	0.187	0.131	0.163
7	HMSP	0.390	0.394	0.385	0.361	0.232	0.352
8	ICBP	0.194	0.191	0.217	0.222	0.103	0.186
9	INDF	0.133	0.130	0.126	0.136	0.101	0.125
10	KLBF	0.206	0.197	0.185	0.169	0.155	0.182
11	KINO	0.110	0.072	0.067	0.151	0.062	0.092
12	MYOR	0.395	0.397	0.380	0.399	0.419	0.398
13	PEHA	0.136	0.145	0.104	0.062	0.033	0.096
14	PYFA	0.515	0.603	0.546	0.567	0.546	0.555
15	ROTI	0.130	0.040	0.034	0.062	0.045	0.062
16	SCPI	0.153	0.143	0.113	0.136	0.165	0.142
17	SIDO	0.206	0.216	0.256	0.292	0.306	0.255
18	SKBM	0.140	0.108	0.114	0.127	0.155	0.129
19	SKLT	0.262	0.264	0.266	0.301	0.346	0.288
20	STTP	0.341	0.402	0.402	0.220	0.238	0.320
21	TSPC	0.254	0.243	0.243	0.254	0.290	0.257
22	ULTJ	0.228	0.204	0.179	0.199	0.167	0.195
23	UNVR	0.553	0.537	0.658	0.545	0.514	0.561
24	WIIM	0.314	0.316	0.367	0.368	0.437	0.360
Min		0.088	0.040	0.034	0.040	0.033	0.060
Max		1.009	1.101	0.975	0.567	0.546	0.670
Mean		0.264	0.258	0.269	0.246	0.205	0.248
Std. Deviasi		0.192	0.219	0.218	0.143	0.142	0.161

Lampiran 10: Data Hasil Penghitungan Kepemilikan Instiitusal

No	Kode	Kepemilikan Instiitusal					Mean
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	ADES	1,027	0,944	0,944	0,944	0,944	0.961
2	CEKA	0,870	0,870	0,870	0,870	0,870	0.870
3	CINT	0,678	0,678	0,719	0,947	0,947	0.794
4	DLTA	0,968	0,817	0,966	0,965	0,962	0.936
5	DVLA	0,921	0,943	0,937	0,936	0,936	0.935
6	GGRM	0,951	0,952	0,975	0,962	0,937	0.955
7	HMSP	0,988	0,989	0,988	0,979	0,962	0.981
8	ICBP	0,805	0,805	0,805	0,805	0,805	0.805
9	INDF	0,501	0,501	0,501	0,501	0,501	0.501
10	KLBF	0,978	0,568	0,570	0,570	0,932	0.723
11	KINO	0,877	0,879	0,874	0,883	0,859	0.875
12	MYOR	0,591	0,591	0,591	0,591	0,591	0.591
13	PEHA	0,568	0,568	0,568	0,568	0,568	0.568
14	PYFA	0,538	0,538	0,538	0,538	0,693	0.569
15	ROTI	0,694	0,731	0,731	0,992	0,992	0.828
16	SCPI	0,989	0,989	0,989	0,989	0,989	0.989
17	SIDO	0,810	0,810	0,810	0,964	0,951	0.869
18	SKBM	0,806	0,828	0,828	0,828	0,828	0.824
19	SKLT	0,977	0,841	0,841	0,977	0,844	0.896
20	STTP	0,568	0,568	0,568	0,635	0,635	0.595
21	TSPC	0,784	0,784	0,852	0,852	0,976	0.850
22	ULTJ	0,371	0,369	0,363	0,364	0,204	0.334
23	UNVR	0,989	0,990	0,942	0,988	0,983	0.978
24	WIIM	0,441	0,381	0,381	0,381	0,373	0.391
	Min	0,371	0,369	0,363	0,364	0,204	0.334
	Max	1,027	0,990	0,989	1,000	0,992	1,000
	Mean	0,790	0,762	0,771	0,810	0,818	0.790
	Standar Deviasi	0,194	0,188	0,192	0,206	0,208	0.198

Lampiran 11: Data Hasil Perhitungan Dewan Komisaris

No	Kode	Dewan Komisaris					Mean
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	ADES	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
2	CEKA	4.00	4.00	4.00	4.00	3.00	3.80
3	CINT	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	2.20
4	DLTA	3.00	3.00	3.00	3.00	5.00	3.40
5	DVLA	7.00	7.00	7.00	8.00	8.00	7.40
6	GGRM	9.00	9.00	10.00	7.00	4.00	7.80
7	HMSP	7.00	7.00	7.00	7.00	4.00	6.40
8	ICBP	3.00	3.00	3.00	3.00	6.00	3.60
9	INDF	3.00	3.00	3.00	3.00	8.00	4,00
10	KLBF	5.00	5.00	5.00	5.00	7.00	5.40
11	KINO	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	3.20
12	MYOR	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
13	PEHA	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
14	PYFA	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
15	ROTI	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
16	SCPI	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
17	SIDO	3.00	3.00	5.00	5.00	6.00	4.40
18	SKBM	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
19	SKLT	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
20	STTP	2.00	2,00	2.00	2.00	2.00	2.00
21	TSPC	6.00	5.00	3.00	5.00	5.00	4.80
22	ULTJ	3.00	3.00	3.00	4.00	4.00	3.40
23	UNVR	5.00	5.00	5.00	5.00	6.00	5.20
24	WIIM	3.00	3.00	3.00	3.00	300	3.00
Min		2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
Max		9.00	9.00	10.00	8.00	8.00	7.80
Mean		4.107	4.071	4.071	4.178	4.464	4.178
Std. Deviasi		1.770	1.720	1.803	1.700	1.666	1.545

Lampiran 12: Data Hasil Perhitungan *Tax Avoidance* (Penghindaran Pajak)

No	Kode	<i>Tax Avoidance</i>					Mean
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	ADES	0.112	0.124	0.087	0.144	0.114	0.116
2	CEKA	0.251	0.340	0.113	0.179	0.294	0.235
3	CINT	0.344	0.249	0.461	0.418	0.885	0.472
4	DLTA	0.261	0.259	0.214	0.212	0.364	0.262
5	DVLA	0.190	0.237	0.280	0.265	0.271	0.249
6	GGRM	0.269	0.253	0.276	0.221	0.233	0.251
7	HMSP	0.225	0.257	0.246	0.254	0.264	0.249
8	ICBP	0.307	0.358	0.311	0.217	0.169	0.272
9	INDF	0.363	0.447	0.465	0.270	0.224	0.354
10	KLBF	0.243	0.241	0.253	0.247	0.166	0.230
11	KINO	0.409	0.386	0.172	0.171	0.557	0.339
12	MYOR	0.290	0.271	0.304	0.203	0.30	0.260
13	PEHA	0.271	0.261	0.341	0.208	0.241	0.264
14	PYFA	0.322	0.218	0.262	0.251	0.145	0.240
15	ROTI	0.273	0.264	0.109	0.159	0.192	0.199
16	SCPI	0.353	0.390	0.296	0.444	0.157	0.328
17	SIDO	0.216	0.216	0.383	0.207	0.204	0.245
18	SKBM	0.412	0.432	0.520	2.295	0.854	0.902
19	SKLT	0.319	0.301	0.170	0.258	0.167	0.243
20	STTP	0.208	0.269	0.286	0.153	0.150	0.213
21	TSPC	0.649	0.724	0.723	0.764	0.490	0.670
22	ULTJ	0.271	0.338	0.308	0.203	0.226	0.269
23	UNVR	0.241	0.257	0.193	0.315	0.184	0.238
24	WIIM	0.332	0.581	0.255	0.349	0.066	0.317
Min		0.112	0.124	0.087	0.144	0.066	0.116
Max		0.649	0.724	1.364	5.726	0.885	1.405
Mean		0.290	0.311	0.333	0.643	0.305	0.376
Std. Deviasi		0.100	0.125	0.246	1.202	0.224	0.290

Lampiran 13: Hasil Output SPSS

Hasil Uji Statistik Deskriptif

Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics			
	Mean	Std. Deviation	N
TA (CETR)	.29850	.157880	120
KE	.23158	.138507	120
KI	.77573	.202181	120
DK	4.0833	1.68824	120

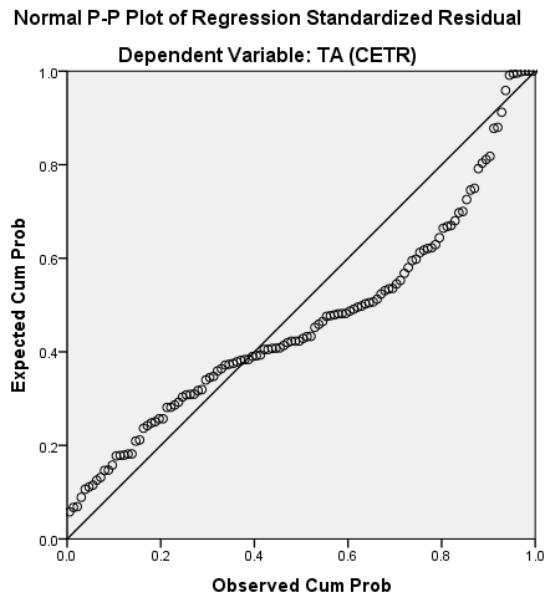
Hasil Uji Analisis Korelasi

Analisis Korelasi

Correlations					
		KE	KI	DK	TA (CETR)
KE	Pearson Correlation	1	-.141	.109	-.111
	Sig. (2-tailed)		.125	.237	.229
	N	120	120	120	120
KI	Pearson Correlation	-.141	1	.107	-.063
	Sig. (2-tailed)	.125		.243	.493
	N	120	120	120	120
DK	Pearson Correlation	.109	.107	1	-.097
	Sig. (2-tailed)	.237	.243		.290
	N	120	120	120	120
TA (CETR)	Pearson Correlation	-.111	-.063	-.097	1
	Sig. (2-tailed)	.229	.493	.290	
	N	120	120	120	120

Hasil Uji Normalitas P-Plot

Uji Normalitas



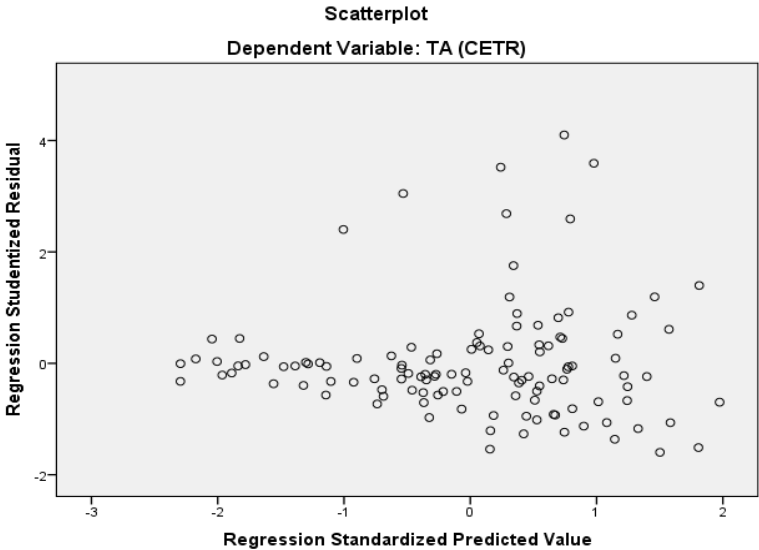
Hasil Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	.401	.071		5.675	.000		
	KE	-.128	.106	-.112	-1.201	.232	.965	1.037
	KI	-.055	.073	-.071	-.757	.450	.965	1.036
	DK	-.007	.009	-.078	-.835	.405	.973	1.028

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas



Hasil Uji Autokorelasi Durbin Watson

Uji Autokorelasi

Model Summary^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.156 ^a	.024	-.001	.157941	2.235

Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.401	.071		5.675	.000
	KE	-.128	.106	-.112	-1.201	.232
	KI	-.055	.073	-.071	-.757	.450
	DK	-.007	.009	-.078	-.835	.405

Hasil Uji Statistik F

Uji Statistik F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.073	3	.024	.969	.410 ^b
	Residual	2.894	116	.025		
	Total	2.966	119			

Hasil Uji Statistik t

Uji Parsial (Uji t)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.401	.071		5.675	.000
	KE	-.128	.106	-.112	-1.201	.232
	KI	-.055	.073	-.071	-.757	.450
	DK	-.007	.009	-.078	-.835	.405

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.156 ^a	.024	-.001	.157941

Lampiran 14: Profil Singkat Perusahaan

1. PT Akasha Wira International, Tbk

Didirikan dengan nama PT Alfindo Putra Setia pada tahun 1985. Nama perseroan telah diubah beberapa kali, hingga terakhir pada tahun 2010 menjadi PT Akasha Wira International, Tbk yang digunakan hingga saat ini. PT Akasha Wira Internasional memiliki 3 bidang usaha, yaitu (1) Industri Air Kemasan, (2) Industri Minuman, dan (3) Industri Kosmetik.

2. PT Kalbe Farma Tbk

Didirikan pada tahun 1966 dengan visi menjadi perusahaan produk kesehatan terbaik dengan skala internasional. Dengan modal dasar sebesar Rp850,000,000,000, PT Kalbe Farma memperluas kegiatan usahanya menjadi penyedia solusi kesehatan terintegrasi melalui 4 divisi usahanya yaitu (1) divisi obat resep, (2) divisi produk kesehatan (3) divisi nutrisi, serta (4) divisi distribusi dan logistik.

3. PT Unilever Indonesia Tbk

Berawal dengan pendirian Lever's Zeepfabrieken N.V pada tanggal 5 Desember 1933. Di tahun 1980, Perseroan berganti nama menjadi PT Unilever Indonesia, sebagaimana tercatat dalam akta No. 171 oleh notaris Kartini Muljadi, S.H., tanggal 22 Juli 1980. Pada tanggal 30 Juni 1997, Perseroan mengalami perubahan nama menjadi PT Unilever Indonesia Tbk. Bisnis perusahaan dibagi ke dalam dua divisi utama, yaitu: Home and Beauty Personal Care, dan Foods and Refreshment. Produk yang dihasilkan berupa barang-barang konsumsi, seperti sabun, deterjen, bumbu-bumbu masak, kecap, minuman berbahan teh dan sari buah serta es krim.

Lampiran 15: Laporan Keuangan Perusahaan

PT Akasha Wira International (ADES)

Ikhtisar Keuangan Financial Highlights

Uraian	2020	2019 ^a	2018	2017	2016	Description
Penjualan Bersih	673.364	764.703	804.302	814.490	887.663	Net Sales
Beban Pokok Penjualan	(330.799)	(417.281)	(415.212)	(375.546)	(427.828)	Cost of Goods Sold
Laba Kotor	342.565	347.422	389.090	438.944	459.835	Gross Profit
Beban Usaha	(166.137)	(218.733)	(305.420)	(371.628)	(383.242)	Operating Expense
Laba Usaha	176.428	128.689	83.670	67.316	76.593	Operating Income
Penghasilan (Beban) Lain-lain, Bersih	(8.509)	(18.510)	(13.609)	(16.221)	(14.957)	Other Income - Net
Laba sebelum Pajak Penghasilan	167.919	110.179	70.060	51.095	61.636	Income before Income Tax
Laba Bersih	135.789	83.885	52.958	38.242	55.951	Net Income
Laba Bersih yang dapat Diatribusikan kepada Entitas Induk	135.789	83.885	52.958	38.242	55.951	Net Income Attributable to Parent Entity
Laba Bersih yang dapat Diatribusikan kepada Kepentingan Non-Pengendali	-	-	-	-	-	Net Income Attributable to Non Controlling Interest
Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan	135.765	86.023	58.903	38.623	56.019	Total Comprehensive Income For The Year
Laba Komprehensif yang dapat Diatribusikan kepada Entitas Induk	135.765	86.023	58.903	38.623	56.019	Comprehensive Income Attributable to Parent Entity
Laba Komprehensif yang dapat Diatribusikan kepada Kepentingan Non-Pengendali	-	-	-	-	-	Comprehensive Income Attributable to Non Controlling Interest
Jumlah Saham Beredar (dalam angka penuh)	589.896.800	589.896.800	589.896.800	589.896.800	589.896.800	Number of Outstanding Shares (full amount)
Laba Bersih per saham	230	142	90	65	95	Net Income per share
Modal Kerja Bersih	361.680	175.929	101.741	49.356	124.148	Net Working Capital
Aset Lancar	545.239	351.120	364.138	294.244	319.614	Current Assets
Aset Tetap - Bersih	351.626	405.448	447.249	478.184	374.177	Fixed Assets - Net
Aset Tidak Lancar Lain	61.926	65.807	69.888	67.808	73.688	Other Non-Current Assets
Jumlah Aset	958.791	822.375	881.274	840.236	767.479	Total Assets
Liabilitas Jangka Pendek	183.559	175.191	262.396	244.888	195.466	Current Liabilities
Liabilitas Pajak Tanggungan - Bersih	20.762	25.819	18.563	9.458	3.492	Deferred Tax Liabilities - Net
Liabilitas Jangka Panjang Lain	53.962	53.428	118.400	162.879	184.133	Other Non-Current Liabilities
Jumlah Liabilitas	258.283	254.438	399.360	417.225	383.091	Total Liabilities
Jumlah Ekuitas	700.508	567.937	481.914	423.011	384.388	Total Equity
Rasio-rasio						Key Ratios
Laba Bersih terhadap Jumlah Aset	14%	10%	6%	5%	7%	Net Income to Total Assets
Laba Bersih terhadap Jumlah Ekuitas	19%	15%	11%	9%	15%	Net Income to Total Equity
Rasio Lancar	2,97	2,00	1,39	1,20	1,64	Current Ratio
Jumlah Liabilitas terhadap Jumlah Ekuitas	0,37	0,45	0,83	0,99	1,00	Total Liabilities to Total Equity
Jumlah Liabilitas terhadap Jumlah Aset	0,27	0,31	0,45	0,50	0,50	Total Liabilities to Total Assets
Laba Kotor terhadap Penjualan Bersih	51%	45%	48%	54%	52%	Gross Profit to Net Sales
Laba Usaha terhadap Penjualan Bersih	26%	17%	10%	8%	9%	Operating Income to Net Sales
Laba Bersih terhadap Penjualan Bersih	20%	11%	7%	5%	6%	Net Income to Net Sales

^a) Disajikan kembali

^a) Restated

PT Kalbe Farma (KLBF)

Mengatasi Tantangan, Meraih Peluang // Weathering Challenges, Capturing Opportunities

Ikhtisar Keuangan Financial Highlights

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Consolidated Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income

Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain	2020	2019	2018	2017	2016	In million of Rupiah, unless otherwise stated
Penjualan Neto	23,112,655	22,633,476	21,074,306	20,182,120	19,374,231	Net Sales
Laba Bruto	10,246,322	10,243,468	9,847,926	9,812,283	9,487,968	Gross Profit
Laba sebelum Beban Pajak Penghasilan	3,627,633	3,402,617	3,306,400	3,241,187	3,091,188	Income before Income Tax Expense
Laba Tahun Berjalan	2,799,623	2,537,602	2,497,262	2,453,251	2,350,885	Income for the Year
Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada:						Income for the Year Attributable to:
Pemilik Entitas Induk	2,733,260	2,506,765	2,457,129	2,403,606	2,299,833	Owners of the Parent Company
Kepentingan Non-pengendali	66,363	30,837	40,133	49,645	51,150	Non-controlling Interests
Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan	2,865,987	2,513,242	2,552,707	2,442,945	2,353,924	Total Comprehensive Income for the Year
Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada:						Total Comprehensive Income for the Year Attributable to:
Pemilik Entitas Induk	2,797,950	2,482,456	2,510,651	2,392,807	2,302,751	Owners of the Parent Company
Kepentingan Non-pengendali	68,037	30,786	42,056	50,138	51,173	Non-controlling Interests
Rata-Rata Tertimbang Jumlah Saham yang Beredar* (dalam jutaan saham)	46,873	46,875	46,875	46,875	46,875	Weighted Average Number of Shares Outstanding* (in million of shares)
Laba per Saham Dasar yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk (Rp)	58.31	53.48	52.42	51.28	49.06	Basic Earnings per Share Attributable to Owners of the Parent Company (Rp)

* setelah dikurangi saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan sebesar 2.175.000
after deducting the shares that have been bought back by the Company in the amount of 2,175,000

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Consolidated Statements of Financial Position

Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain	2020	2019	2018	2017	2016	In million of Rupiah, unless otherwise stated
Total Aset	22,564,300	20,264,727	18,146,206	16,616,239	15,226,009	Total Assets
Investasi pada Entitas Asosiasi	49,635	27,937	22,802	25,476	41,781	Investment in Associates Entities
Total Aset Lancar	13,075,332	11,222,491	10,648,288	10,042,739	9,572,530	Total Current Assets
Total Liabilitas	4,288,218	3,559,144	2,851,611	2,722,208	2,762,162	Total Liabilities
Utang Bank	1,067,162	816,709	356,089	315,780	279,635	Bank Loans
Total Liabilitas Jangka Pendek	3,176,726	2,577,109	2,286,167	2,227,336	2,317,162	Total Current Liabilities
Modal Kerja Bersih	9,898,606	8,645,382	8,362,121	7,815,403	7,255,368	Net Working Capital
Ekuitas, Neto	18,276,082	16,705,582	15,294,595	13,894,032	12,463,847	Equity, Net

Angka-angka pada seluruh tabel dan grafik dalam Laporan Tahunan ini menggunakan notasi Bahasa Inggris
Numerical notations in all tables and graphs in this Annual Report are presented in English

PT Unilever (UNVR)

IKHTISAR UTAMA

Ikhtisar Keuangan Financial Highlights

LAPORAN LABA RUGI DAN PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME

Dalam miliar Rupiah, kecuali dinyatakan lain						In billion rupiah, unless otherwise stated
Keterangan	2020	2019	2018	2017	2016	Description
Penjualan Bersih	42,972	42,923	41,802	41,205	40,054	Net Sales
Harga Pokok Penjualan	(20,515)	(20,894)	(20,697)	(19,985)	(19,595)	Cost of Goods Sold
Laba Bruto	22,457	22,029	21,105	21,220	20,459	Gross Profit
Beban Usaha	(13,006)	(11,908)	(8,781)	(11,724)	(11,751)	Operating Expenses
Laba Usaha	9,451	10,121	12,324	9,496	8,708	Operating Profit
Laba sebelum Pajak Penghasilan	9,207	9,902	12,148	9,372	8,572	Profit before Income Tax
Laba	7,164	7,393	9,081	7,005	6,391	Profit
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	7,057	7,090	9,358	7,107	5,958	Total Comprehensive Income for the Year
EBITDA	10,554	11,250	13,374	10,150	9,258	EBITDA
Laba Bersih per Saham Dasar (dalam nilai penuh Rupiah)	188*	969	1,190	918	838	Basic Earnings per Share (in rupiah full amount)

*Laba per saham setelah stock split pada 2 Januari 2020/earning per share after stock split on 2 January 2020

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

Dalam miliar Rupiah, kecuali dinyatakan lain						In billion rupiah, unless otherwise stated
Keterangan	2020	2019	2018	2017	2016	Description
Aset Lancar	8,828	8,530	8,258	7,942	6,588	Current Assets
Jumlah Aset	20,535	20,649	20,327	18,906	16,746	Total Assets
Liabilitas Jangka Pendek	13,358	13,065	11,274	12,532	10,878	Current Liabilities
Jumlah Liabilitas	15,597	15,368	12,943	13,733	12,042	Total Liabilities
Ekuitas	4,937	5,282	7,384	5,173	4,704	Equity
Modal Kerja Bersih	(4,529)	(4,535)	(3,016)	(4,590)	(4,290)	Net Working Capital

RASIO KEUANGAN FINANCIAL RATIO

Dalam persentase atau kali						In percentage or times
Keterangan	2020	2019	2018	2017	2016	Description
Margin Laba Bruto	52.3%	51.3%	50.5%	51.5%	51.1%	Gross Profit Margin
Margin Laba Usaha	22.0%	23.6%	29.5%	23.0%	21.7%	Operating Profit Margin
Margin Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	16.4%	16.5%	22.4%	17.2%	14.9%	Total Comprehensive Income for the Year Margin
Margin EBITDA	24.6%	26.2%	32.0%	24.6%	23.1%	EBITDA Margin
Laba Usaha terhadap Ekuitas	191.4%	191.6%	166.9%	183.6%	185.1%	Operating Profit to Equity
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan terhadap Ekuitas	142.9%	134.2%	126.7%	137.4%	126.7%	Total Comprehensive Income for the Year to Equity
Laba Usaha terhadap Jumlah Aset	46.0%	49.0%	60.6%	50.2%	52.0%	Operating Profit to Total Assets
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan terhadap Jumlah Aset	34.4%	34.3%	46.0%	37.6%	35.6%	Total Comprehensive Income for the Year to Total Assets
Aset Lancar terhadap Liabilitas Jangka Pendek	66.1%	65.3%	73.2%	63.4%	60.6%	Current Assets to Current Liabilities
Jumlah Liabilitas terhadap Ekuitas	315.9%	290.9%	175.3%	265.5%	256.0%	Total Liabilities to Equity
Jumlah Liabilitas terhadap Jumlah Aset	76.0%	74.4%	63.7%	72.6%	71.9%	Total Liabilities to Total Assets
Imbal Hasil atas Aset	34.8%	36.1%	46.3%	39.3%	39.4%	Return on Assets
Imbal Hasil atas Ekuitas	140.2%	116.7%	144.6%	141.8%	134.1%	Return on Equity

RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

1. Nama : Wina Triana Noor Yusuf
2. Tempat, Tanggal Lahir : Bandung, 31 Juli 2000
3. Alamat : Kp. Cikurutug, Rt 05/Rw 013, Cicalengka,
Kabupaten Bandung.
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Agama : Islam
6. No. Hp : 089657300565
7. Email : winatri00@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

- 2006 – 2012 : SDN Cicalengka V Kab. Bandung
- 2012 – 2015 : SMPN I Cicalengka Kab. Bandung
- 2015 – 2018 : SMA PGRI Rancaekek Kab. Bandung
- 2018 – 2022 : STIE STAN Indonesia Mandiri Bandung

RIWAYAT ORGANISASI

- 2019 – 2020 : Dept. Ekonomi BEM STIE STAN-IM
- 2020 – 2021 : Dept. Sosial BEM STIE STAN-IM